



TUGAS AKHIR – RP141501

**ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
BERAT DI KELURAHAN CIKETINGUDIK DAN
SUMURBATU KOTA BEKASI**

ANINDITA WILANDARI
3613 100 026

Dosen Pembimbing
Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2017

(halaman ini sengaja dikosongkan)



FINAL PROJECT – RP141501

**THE DIRECTION OF ENVIRONMENTAL QUALITY
IMPROVEMENT OF THE SLUM SETTLEMENT IN
CIKETINGUDIK AND SUMURBATU, BEKASI**

ANINDITA WILANDARI
3613 100 026

Advisor
Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
Faculty of Civil Engineering and Planning
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya 2017

(halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN
ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERAT
DI KELURAHAN CIKETINGUDIK DAN
SUMURBATU KOTA BEKASI

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada

Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

ANINDITA WILANDARI

NRP. 3613 100 026

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :



Dr. Ing. Ir. Harvo Sulistyarso

NIP. 195504281983031001



SURABAYA, JULI 2017

(halaman ini sengaja dikosongkan)

**ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERAT
DI KELURAHAN CIKETINGUDIK DAN SUMURBATU
KOTA BEKASI**

Nama Mahasiswa : Anindita Wilandari
NRP : 3613100026
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota
Dosen Pembimbing : Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

ABSTRAK

Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi termasuk dalam kawasan permukiman kumuh berat. Kedua kelurahan ini berada di sekitar TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) Bantargebang. Kawasan kumuh tersebut mengalami penurunan kualitas lingkungan dan kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana.

Berdasarkan isu tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh berat di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu. Penelitian ini terdiri dari tiga sasaran, yaitu (1) Analisis variabel penyebab kekumuhan menggunakan metode Delphi, (2) Analisis prioritas penyebab kumuh untuk peningkatan kualitas lingkungan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), dan (3) Penentuan arahan peningkatan kualitas lingkungan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa variabel penyebab kumuh beserta prioritas peningkatan kualitasnya dan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh berat. Variabel penyebab kumuh beserta prioritasnya adalah infrastruktur permukiman (jaringan air bersih, persampahan, saluran air hujan/drainase, jaringan jalan),

peran pemerintah, standard pemanfaatan ruang sekitar TPA (jarak terhadap permukiman, bau, jarak terhadap badan air), ekonomi (tingkat pendapatan, jenis pekerjaan), kependudukan (status kependudukan, kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan), dan bahaya. Prioritas tertinggi ada pada jaringan air bersih, sehingga arahnya adalah penutupan sumur bor yang tercemar, revitalisasi sumur artesis, dan pengadaan HIPPAM di wilayah tercemar air lindih. Sementara itu, arahan lainnya adalah (a) penyediaan fasilitas dan sistem persampahan, penerangan jalan umum, *green barrier*, sumur uji, dan IPAL terpadu (b) perbaikan perkerasan jalan, (c) pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan (d) peningkatan peran pemerintah dalam menyediakan hunian layak huni bagi warga.

Kata Kunci : Permukiman Kumuh berat, Prioritas Peningkatan Kualitas, Peningkatan Kualitas Lingkungan.

THE DIRECTION OF ENVIRONMENTAL QUALITY IMPROVEMENT OF THE SLUM SETTLEMENT IN CIKETINGUDIK AND SUMURBATU, BEKASI

Name : Anindita Wilandari
NRP : 3613100026
Supervisor : Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

ABSTRACT

Located around the Bantargebang Integrated Waste Management Site (TPST Bantargebang), some parts of the settlement area in Ciketingudik and Sumurbatu are considered as the slum settlement. This slum settlement is experiencing a decrease of environmental quality and is lacking of infrastructure availability.

Therefore, the purpose of this study based on the issues which have been explained before is to determine the direction of improving the environmental quality of slum settlement in Ciketingudik and Sumurbatu Bekasi. This study consists of three steps, which are (1) Analyze the slum-causing variabels using Delphi, (2) Analyze each slum-causing variabel for environmental quality improvement using AHP (Analytical Hierarchy Process), and (3) Determine the direction of environmental quality improvement using QD (Qualitative Description) method.

Slum-causing variables determined are infrastructure (clean water, solid waste, drainage, and road network), government role in providing livable housing, TPST standard (distance to the settlement, the smell, distance to the river), Economy (income level, informal occupation), demography (urbanization, community awareness, education), and the last one is fire hazard. The highest priority is to improve the clean water network by closing the contaminated wells, revitalizing the

artesian wells, and procuring the HIPPAM in polluted water areas. Meanwhile, some other directions are classified as (a) Procurement of waste management, public road lighting, green barrier of TPST, monitoring wells, and integrated WWTP (IPAL); (b) Improvement of road pavement; (c) Empowerment of community's economy; and (d) Enhancement of government's role to provide livable housing.

Keywords : Slum settlement, Quality Improvement Priority, Environmental Quality Improvement

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian mata kuliah Tugas Akhir yang berjudul ***“Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi”*** dengan lancar.

Selama proses penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan dari pihak-pihak lain sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan optimal. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini yaitu:

1. Bapak Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso selaku dosen pembimbing mata kuliah Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
2. Ibu Hertiarti Idajati, S.T., M.Sc. dan Dewi Septanti, S.Pd, S.T., Ph.D. selaku dosen penguji sidang pembahasan yang telah memberikan masukan perbaikan kepada penulis.
3. Para stakeholders, yaitu Bappeda Kota Bekasi, Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dinas PUPR Kota Bekasi, Kelurahan Ciketingudik, dan Kelurahan Sumurbatu sebagai responden yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis menyelesaikan proses analisis.
4. Orang tua yang telah mendukung dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan.

Laporan ini berisikan analisis variabel penyebab kekumuhan dan prioritas peningkatan kualitasnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh berat. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna,

oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan makalah ini.

Surabaya, 28 Juli 2017

Anindita Wilandari
NRP. 3613100026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Sasaran	5
1.4 Ruang Lingkup	5
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	5
1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.4.3 Ruang Lingkup Substansi	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.5.1 Manfaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis	9
1.6 Hasil yang Diharapkan	10
1.7 Kerangka Pemikiran	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Perumahan dan Permukiman dalam Konteks Perkotaan ..	13
2.1.1 Perumahan dan Permukiman	13
2.1.2 Perumahan dan Permukiman Layak Huni	15
2.2 Permukiman Kumuh	17
2.2.1 Hakikat Permukiman Kumuh	17
2.2.2 Karakteristik Permukiman Kumuh	17
2.2.3 Penyebab dan Proses Perkembangan Permukiman Kumuh	20
2.2.4 Dampak Perkembangan Permukiman Kumuh	23
2.3 Tempat Pemrosesan Akhir	25

2.3.1 Penentuan Lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Kota Banjarbaru Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	30
2.4.1 Penataan Saluran Drainase Kepanjen Kabupaten Malang	30
2.4.2 Mitigasi Kebakaran Berbasis Masyarakat di Jabodetabek.....	30
2.4.3 Pengelolaan Persampahan dalam Mendukung Perolehan Adipura di Kota Semarang	31
2.4.4 Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya.....	32
2.4.5 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pangkalpinang..	32
2.4.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Propinsi Bali	33
2.4.7 Penyediaan Air Bersih pada Kawasan Rawan Air Bersih di Pesisir Utara Lamongan	34
2.5 Sintesa Pustaka	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Jenis Penelitian	43
3.3 Variabel Penelitian	45
3.4 Penentuan Populasi dan Sampel	49
3.5 Metode Penelitian	55
3.5.1 Metode Pengumpulan Data.....	55
3.5.2 Metode Analisis.....	60
3.6 Tahapan Penelitian	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Gambaran Umum	69
4.1.1 Peran pemerintah	69
4.1.2 Ekonomi	71
4.1.3 Kependudukan.....	72
4.1.4 Infrastruktur permukiman	79
4.1.5 Bahaya.....	97

4.1.6 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).....	101
4.2 Analisis Variabel Penyebab Kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu.....	109
4.3 Analisis Prioritas Variabel Penyebab Kekumuhan untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu	119
4.3.1 Hasil Analisis antar Kriteria (Faktor).....	122
4.3.2 Hasil Analisis antar Variabel	122
4.4 Menentukan Arah Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu	125
BAB V PENUTUP.....	149
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN.....	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Batas Wilayah Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 1 Tahapan Analisis Stakeholders	50
Gambar 3. 2 Diagram Tingkat Kepentingan Stakeholders	53
Gambar 3. 3 Prosedur Metode Delphi	61
Gambar 3. 4 Langkah dalam Metode AHP	62
Gambar 3. 5 Struktur Hirarki AHP	63
Gambar 3. 6 Tahapan Penelitian.....	68
Gambar 4. 1 Rumah Tidak Layak Huni.....	71
Gambar 4. 2 SMPN 27 Bekasi	76
Gambar 4. 3 (a) SMKN 2 Bekasi dan (b) SMAN 15 Bekasi	76
Gambar 4. 4 Persebaran Fasilitas Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 5 Sumur Artesis di RW 03 Kelurahan Sumurbatu	79
Gambar 4. 6 Sumur Artesis di RW 05 Kelurahan Sumurbatu	80
Gambar 4. 7 Kondisi Air Bersih dan Persebaran Sumur Artesis	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 8 MCK Umum di RW 03 Kelurahan Sumurbatu	86
Gambar 4. 9 Persebaran MCK Umum	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 10 Tumpukan Sampah dan Pembakaran Sampah	89
Gambar 4. 11 (a) Saluran Drainase dan (b) Saluran Drainase Terputus	90
Gambar 4. 12 Jaringan Jalan	92
Gambar 4. 13 Pemakaman di RW 03 Kelurahan Sumurbatu	93
Gambar 4. 14 (a) Lapangan di RW 02 Kelurahan Sumurbatu dan (b) Pos Ronda di RW 05 Kelurahan Ciketingudik.....	94
Gambar 4. 15 Persebaran Ruang Terbuka	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 16 Persebaran Bahaya	Error! Bookmark not defined.

Gambar 4. 17 Jarak TPST Bantargebang - Kali Kramat.....	102
Gambar 4. 18 Jarak TPST - Kali Cileungsi	102
Gambar 4. 19 Klasifikasi Kawasan TPST Bantargebang	103
Gambar 4. 20 Transportasi Sampah TPST Bantargebang.....	105
Gambar 4. 21 TPST Bantargebang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 22 Struktur Hirarki AHP	121
Gambar 4. 23 Hirarki Prioritas Indikator.....	122
Gambar 4. 24 Hirarki Prioritas Variabel Infrastruktur Permukiman	123
Gambar 4. 25 Hirarki Prioritas Variabel Standard TPA	123
Gambar 4. 26 Hirarki Prioritas Variabel Ekonomi	124
Gambar 4. 27 Hirarki Prioritas Variabel Kependudukan	124
Gambar 4. 28 Peta Arahan Jaringan Air Bersih.....	140
Gambar 4. 29 Peta Arahan Saluran Drainase	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 30 Peta Arahan Jaringan Jalan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 31 Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Sekitar TPST	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kompilasi Pustaka tentang Penyebab Permukiman Kumuh	21
Tabel 2. 2 Kompilasi Pustaka tentang Tempat Pemrosesan Akhir	29
Tabel 2. 3 Sintesa Tinjauan Pustaka	34
Tabel 2. 4 Tinjauan Pustaka Tempat Pemrosesan Akhir	38
Tabel 2. 5 Sintesa Pustaka	40
Tabel 3. 1 Penggunaan Pendekatan dan Metode Penelitian	44
Tabel 3. 2 Variabel Penelitian	46
Tabel 3. 3 Kepentingan <i>Stakeholders</i> dalam Penelitian	50
Tabel 3. 4 Kriteria Responden	53
Tabel 3. 5 Metode Pengumpulan Data Primer	57
Tabel 3. 6 Desain Survey	59
Tabel 3. 7 Skala Preferensi dari Perbandingan Dua Kriteria	63
Tabel 3. 8 Teknik Analisis Data	65
Tabel 4. 1 Daftar Penerima Bantuan Program RUTILAHU Kota Bekasi Tahun 2016.....	70
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk	73
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015.....	75
Tabel 4. 4 Sumber Air Minum	80
Tabel 4. 5 Sumber dan Kualitas Air Bersih	80
Tabel 4. 6 Sumur Artesis	81
Tabel 4. 7 MCK Umum.....	85
Tabel 4. 8 MCK Umum Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi DKI Jakarta, dan Kodim.....	86
Tabel 4. 9 Jaringan Jalan Tanpa Saluran Air Hujan/Drainase	90
Tabel 4. 10 Presentase Jalan Rusak	91
Tabel 4. 11 Ruang Terbuka di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu	92

Tabel 4. 12 Lokasi Bahaya	97
Tabel 4. 13 Dampak Bau dari TPST Bantargebang	104
Tabel 4. 14 Daftar Responden	109
Tabel 4. 15 Analisis Delphi Putaran 1	110
Tabel 4. 16 Variabel Baru	112
Tabel 4. 17 Analisis Delphi Putaran 2	112
Tabel 4. 18 Analisis Delphi Putaran 3	114
Tabel 4. 19 Daftar Responden	119
Tabel 4. 20 Faktor Penyebab Kumuh	119
Tabel 4. 21 Hirarki Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Berat	124
Tabel 4. 22 Analisis Arahan	127

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 (Analisa Stakeholders)	160
LAMPIRAN 2 (Kuisisioner Identifikasi Penyebab Permukiman Kumuh)	166
LAMPIRAN 3 (Kuisisioner Delphi)	171
LAMPIRAN 4 (Kuisisioner AHP)	176
LAMPIRAN 5 (Hasil Kuisisioner Delphi Putaran 1)	186
LAMPIRAN 6 (Hasil Kuisisioner Delphi Putaran 2)	221
LAMPIRAN 7 (Hasil Kuisisioner Delphi Putaran 3)	246
LAMPIRAN 8 (Hasil Kuisisioner AHP)	257

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bekasi secara geografis berada pada wilayah pusat pertumbuhan nasional. Kota ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota terbesar ke-empat di Indonesia. Saat ini, Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri yang bekerja di pusat Kota Jakarta. Hal tersebut menjadikan Kota Bekasi memiliki posisi strategis terhadap pengembangan kota-kota sekitarnya terutama dalam bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan Dokumen Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi sebesar 1.793.924 jiwa pada tahun 2008 dan telah bertambah menjadi sebesar 2.382.689 jiwa pada tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mencapai 23,71% dalam kurun tahun 2008 – 2014. Dengan begitu, rata-rata pertumbuhan penduduk di kota ini adalah sebesar 3,95%. Besarnya laju pertumbuhan penduduk, ditambah dengan potensi strategis dalam bidang perumahan dan permukiman tersebut, akan berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan pemanfaatan lahan kota sebagai lahan permukiman (Rindarjono M. G., 2012).

Kebutuhan yang kian meningkat tanpa diiringi oleh ketersediaan lahan yang cukup akan menimbulkan konsekuensi ekonomis yaitu harga lahan yang kian meningkat yang akan menyebabkan rendahnya kemampuan untuk memiliki rumah (Rindarjono M. G., 2012). Ketersediaan jumlah luasan lahan yang terbatas tersebut menyebabkan terjadinya pemadatan bangunan (*density*) pada kawasan-kawasan permukiman tertentu. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan terbentuknya permukiman-permukiman kumuh. Berdasarkan data dari Dinas Pembangunan dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi, terdapat 34 titik lokasi

permukiman kumuh yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kota Bekasi. Kawasan kumuh di Kota Bekasi pada tahun 2014 mencapai seluas 34,38 hektar yang terdiri dari tingkat kumuh rendah, sedang, dan berat, dari keseluruhan luas wilayah Kota Bekasi yang seluas 21.049 hektar, sehingga menjadikan capaian kinerja kawasan kumuh mencapai 0,16% dari total luas wilayah Kota Bekasi (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014).

Salah satu titik lokasi permukiman kumuh dari 34 titik yang dinyatakan oleh Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi, terdapat pada kawasan permukiman kumuh sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Dalam penelitian ini, yang akan dikaji adalah permukiman kumuh berat yang terdapat di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Ciketingudik (RW 1, RW 4, dan RW 5) dan Kelurahan Sumurbatu (RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, dan RW 5). Kriteria permukiman kumuh di kedua kelurahan tersebut tergolong ke dalam permukiman kumuh dataran rendah.

Berdasarkan RPKPP Kota Bekasi, permasalahan utama yang terjadi di permukiman kumuh berat Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu kurang lebih sama, yaitu masih terdapat sistem pembuangan air limbah dengan memanfaatkan kolam-kolam penampungan, belum terdapat pelayanan persampahan, jaringan air bersih dan minum belum terlayani jaringan perpipaan PDAM, jaringan drainase belum berfungsi secara optimal, sebagian besar jaringan jalan belum dilengkapi saluran drainase, jaringan drainase belum berfungsi secara optimal, masih terdapat jalan dengan perkerasan tanah, kondisi bangunan berada pada lokasi yang tidak memiliki persyaratan teknis, dan tidak tersedia hydran pemadam kebakaran.

TPST Bantargebang sendiri awalnya merupakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang mulai dioperasikan sejak tahun 1989. TPST ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemilik lahan, sementara lokasinya terdapat di wilayah administratif Kota Bekasi (F, 2015). Lokasinya terletak di atas lahan seluas 110,216 hektar serta mencakup 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Ciketingudik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu. Volume sampah Provinsi DKI Jakarta yang masuk ke TPST Bantargebang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,02 juta ton/tahun atau sekitar 20.000 ton/tahun (Juliansah, 2010). Sampah yang terus menerus dikirim ke TPST akan menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik.

Fakta menunjukkan bahwa gunung sampah-sampah tersebut telah menimbulkan masalah, seperti kondisi jaringan jalan yang dipenuhi dengan sampah yang berserakan dikarenakan tidak terdapatnya manajemen persampahan yang baik (Survey Primer, 2016). Selain itu, pelayanan penyediaan air bersih di permukiman ini juga belum dapat menjangkau seluruh warga sehingga menjadi isu yang serius. Hal tersebut diperparah dengan pencemaran air pada sumur-sumur warga yang disebabkan oleh sampah-sampah yang dibiarkan menggunung di tengah-tengah pemukiman warga dan dampak bau yang sangat terasa akibat keberadaan TPST Bantargebang (Harian Rakyat Merdeka, 2016).

Pemerintah Kota Bekasi bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya dalam menangani permukiman kumuh tersebut. Upaya tersebut adalah program perbaikan RUTILAHU (rumah tidak layak huni) untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni dan tidak sesuai standar, pengadaan sumur artesis untuk melayani kebutuhan air bersih bagi warga, dan MCK umum untuk memfasilitasi warga yang tidak memiliki MCK pribadi. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi permasalahan kumuh yang ada. Dapat dilihat dari masih terdapat warga yang menempati rumah yang tidak layak, tidak

mendapatkan air bersih, dan beberapa MCK umum yang telah rusak sehingga tidak dapat digunakan.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan tersebut, serta dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 yang mengamanatkan untuk dilakukannya peningkatan kualitas lingkungan, dan juga diarenakan masih belum tepatnya usaha penanganan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu, urgensi penanganan permasalahan permukiman sangat tinggi karena rumah dengan lingkungan yang baik merupakan hak dasar bagi setiap orang, termasuk masyarakat di kawasan permukiman kumuh berat Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu.

1.2 Rumusan Masalah

Permukiman kumuh berat di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu terletak di sekitar TPST Bantargebang. Kawasan permukiman kumuh berat tersebut mengalami penurunan kualitas udara yang terjadi akibat dekatnya lokasi TPST Bantargebang, berserakannya sampah pada jalan, distribusi air bersih yang tidak merata, serta pencemaran air pada sumur-sumur warga akibat sampah yang dibiarkan menggenangi di tengah-tengah permukiman warga. Jika penurunan kualitas lingkungan yang terjadi tersebut dibiarkan, maka masyarakat setempat akan terus-menerus hidup dalam ketidaknyamanan serta akan berdampak kepada kondisi kesehatan.

Oleh karena itu dibutuhkan arahan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh berat di kedua kelurahan tersebut. Dalam merumuskan arahannya, perlu dilakukan peninjauan multiaspek. Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah *Bagaimana arahan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh*

berat di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu, Bekasi?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh berat di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis variabel penyebab kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu
2. Menganalisis prioritas variabel penyebab kekumuhan untuk peningkatan kualitas lingkungan di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu
3. Menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Pada ruang lingkup wilayah menjelaskan tentang batas teritorial penelitian berupa batas administratif. Pada ruang lingkup pembahasan merupakan pembahasan pada aspek yang akan dibahas. Pada ruang lingkup substansi menjelaskan pembatasan substansi teori dan konsep yang akan digunakan.

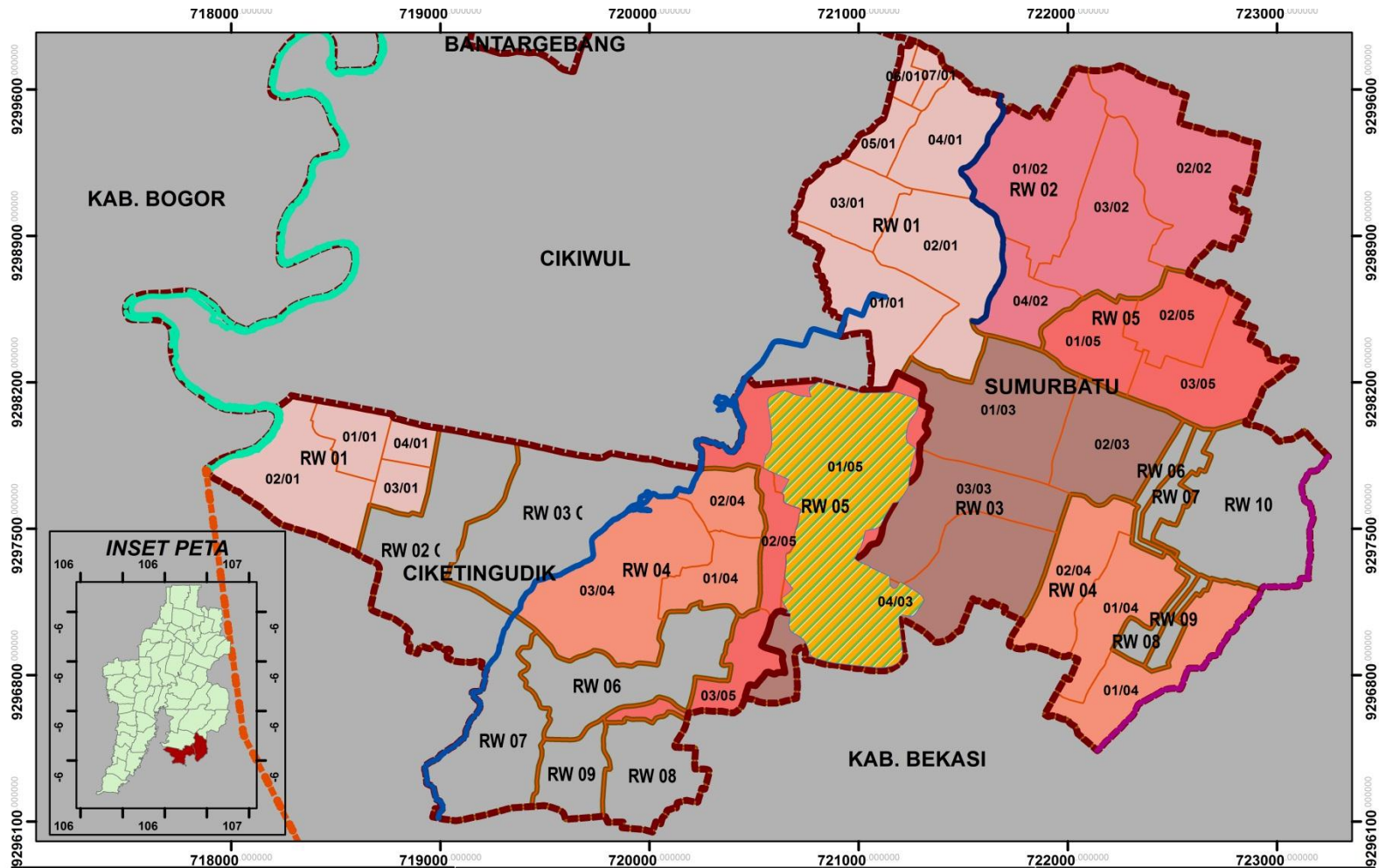
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah kawasan permukiman kumuh berat di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu. Adapun batas-batas administratif dari wilayah penelitian adalah sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor

Sebelah Barat : RW 2, 3, 6, 7, 8, 9 Kel. Ciketingudik
Sebelah Utara : Kec. Pedurenan dan Kec. Cimuning
Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Dalam penelitian ini, wilayah penelitian ini dibatasi pada permukiman kumuh berat yang terletak di Kelurahan Ciketingudik (RW 1, RW 4, dan RW 5) dan Kelurahan Sumurbatu (RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, dan RW 5).



Gambar I.1
Peta Batas Wilayah Penelitian

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2017

Legenda

Batas Wilayah

- Batas Kelurahan
- Batas Kabupaten
- Batas RT
- Batas RW
- Di Luar Wilayah Penelitian

Kali / Sungai

- Kali Ciketing
- Kali Cileungsi
- Kali Kramat
- Kali Serang

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

- TPST Bantargebang



1:24,000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6 Miles

Sumber :

- Dinas PUPR Kota Bekasi
- Bappeda Kota Bekasi
- Participatory Mapping 2017

(halaman ini sengaja dikosongkan)

(jangan di-print)

1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dibatasi oleh arahan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh berat di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu. Arahan tersebut akan dihasilkan dengan meninjau karakteristik permukiman kumuh, penyebab kekumuhan, dan prioritas peningkatan kualitasnya.

1.4.3 Ruang Lingkup Substansi

Substansi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terakait teori-teori perumahan dan permukiman, penyebab perkembangan permukiman kumuh, penanganan permukiman kumuh, dan standard Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis menjelaskan bagaimana sumbangsih penelitian ini terhadap bidang keilmuan perumahan dan permukiman, khususnya tentang penanganan permukiman kumuh. Sedangkan manfaat secara praktis adalah manfaat yang didapatkan sebagai rekomendasi yang dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah yang ada bagi Pemerintah Kota Bekasi.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah pengembangan konsep permukiman kumuh sekitar TPST/TPA.

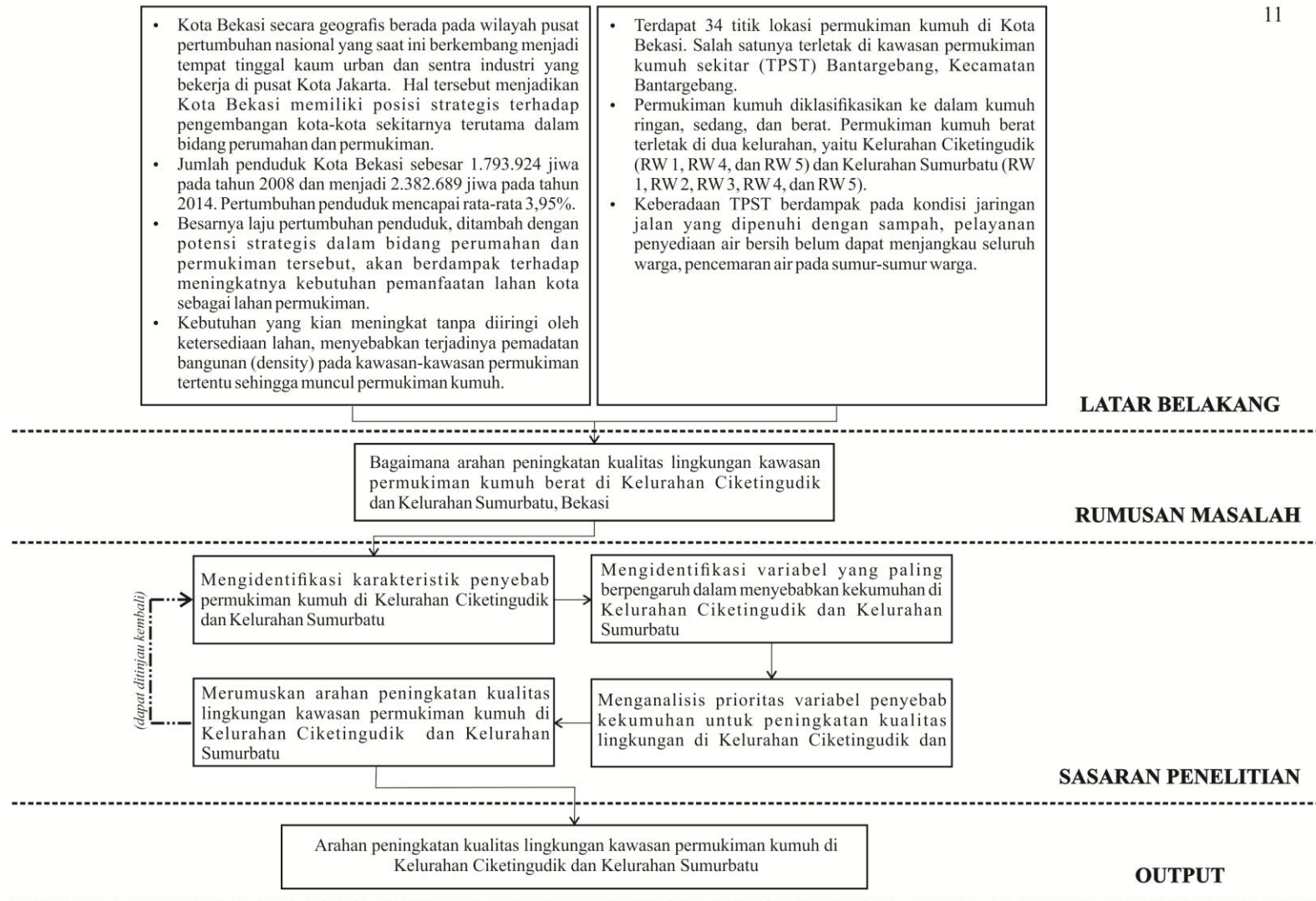
1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat menjadikan arahan yang muncul sebagai solusi dan rekomendasi aplikatif bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada permukiman kumuh berat, khususnya di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu.

1.6 Hasil yang Diharapkan

Adapun hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah terbentuknya arahan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh berat di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu Kota Bekasi.

1.7 Kerangka Pemikiran



Gambar I. 2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis, 2016

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman dalam Konteks Perkotaan

2.1.1 Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang telah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Maka pada undang-undang ini, perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Permukiman dapat didefinisikan sebagai tempat manusia hidup dan menjalani kehidupan. Permukiman terdiri dari *content* yaitu manusia dan *container* yaitu wadah atau *physical settlement*, baik buatan manusia maupun alam sebagai tempat untuk hidup manusia dengan segala aktivitasnya. Kedua bagian tersebut merupakan kesatuan yang memberi arti luas bahwa permukiman dalam batas geografis adalah bumi itu sendiri. Oleh karena itu, permukiman mencakup seluruh *settlement* manusia termasuk kota, desa, dan seluruh lingkungan alam yang menopang kehidupan manusia di bumi ini sebagai *Anthropocosmos*. Dengan demikian, pengertian permukiman adalah menyangkut ruang dan manusia yang hidup di dalamnya. *Container* sebagai ruang

diartikan sebagai prasarana dan sarana fisik (*man made environment*), sedangkan *natural environment* yaitu semua elemen fisik alam abiotik, biotik, dan makhluk-makhluk di dalamnya dalam kesatuan ekologi (Soetomo, 2009). Berdasarkan Teori Doxiadis tersebut, manusia ditempatkan sebagai subjek, sedangkan alam di luar manusia ditempatkan sebagai objek. Selanjutnya, *container* dan *contents* terdiri dari 5 (lima) elemen *human settlement*. *Container* atau wadah terdiri dari *manmade environment* sebagai berikut :

1. *Shells*

Shells atau ruang bangunan dari bangunan gedung hingga kelompok yang mencapai skala permukiman, kampung, kota, dan aglomerasi fisik wilayah, dan tempat manusia tinggal.

2. *Network*

Network atau jaringan yang meliputi prasarana tempat manusia berkomunikasi, dan jaringan utilitas tempat materi mengalir (transportasi, air, listrik, dan lain-lain).

3. *Nature*

Nature atau alam sebagai *natural environment* terdiri dari elemen bukan biotik dan biotik: lingkungan fisik alam, klimatologis, dan habitat makhluk yang menempatnya. Elemen alam ini juga dalam kondisi pengolahan alamiah seperti *landscape*, pertanian, kehutanan, oleh karena itu pengolahannya berada dalam sifat alam dan ekologi.

Sedangkan, *contents* atau isi adalah manusia itu sendiri yang terdiri dari :

1. *Man*

Man atau manusia sebagai makhluk individu dengan segala kepribadian dan identitasnya sebagai jagad kecil *anthropos* yang kompleks.

2. *Society*

Society atau masyarakat ataupun kumpulan manusia dari keluarga, *neighborhood*, hingga warga dunia dengan

segala hubungannya yang kompleks dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Menurut Barlow dan Newton dalam (Soetomo, 2009), istilah permukiman atau *settlement* juga dapat diartikan sebagai semua tipe tempat tinggal manusia, baik satu gubug atau pondok tunggal beratap dedaunan, atau rumah-rumah di perladangan hingga permukiman yang sangat besar dengan ribuan bangunan atau ribuan tempat tinggal. Oleh karena itu, perumahan adalah suatu tempat dimana terdapat bangunan rumah tempat tinggal beserta dengan fasilitasnya

Melihat dari banyaknya perbedaan pengertian permukiman yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pengertian permukiman akan dibatasi pada makna perumahan dalam penelitian ini. Adapun makna permukiman yang akan digunakan adalah kelompok bangunan rumah dengan segala perlengkapannya yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal secara menetap maupun sementara dalam rangka melakukan kehidupannya.

2.1.2 Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Menurut Sebastian (2009), dikatakan bahwa perumahan dan permukiman layak huni dilihat dari ketersediaan berbagai kelengkapan dan pelayanan tertentu. Kelengkapan minimal yang harus ada adalah sebagai berikut :

- a. Prasarana air bersih
Prasarana air bersih yang harus ada di setiap rumah berupa air bersih yang dapat digunakan untuk air minum, masak, mandi, dan mencuci.
- b. Pembuangan kotoran dan air hujan
Pembuangan kotoran dan air hujan yang harus ada di setiap rumah berupa kakus yang dihubungkan dengan *septic tank* dan juga sistem pengaliran air yang terencana dan memenuhi standar kesehatan.
- c. Penempatan utilitas

Penempatan utilitas sebaiknya tidak ditempatkan di bawah jalan yang diperkeras untuk menghindari adanya gangguan lalu lintas jika sedang dilakukan pembongkaran. Jika utilitas itu terpaksa ditempatkan di bawah tanah, sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicapai bila perlu dilakukan pemeriksaan dan penggantian.

d. Persampahan

Pelayanan persampahan dapat berupa penyediaan bak sampah yang dapat ditutup dan mudah untuk dibersihkan. Bak-bak sampah tersebut harus tersedia di tiap-tiap rumah yang ada.

e. Sarana pelayanan masyarakat

Berupa ketersediaan taman, sarana kesehatan, sarana niaga, sarana pendidikan yang dapat dijangkau.

Selanjutnya menurut Sinulingga (2005), permukiman yang layak huni adalah permukiman yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

- a. Prasarana pembuangan air kotor/tinja dengan sistem individual berupa septic tank dan lapangan rembesan atau septic tank komunal. Sementara itu, khusus bagi permukiman dengan bangunan padat sebaiknya dibuat sistem perpipaan air kotor.
- b. Dilayani oleh sistem pembuangan sampah secara teratur
- c. Fasilitas umum seperti taman bermain, lapangan, rumah ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan skala permukiman
- d. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon
- e. Distribusi air bersih yang dapat menjangkau seluruh rumah
- f. Jaringan air bersih yang mampu mengalirkan air hujan dengan cepat sehingga tidak terdapat genangan
- g. Lokasi permukiman tidak terganggu oleh kegiatan lain yang menimbulkan dampak pencemaran udara atau lingkungan seperti pabrik.

- h. Memiliki akses terhadap pusat-pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Akses tersebut dapat dicapai dengan membuat jalan dan mengadakan sarana transportasi.

Menurut De Chiara dan Koppelman dalam (Herasanti, 2002), dikatakan bahwa adanya tujuh karakteristik yang harus diperhatikan pada perencanaan kawasan perumahan agar layak huni, adalah :

- a. Kondisi tanah dan lapisan tanah
- b. Air tanah dan drainase
- c. Bebas atau tidaknya dari bahaya banjir permukaan
- d. Bebas atau tidaknya dari bahaya-bahaya topografi
- e. Pemenuhan pelayanan kesehatan dan keamanan, pembuangan air limbah, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, dan jaringan utilitas
- f. Potensi untuk pengembangan ruang terbuka
- g. Bebas atau tidaknya dari gangguan debu, asap, dan bau busuk

2.2 Permukiman Kumuh

2.2.1 Hakikat Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan sebuah kawasan dengan kondisi bangunan, lingkungan, prasarana dan sarana yang buruk dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Standar tersebut adalah standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi, maupun standar kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, dan fasilitas sosial lainnya (Suparlan dalam (Rindarjono M. G., 2012).

2.2.2 Karakteristik Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan, dijelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang

tidak memenuhi syarat. Adapun kriteria permukiman kumuh berdasarkan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi
- b. Ketidaklengkapan sarana, prasarana, dan utilitas umum
- c. Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum
- d. Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan prasarana adalah jalan, drainase, sanitase, dan air minum. Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah jaringan listrik dan jaringan telepon. Sedangkan, yang dimaksud dengan sarana adalah rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH).

Istilah permukiman kumuh juga didefinisikan sebagai kumpulan permukiman yang memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut (Soeki (1993) dalam (Rindarjono M. G., 2012) :

- a. Tingginya tingkat kepadatan penduduk lebih dari 1.250 jiwa/Ha
- b. Kepadatan bangunan yang mencapai 250 rumah atau lebih per hektarnya
- c. Ukuran bangunan yang cenderung kecil, sekitar 25 m² atau kurang
- d. Tata letak bangunan yang tidak teratur
- e. Sanitasi yang jelek serta kualitas bangunan yang jelek

Berdasarkan *The United Nations Human Settlements Programme* (UN-HABITAT) Tahun 2008, permukiman kumuh didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan dari individu yang tinggal dalam satu atap di suatu perkotaan yang kekurangan satu atau lebih hal-hal berikut :

- a. Permukiman yang dapat bertahan dalam kondisi iklim yang ekstrem
- b. Kecukupan ruang dalam hunian, dimana tidak lebih dari 3 (tiga) orang membagi ruang yang sama
- c. Kemudahan akses untuk mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau

- d. Akses terhadap sanitasi yang memadai dengan pengadaan toilet pribadi maupun toilet umum dengan pembatasan jumlah penggunaanya
- e. Adanya rasa aman terhadap hak milik tanah maupun bangunan yang dapat mencegah penduduk dari penggusuran secara paksa

Keberadaan permukiman kumuh dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu *squatters* dan *slums*. *Squatters* diartikan sebagai permukiman kumuh yang tumbuh secara tidak terencana di atas lahan sebuah negara tanpa persetujuan pemerintah setempat pada negara tersebut, yang umumnya terletak pada lahan-lahan yang tidak memiliki izin seperti bantaran kali, pinggir rel, bawah jalan layang dan taman kota. Sedangkan *slums* merupakan permukiman kumuh yang legal dan memiliki kepemilikan yang jelas atas tanah dan bangunannya. Ditinjau berdasarkan kategorinya, maka permukiman kumuh di wilayah penelitian termasuk ke dalam *slums*, yaitu permukiman kumuh yang legal. Timbulnya permukiman kumuh tersebut, baik *slums* ataupun *squatters*, menimbulkan masalah lingkungan pada masyarakat. Masyarakat yang berpotensi tinggi untuk terdampak masalah-masalah tersebut adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berikut adalah klasifikasi permukiman kumuh dan masing-masing masalah lingkungan dan resikonya.

Dari berbagai definisi mengenai permukiman kumuh yang telah disebutkan di atas, maka permukiman kumuh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permukiman dengan kepadatan bangunan serta kepadatan penduduknya yang tinggi. Dari segi fisik, permukiman ini terdiri dari kelompok hunian-hunian dengan ukuran bangunan yang cenderung kecil dan umumnya berisikan 3 (tiga) orang atau lebih dalam satu hunian. Selain itu, permukiman ini juga tidak memenuhi standar kelayakan sebuah permukiman, seperti distribusi air bersih yang tidak merata, akses terhadap sanitasi yang buruk, kondisi jaringan

jalan yang tidak memadai, serta akses warga terhadap fasilitas umum yang tidak mendukung.

2.2.3 Penyebab dan Proses Perkembangan Permukiman Kumuh

Keberadaan permukiman kumuh disebabkan oleh adanya pengaruh pertambahan kepadatan penduduk akibat dari urbanisasi, kemiskinan, kebudayaan, dan aktivitas politik (Clinord (1978) dalam (Rindarjono M. G., 2012). Berkembangnya permukiman kumuh di perkotaan juga disebabkan oleh 2 (dua) faktor (Astuti, 2004), yaitu :

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan krisis ekonomi, dapat menjadi pendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki, ditambah dengan persaingan di perkotaan yang ketat, maka pendatang tersebut hanya dapat membangun dan menempati rumah dengan kondisi yang sangat minim di perkotaan. Selain itu, jumlah pendatang yang banyak menyebabkan pemerintah tidak dapat menyediakan hunian yang layak bagi mereka

b. Faktor bencana

Faktor bencana, baik bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, longsor, ataupun bencana akibat perang dan pertikaian dapat menjadi salah satu pendorong perluasan permukiman kumuh.

Menurut (Sadyohutomo, 2008), permukiman kumuh terbentuk dikarenakan 2 (dua) hal berikut ini :

a. Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup

b. Ketidaktanggapan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Hal tersebut menyebabkan perilaku masyarakat yang secara swadaya

membangun permukiman tanpa didasari dengan perencanaan tapak yang memadai dan akhirnya bentuk serta tata letak kavling tanah menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana dasar permukiman.

Sementara itu, menurut (Suud & Navitas, 2015), yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
- b. Kepadatan penduduk yang tinggi
- c. Kondisi pelayanan air bersih yang belum merata dalam menjangkau masyarakat
- d. Kondisi sanitasi lingkungan yang tidak layak
- e. Kondisi fasilitas persampahan yang buruk
- f. Kondisi jalan yang buruk baik dari segi perkerasan maupun lebar jalan
- g. Keterbatasan ruang terbuka
- h. Jenis pekerjaan informal dengan pendapatan rendah
- i. Tingkat pendidikan yang rendah
- j. Keterbatasan lahan permukiman

Tabel 2. 1 Kompilasi Pustaka tentang Penyebab Permukiman Kumuh

No.	Sumber	Tinjauan	Yang Diperhatikan
1	Clinord (1978)	Keberadaan permukiman kumuh disebabkan oleh adanya pengaruh pertambahan kepadatan penduduk akibat dari urbanisasi, kemiskinan, kebudayaan, dan aktivitas politik.	a. Urbanisasi b. Kemiskinan c. Kebudayaan d. Aktivitas politik
2	Astuti (2004)	Berkembangnya	a. Faktor ekonomi

		permukiman kumuh di perkotaan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Krisis ekonomi • Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak <p>b. Faktor bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banjir • Gempa • Gunung meletus • Longsor • Bencana akibat perang dan pertikaian
3	Sadyohutomo (2008)	Permukiman kumuh terbentuk dikarenakan 2 hal, yaitu pendapatan yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan kota dan pemerintah yang kurang tanggap.	<p>a. Pertumbuhan kota yang tinggi</p> <p>b. Tingkat pendapatan</p>
4	Barno Suud dan Prananda Navitas (2015)	Penyebab permukiman kumuh terbagi ke dalam infrastruktur, kependudukan, dan ekonomi.	<p>a. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi</p> <p>b. Kepadatan penduduk tinggi</p> <p>c. Pelayanan air bersih</p> <p>d. Sanitasi lingkungan</p> <p>e. Fasilitas persampahan</p> <p>f. Kondisi saluran air hujan / drainase</p> <p>g. Kondisi jalan</p> <p>h. Keterbatasan ruang terbuka</p>

			i. Jenis pekerjaan informal j. Tingkat pendidikan k. Keterbatasan lahan permukiman
--	--	--	--

Sumber : Penulis, 2016

Proses perkembangan permukiman kumuh yang terjadi berlangsung secara lambat dalam waktu yang lama dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori Bourne dalam (Krisnajayanti & Zain, 2016), yaitu :

a. *Ageing process* (proses penuaan)

Proses penuaan bangunan merupakan proses penurunan kualitas bangunan karena faktor umur bangunan yang semakin tua semakin menjadi rapuh, serta kondisi bangunan menjadi kian memburuk, sehingga menciptakan lingkungan yang kumuh.

b. *Densification process* (proses pemadatan)

Proses pemadatan bangunan karena adanya penambahan penduduk yang menyebabkan kebutuhan akan ruang untuk tempat tinggal semakin meningkat dan terdapat kecenderungan untuk menempati lahan-lahan kosong yang ada. Proses tersebut berjalan terus menerus sehingga tidak ada lagi lahan kosong yang tersisa. Hal yang terjadi adalah rumah-rumah yang semakin berdempetan dan tidak lagi menyisakan ruang kosong.

2.2.4 Dampak Perkembangan Permukiman Kumuh

Dampak yang ditimbulkan dari adanya permukiman kumuh dalam kaitannya dengan keruangan adalah timbulnya deteriorisasi lingkungan permukiman kumuh, yakni penurunan kualitas lingkungan fisik maupun sosial permukiman yang berakibat semakin rendahnya mutu lingkungan sebagai tempat hunian (Rindarjono M. G., 2012).

Permasalahan lain yang dapat ditimbulkan dari adanya permukiman kumuh terhadap kondisi sosial masyarakat adalah

kualitas kehidupan penghuninya akan terus menurun karena terus terjatuh di bawah garis kemiskinan. Selain itu, permukiman dapat menyebabkan terbentuknya perilaku menyimpang dan budaya kumuh. Perilaku menyimpang terbentuk karena sulitnya mencari atau menciptakan pekerjaan sendiri dengan keahlian dan pengetahuan yang teratas ataupun kurang, dan juga disebabkan karena menerima kenyataan bahwa impian yang mereka harapkan tentang kehidupan di kota yang indah ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan mereka. Sementara itu, budaya kumuh terbentuk karena masyarakat pada permukiman kumuh telah terbiasa dengan kondisi lingkungan yang kumuh. Hal tersebut kemudian terbawa dalam keseharian dalam berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungannya. Permasalahan lain yang terjadi adalah lingkungan yang terisolir dari keterjangkauan prasarana dan sarana, kehidupan sosial di luar lingkungan kumuh, dan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Akibat yang terjadi dari terisolirnya lingkungan permukiman tersebut adalah masyarakat menjadi apatis terhadap kondisi sekitarnya karena mereka akan lebih memilih untuk memikirkan kondisi kehidupan dan cara untuk bertahan hidup, jika dibandingkan harus memikirkan hal lainnya (Kurniasih, 2009).

Kondisi kualitas lingkungan yang semakin menurun karena permukiman kumuh dapat diamati berdasarkan hal sebagai berikut (Rindarjono M. G., 2012) :

- a. Fasilitas umum yang kondisinya dari tahun ke tahun semakin berkurang atau bahkan sudah tidak memadai lagi.
- b. Sanitasi lingkungan yang semakin menurun, hal ini dicerminkan dengan tingginya wabah penyakit serta tingginya frekuensi wabah penyakit yang terjadi, umumnya adalah DB (demam berdarah), diare, dan penyakit kulit.
- c. Sifat *extended family* pada sebagian besar pemukim di permukiman kumuh mengakibatkan dampak pada pemanfaatan ruang yang sangat semrawut di dalam

rumah. Untuk menampung penambahan jumlah anggota keluarga maka dibuat penambahan-penambahan ruang serta bangunan yang asal jadi, akibatnya adalah kondisi secara fisik semakin terlihat tidak tertata.

- d. Proses penuaan memiliki dampak semakin terlihatnya permukiman kumuh bertambah kusam dalam performanya, hal ini tampak secara visual dari kondisi partisi dinding bangunan yang ada serta atap yang kualitasnya semakin menurun.
- e. Di dalam proses densifikasi di permukiman kumuh akan diikuti oleh *infilling process* dan dampak selanjutnya adalah terjadinya *involusi* permukiman, yakni permintaan lahan akan permukiman yang semakin meningkat sementara ketersediaan lahan yang cenderung tidak bertambah. Meskipun pada proses ini terjadi pada lahan yang legal secara hukum, namun lebih lanjut akan terjadi adanya proses *taudifikasi*, yaitu seluruh proses yang mengarah pada *death point*, yakni titik dimana seluruh ruang sudah terisi oleh permukiman dan tidak ada lagi ruang untuk berbagi fasilitas.
- f. Proses inundasi dalam proses perkembangan permukiman kumuh di daerah penelitian memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap percepatan laju perkembangan permukiman kumuh, dampak dari adanya inundasi memperlihatkan fenomena yang sangat spesial, dampak ini dapat digolongkan ke dalam dampak fisik dan sosial.

2.3 Tempat Pemrosesan Akhir

Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, TPA merupakan tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan TPA Bantargebang Tahun 1997, diuraikan bahwa dampak dari kegiatan operasional TPA Bantargebang adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan kualitas udara akibat meningkatnya kandungan debu yang disebabkan oleh pengangkutan, pembongkaran, dan penumpukan sampah.
- b. Kebisingan yang disebabkan oleh pengangkutan, pembongkaran, dan penumpukan sampah.
- c. Penurunan kualitas air permukaan pada Sungai Ciketing dan Sungai Sumur Batu.
- d. Penurunan kualitas air tanah yang disebabkan oleh *leachete*.
- e. Gangguan pada habitat biota air yang disebabkan oleh pencemaran air oleh *leachete*.
- f. Meningkatnya peluang usaha dan kesempatan kerja dengan adanya aktivitas pembongkaran sampah di TPA, khususnya bagi pemulung.
- g. Penurunan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPA yang disebabkan oleh tumpukan sampah yang menjadi wadah vektor penyakit berkembang biak.
- h. Timbulnya keresahan dan konflik sosial terutama masyarakat pemulung yang disebabkan oleh persaingan dan perebutan lahan kerja antar kelompok pemulung.
- i. Peningkatan kepadatan lalu lintas dan kemacetan akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA.
- j. Peningkatan peluang terjadinya kecelakaan kerja akibat aktivitas pemulung di TPA.
- k. Berkurangnya nilai estetika akibat aktivitas pemulung sampah yang membangun gubuk-gubuk dan penumpukan sampah di lahan permukiman di sepanjang jalan masuk ke TPA.
- l. Timbulnya persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitas TPA Bantargebang akibat tersedianya peluang usaha dan lapangan kerja.

- m. Penuhnya TPA Bantargebang sebelum habis usia operasionalnya akibat jumlah sampah yang masuk melebihi kapasitas.

2.3.1 Penentuan Lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Kota Banjarbaru Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Penelitian ini dilakukan oleh Andy Mizwar dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Standard yang digunakan adalah SNI-19-3241-1994 tentang tata cara pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

TPA merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk tempat pengolahan akhir sampah. Pada TPA sistem sanitary *landfill*, sampah yang diolah akan ditimbun merata secara berlapis, kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah atau material lain pada setiap akhir hari operasi (Tchobanoulous dkk., 1993). Sampah yang ditimbun di TPA akan mengalami reaksi fisik, kimia dan biologi secara bersama-sama serta saling berhubungan melalui proses dekomposisi sampah yang kemudian akan menghasilkan gas landfill (CO_2 , CH_4 , dan H_2S) dan cairan lindi sampah (*leachate*). Leachate menjadi hal yang penting diperhatikan dalam pengoperasian dan pengelolaan TPA karena memiliki sifat mudah bereaksi dengan air, tanah maupun udara sehingga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sedangkan gas *landfill* yang terbentuk akan meningkatkan tekanan internal TPA yang dapat menyebabkan terjadinya *self combustion*, keretakan dan bocornya tanah penutup.

Untuk meminimalkan resiko lingkungan tersebut, maka penentuan lokasi TPA harus memenuhi syarat-syarat kelayakan lingkungan. Menurut Rahman dkk. (2008), penentuan lokasi TPA harus memperhatikan karakteristik lokasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, ekologi dan faktor penggunaan lahan. Rahmatiyah (2002) menjelaskan lebih rinci bahwa proses pemilihan lokasi TPA perlu mempertimbangkan tiga hal penting, yaitu :

- a. Pertimbangan operasional; secara operasional TPA memerlukan lahan yang cukup untuk menampung segala jenis sampah dan zonasi ketersediaan lahan harus memperhatikan rencana regional serta aspek aksesibilitas (keterjangkauan)
- b. Pertimbangan ekologi; yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan lokasi TPA setelah tidak dipergunakan lagi
- c. Pertimbangan topografi, geologi dan hidrologi; lebih mengarah pada aspek persyaratan fisik lahan, misalnya berdasarkan relief atau topografi dapat dipilih lokasi-lokasi yang bebas dari bahaya banjir ataupun erosi dan berdasarkan aspek hidrologi, lokasi TPA harus berada di wilayah dengan muka air tanah yang dalam, sehingga lindi sampah tidak mencemari air tanah.

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Kriteria Kelayakan Regional

- Kemiringan lereng
- Kondisi geologi
- Jarak terhadap badan air
- Jarak terhadap permukiman
- Kawasan budidaya pertanian
- Kawasan lindung
- Jarak terhadap lapangan terbang
- Jarak terhadap perbatasan daerah

B. Kriteria Kelayakan Penyisih

- Luas lahan
- Kebisingan dan bau
- Permeabilitas tanah
- Kedalaman muka air tanah
- Intensitas hujan
- Bahaya banjir
- Transportasi sampah

Tabel 2. 2 Kompilasi Pustaka tentang Tempat Pemrosesan Akhir

No.	Sumber	Kajian	Yang Diperhatikan
1	Mizwar (2012)	<p>TPA merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk tempat pengolahan akhir sampah. Pada TPA sistem sanitary landfill, sampah yang diolah akan ditimbun merata secara berlapis, kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah atau material lain pada setiap akhir hari operasi (Tchobanolous dkk., 1993). Sampah yang ditimbun di TPA akan mengalami reaksi fisik, kimia dan biologi secara bersama-sama serta saling berhubungan melalui proses dekomposisi sampah yang kemudian akan menghasilkan gas landfill (CO₂, CH₄, dan H₂S) dan cairan lindi sampah (leachate). Leachate menjadi hal yang penting diperhatikan dalam pengoperasian dan pengelolaan TPA karena memiliki sifat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria Kelayakan Regional <ol style="list-style-type: none"> a. Kemiringan lereng b. Kondisi geologi c. Jarak terhadap badan air d. Jarak terhadap permukiman e. Kawasan budidaya pertanian f. Kawasan lindung g. Jarak terhadap lapangan terbang h. Jarak terhadap perbatasan daerah 2. Kriteria Kelayakan Penyisih <ol style="list-style-type: none"> a. Luas lahan b. Kebisingan c. bau d. Permeabilitas tanah e. Kedalaman muka air tanah f. Intensitas hujan g. Bahaya banjir h. Transportasi sampah

		<p>mudah bereaksi dengan air, tanah maupun udara sehingga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sedangkan gas landfill yang terbentuk akan meningkatkan tekanan internal TPA yang dapat menyebabkan terjadinya self combustion, keretakan dan bocornya tanah penutup.</p>	
--	--	--	--

Sumber : Penulis, 2016

2.4 Penelitian Terdahulu

2.4.1 Penataan Saluran Drainase Kepanjen Kabupaten Malang

Kota Kepanjen memerlukan penanganan khusus untuk mengendalikan banjir yang terjadi di daerahnya. Data tata guna lahan selama empat tahun terakhir (1998-2010) menunjukkan bahwa debit air semakin meningkat dari 41,812 m³/detik - 72,363 m³/detik.

Penyelesaian yang dilakukan berdasarkan isu tersebut adalah dengan melakukan normalisasi saluran, membuat saluran baru, pengurangan beban, dan perencanaan saluran ganda (Cahyono, Masrevaniah, & Priyantoro, 2013).

2.4.2 Mitigasi Kebakaran Berbasis Masyarakat di Jabodetabek

Organisasi barisan sukarelawan kebakaran telah terbentuk di Jabodetabek, akan tetapi terdapat beberapa isu seperti tidak terdapat honorarium, status pekerjaan, dan anggota yang

merupakan penduduk tidak tetap. Sehingga menyebabkan sulitnya mendapatkan anggota baru jika ada anggota yang berhenti.

Berdasarkan isu tersebut, maka alternatif model berbasis masyarakat terbaik adalah memberdayakan barisan sukarelawan kebakaran karena model tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dukungan masyarakat yang kuat terhadap Barisan Sukarelawan Kebakaran menentukan kelancaran pelaksanaan di lapangan (Fatmah, 2009).

2.4.3 Pengelolaan Persampahan dalam Mendukung Perolehan Adipura di Kota Semarang

Dalam rangka memperoleh penghargaan ADIPURA, Kota Semarang menjadikan pengelolaan sampah sebagai fokus utama perbaikannya. Terdapat empat aspek yang diterapkan di Kota Semarang, yaitu tingkat penerimaan (acceptability), pemahaman (understanding), keterlibatan (involvement), dan tindak lanjut (action) (Pandie, 2013).

Beberapa aspek yang mempengaruhi Kota Semarang dalam mendapatkan penghargaan ADIPURA adalah sebagai berikut :

- a. Kelembagaan
 - Pembentukan Pasgad (Pasukan Sapu Jagad) yang segera bertindak jika ada laporan atau keluhan dari warga. Selain menyapu jalan Pasgad juga bertugas melaporkan bila terdapat tempat sampah yang rusak sehingga bisa segera diganti
- b. Teknis operasional
 - Meningkatkan/menambah sarana prasana pengelolaan sampah baik itu TPS, pengangkutan sampah, dan pengolah sampah
- c. Peran serta masyarakat
 - Peningkatan lomba antar sekolah terkait pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya pengelolaan sampah

2.4.4 Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya

Permasalahan yang terjadi di daerah kumuh Tanah Kalikedinding adalah masih terdapatnya rumah kurang layak huni dengan dinding yang rusak dan tanpa jendela, serta atap yang hampir roboh. Selain itu, kurangnya fasilitas jalan dan jembatan. Sistem drainase di kelurahan ini kurang baik sehingga pembuangan limbah dan air hujan tidak maksimal ditampung dan menyebabkan banjir. Masalah lainnya adalah kurangnya modal usaha bagi warga serta kurang berpihaknya pemberi pelayanan pada masyarakat miskin di daerah kumuh.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan program rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) di Kelurahan Tanah Kalikedinding. Bentuk program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan kelembagaan UMKM
 - Pembentukan / penguatan
- b. Pelatihan keterampilan usaha
 - Usaha kerajinan tangan
 - Usaha tata boga
- c. Perbaikan rumah
 - Perbaikan atap
 - Perbaikan dinding
 - Perbaikan lantai
 - Komponen lainnya

2.4.5 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pangkalpinang

Tingkat kekumuhan di Kota Pangkalpinang disebabkan karena faktor ekonomi seperti ketidakmampuan masyarakat menciptakan lingkungan permukiman yang sehat karena keterbatasan ekonomi dan kekurangpahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat. Di samping itu, juga disebabkan oleh pengaruh faktor alamiah seperti pasang surut air

laut, sehingga muncul daerah-daerah genangan yang semakin lama cenderung berkembang menjadi kawasan kumuh.

Beberapa program-program sebagai upaya pengendalian lingkungan kumuh adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan
- b. Pembinaan masyarakat sadar Lingkungan
- c. Pembangunan Infrastruktur Publik
- d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- e. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
- f. Pengelolaan Kawasan Bantaran/ Sempadan (Sungai, Pantai, Danau, KA, SUTET, dll)
- g. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

2.4.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Propinsi Bali

Kualitas lingkungan permukiman di Propinsi Bali diwarnai kearifan lokal masyarakat setempat yang serbaneka. Isu utama yang menyebabkan perubahannya adalah faktor perkembangan penduduk baik alamiah maupun migrasi ke desa atau kota.

Walaupun usaha-usaha peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh telah banyak dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, masih banyak lingkungan permukiman yang harus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan pembiayaan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, masyarakat yang memiliki adat istiadat yang kuat dan didukung komitmen bersama akan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Tingkat kemandirian masyarakat ini sangat tergantung kondisi setempat sebagai latar belakang permasalahannya.

Menyadari keterbatasan kemampuan berbagai sektor yang terlibat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dan adanya potensi masyarakat yang besar, maka pendekatan

perberdayaan masyarakat merupakan pilihan telaah yang cukup menarik.

2.4.7 Penyediaan Air Bersih pada Kawasan Rawan Air Bersih di Pesisir Utara Lamongan

Permukiman di pesisir utara Lamongan memiliki karakteristik jumlah penduduk sedang, kondisi rumah kurang baik dan kumuh, kepadatan bangunan tinggi, prasarana dan sarana terbatas. Sebagian wilayah mengalami banjir saat musim hujan, ditambah kondisi topografi di wilayah ini yang tidak menguntungkan untuk penyediaan air bersih. Penyediaan HIPPAM menjadi solusi bagi wilayah yang belum terlayani jaringan PDAM (Noviyanti & Setiawan, 2014).

Adapun arahan penyediaan air bersih pada wilayah ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan investasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi ataupun bantuan luar negeri untuk pengembangan HIPPAM.
- b. Membuat sumur bor air bersih, melalui pengembangan HIPPAM yang memiliki kontribusi dalam penyediaan air bersih selain PDAM dan menempatkan sumber air tanah yang dikembangkan melalui HIPPAM dengan tower air yang dengan permukiman penduduk serta pada wilayah yang memiliki potensi air sedang (5lt/dt).
- c. Mengembangkan HIPPAM dengan sumber embung dan waduk penangkapan air hujan (PAH) untuk desa/kelurahan yang memiliki sumber air tanah langka, serta memanfaatkan simpanan air embung dan waduk secara efektif dan selektif untuk mengatasi kekeringan air bersih di musim kemarau.

2.5 Sintesa Pustaka

Tabel 2. 3 Sintesa Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka	Yang Diperhatikan	Terpilih	Tidak Terpilih	Alasan
Penyebab	Status	v		Berhubungan

Permukiman Kumuh	kependudukan			dengan judul penelitian
	Kemiskinan		v	Dapat dijelaskan dengan tingkat pendapatan
	Kebudayaan		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	Aktivitas politik		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	a. Faktor ekonomi			
	• Kemiskinan		v	Dapat dijelaskan dengan tingkat pendapatan
	• Krisis ekonomi		v	Dapat dijelaskan dengan tingkat pendapatan
	• Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	b. Faktor bencana			
	• Banjir	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	• Gempa		v	Tidak pernah terjadi gempa di wilayah penelitian

	• Gunung meletus		v	Tidak pernah terjadi gunung meletus di wilayah penelitian
	• Longsor	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	• Bencana akibat perang dan pertikaian		v	Tidak pernah terjadi bencana ini di wilayah penelitian
	Pertumbuhan kota yang tinggi		v	Dapat dijelaskan dengan status kependudukan dan laju pertumbuhan penduduk
	Tingkat pendapatan	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Kepadatan penduduk tinggi	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Pelayanan air bersih	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Sanitasi lingkungan	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Fasilitas	v		Berhubungan

	persampahan			dengan judul penelitian
	Kondisi saluran air hujan / drainase	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Kondisi jalan	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Keterbatasan ruang terbuka	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Jenis pekerjaan informal	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Tingkat pendidikan	v		Berhubungan dengan judul penelitian
	Keterbatasan lahan permukiman	v		Berhubungan dengan judul penelitian

Sumber : Penulis, 2016

Tabel 2. 4 Tinjauan Pustaka Tempat Pemrosesan Akhir

Tinjauan Pustaka	Yang Diperhatikan	Terpilih	Tidak Terpilih	Alasan
Tempat Pemrosesan Akhir	a. Kriteria Kelayakan Regional			
	Kemiringan lereng		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	Kondisi geologi		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	Jarak terhadap badan air	v		Terdapat badan air di wilayah penelitian
	Jarak terhadap permukiman	v		Terdapat permukiman penduduk yang tersebar di sekitar TPA
	Kawasan budidaya pertanian		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	Kawasan lindung	v		Kawasan lindung dibutuhkan sebagai daerah penyangga
	Jarak terhadap lapangan terbang		v	Tidak terdapat lapangan terbang di wilayah penelitian
	Jarak terhadap perbatasan		v	Tidak berhubungan dengan judul

	daerah			penelitian
	Kriteria Kelayakan Penyisih			
	Luas lahan		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	Kebisingan		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	Bau	v		Wilayah penelitian terdampak bau dari TPA
	Permeabilitas tanah		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	Kedalaman muka air tanah		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	Intensitas hujan		v	Tidak berhubungan dengan judul penelitian
	Bahaya banjir		v	Tidak terdapat bahaya banjir di TPA ini
	Transportasi sampah	v		Wilayah penelitian dilalui jalur angkut sampah

Sumber : Penulis, 2016

Tabel 2. 5 Sintesa Pustaka

Aspek	Faktor	Variabel
Penyebab Permukiman Kumuh	Peran pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak
	Ekonomi	Tingkat pendapatan
		Jenis pekerjaan informal
	Kependudukan	Laju pertumbuhan
		Status kependudukan
		Kepadatan penduduk
		Tingkat pendidikan
	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih
		Sanitasi lingkungan
		Fasilitas persampahan
		Saluran air hujan / drainase
		Jaringan jalan
		Ruang terbuka
		Keterbatasan lahan permukiman
	Bahaya	Bahaya banjir
		Bahaya longsor
Tempat Pemrosesan Akhir	Standard pemanfaatan ruang sekitar TPA	Jarak terhadap permukiman
		Jarak terhadap badan air
		Kawasan lindung

		Bau
		Transportasi sampah

Sumber : Penulis, 2016

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan paradigma rasionalistik. Paradigma rasionalistik merupakan konstruksi pemahaman yang mengharuskan adanya pemikiran rasionalisme yang didasarkan pada fakta empirik sensual, logik, dan etik dengan menggunakan argumentasi dan pemaknaan atas empiri dengan memakai metode kualitatif (Muhadjir, 2002).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dilakukan akan menggunakan metode deskriptif, eksploratif, dan preskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Whitney, 1960). Metode eksploratif bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai sebab-akibat ataupun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2006). Sedangkan penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam memecahkan masalah tertentu (Prasetyo & Lina, 2005). Berikut adalah penggunaan masing-masing pendekatan dan metode dalam penelitian ini :

Tabel 3. 1 Penggunaan Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan	Metode	Tujuan
(1)	(2)	(3)
Kualitatif	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan untuk membuat gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi eksisting • Digunakan saat melakukan identifikasi penyebab permukiman kumuh
	Eksploratif	<ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai hubungan sebab-akibat ataupun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu • Digunakan saat mengeksplorasi pendapat dari para <i>stakeholders</i> terkait variabel penyebab kekumuhan • Digunakan saat mengeksplorasi pendapat dari para <i>stakeholders</i> terkait prioritas peningkatan kualitasnya
	Preskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan untuk mendapatkan saran-saran dalam memecahkan masalah tertentu • Digunakan untuk merumuskan arahan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh

Sumber : Hasil Analisis, 2016

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1998). Variabel-variabel tersebut akan memberikan gambaran kondisi dan permasalahan bagi peneliti. Dalam penelitian ini, variabel didapatkan dari indikator penelitian yang disitasi pada tahap tinjauan pustaka. Organisasi faktor dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Variabel Penelitian

No	Sasaran	Faktor	Variabel	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menganalisis variabel penyebab kekumuhan	Peran pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	Program-program perbaikan permukiman yang dilakukan pemerintah dan realisasinya
		Ekonomi	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
			Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga
		Kependudukan	Laju pertumbuhan	Jumlah pertambahan penduduk dari tahun ke tahun
			Status kependudukan	Asal pendatang dan status kepemilikan tempat tinggal.
			Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk per luas wilayah
			Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
		Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
			Sanitasi lingkungan	Lokasi MCK umum, jumlah

				rumah tanpa WC, ketersediaan <i>septic tank</i>
			Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan sistem pengangkutan sampah
			Saluran air hujan / drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
			Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan jalan
			Ruang terbuka	Jenis, ketersediaan, dan lokasi persebaran ruang terbuka
			Keterbatasan lahan permukiman	Jumlah hunian dibandingkan dengan luasan wilayah
		Bahaya	Bahaya banjir	Frekuensi kejadian banjir, lama genangan, penyebab, dan tinggi genangan
			Bahaya longsor	Frekuensi kejadian longsor dan dampak yang ditimbulkan
		Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
			Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter

			Kawasan lindung	Letak TPA di dalam atau di luar kawasan lindung
			Bau	Jangkauan dampak bau.
			Transportasi sampah	Rute dan jarak angkut sampah dari sumber timbunan sampah ke TPA dalam meter
2	Menganalisis variabel prioritas peningkatan kualitas lingkungan	Hasil dari sasaran 2		
3	Menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan	Hasil dari sasaran 2 (fakta empirik), kebijakan, dan <i>best practice</i> .		

Sumber : Penulis, 2016

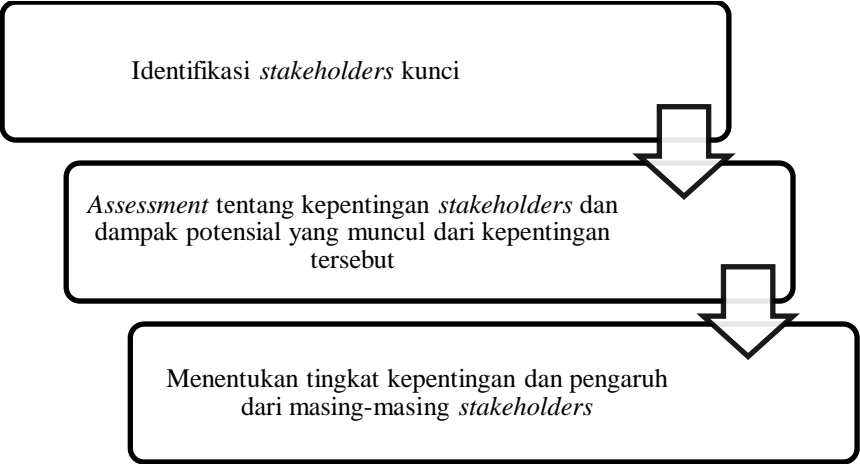
3.4 Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi tersebut dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu-individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sehingga sampel tersebut harus dapat menggambarkan keseluruhan populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling*. Adapun metode *non-probability sampling* yang digunakan adalah *stakeholders analysis*.

Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu capaian tujuan tertentu. Sementara itu, Salam and Noguchi (2006) mendefinisikan *stakeholders* sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan.

Analisis *stakeholders* ini digunakan dalam menentukan sampel untuk menjawab sasaran 1 dan sasaran 2, yaitu mengidentifikasi variabel penyebab kekumuhan dan menentukan prioritas variabel penyebab kumuh untuk peningkatan kualitas lingkungan. Populasi dalam penelitian ini adalah dari pihak pemerintah (*governance*), akademisi, dan masyarakat (*civil society*). Tahapan yang harus dilakukan dalam analisis *stakeholders* adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Tahapan Analisis Stakeholders

Sumber : Penulis, 2016

Proses penentuan stakeholders berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam **Lampiran A**. Sementara itu, hasil akhir analisis *stakeholders* dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Tabel 3. 3 Kepentingan *Stakeholders* dalam Penelitian

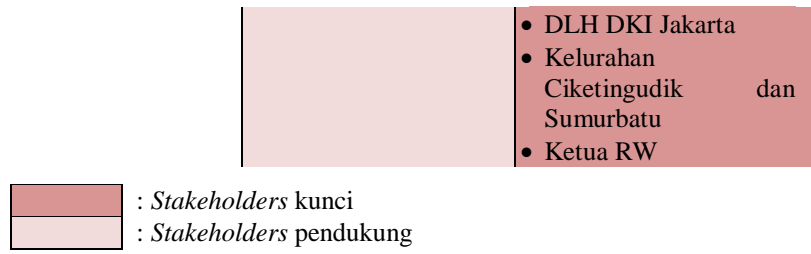
No	Komponen	Stakeholders	Kepentingan	Keperluan
1	Pemerintah	Bappeda Kota Bekasi	Memiliki kepentingan untuk menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">• Menganalisis variabel penyebab kekumuhan• Menganalisis prioritas variabel

		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kepentingan untuk melaksanakan perencanaan bina marga, tata air, serta pengawasan dan pengendalian • Memiliki kepentingan menjadi <i>leader</i> untuk melaksanakan penataan ruang di wilayah Kota Bekasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis variabel penyebab kekumuhan • Menganalisis prioritas variabel
		Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi	Memiliki kepentingan untuk melaksanakan urusan bidang perencanaan teknis, bidang bangunan gedung, bidang permukiman dan serta bidang pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis variabel penyebab kekumuhan • Menganalisis prioritas variabel
		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Memiliki kepentingan untuk mengelola TPST Bantargebang yang terletak di Kelurahan Ciketingudik	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis variabel penyebab kekumuhan • Menganalisis prioritas variabel
		Kelurahan	Mempertimbangkan	• Menganalisis

		Ciketingudik dan Sumurbatu	kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum permukiman di wilayah Kelurahan Bantargebang	variabel penyebab kekumuhan
2	Akademisi	Dosen ITS	Memiliki kepentingan dalam memberikan sudut pandang keilmuan tentang perumahan dan permukiman terhadap permasalahan permukiman kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis variabel penyebab kekumuhan • Menganalisis prioritas variabel
3	Masyarakat	Ketua RW	Mewakili kelompok masyarakat yang menghuni dan mengetahui kondisi permukiman. Kelompok ini berpengaruh sebagai <i>decision maker</i> dalam pemilihan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis variabel penyebab kekumuhan

Sumber : Hasil Analisis, 2016

	Pengaruh Rendah	Pengaruh Tinggi
Kepentingan Rendah		-
Kepentingan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Akademisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kota Bekasi • Dinas PUPR • Dinas Pembangunan dan Permukiman



Gambar 3. 2 Diagram Tingkat Kepentingan Stakeholders
Sumber : Hasil Analisis, 2016

Tabel 3. 4 Kriteria Responden

No	Pihak	Kriteria Responden	Kepentingan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bappeda Kota Bekasi	a. Pernah tergabung dalam tim penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh. b. Memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku terkait penanganan permukiman kumuh. c. Mengetahui dan memahami wilayah permukiman kumuh Kel. Ciketingudik dan Kel. Sumurbatu.	Responden sasaran 1 dan 2
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pernah tergabung dalam tim penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh. b. Memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku terkait penanganan permukiman kumuh. c. Mengetahui dan memahami wilayah	Responden sasaran 1 dan 2

		permukiman kumuh Kel. Ciketingudik dan Kel. Sumurbatu.	
3	Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi	a. Pernah tergabung dalam tim penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh. b. Memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku terkait penanganan permukiman kumuh. c. Mengetahui dan memahami wilayah permukiman kumuh Kel. Ciketingudik dan Kel. Sumurbatu.	Responden sasaran 1 dan 2
4	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	a. Memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku terkait penempatan dan pengelolaan TPST. b. Mengetahui potensi dan masalah TPST.	Responden sasaran 1 dan 2
5	Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu	a. Memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku terkait penanganan permukiman kumuh. b. Mengetahui dan memahami wilayah permukiman kumuh Kel. Ciketingudik dan Kel. Sumurbatu.	Responden sasaran 1
6	Dosen ITS	a. Memiliki minat dan ketertarikan tentang isu permukiman, khususnya permukiman kumuh.	Responden sasaran 1 dan 2
7	Ketua RW	a. Warga usia 25 – 60	Responden

		tahun. b. Merupakan ketua RW setempat.	sasaran 1
--	--	--	-----------

Sumber : Penulis, 2017

3.5 Metode Penelitian

3.5.1 Metode Pengumpulan Data

3.5.1.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung, penyebaran kuisioner, dan wawancara. Berikut adalah keterangannya :

A. Observasi

Menurut Kartono (dalam Basuki, 2006) observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan cara pengamatan serta pencatatan. Jenis teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan dan observasi sistematis. Observasi non-partisipan berarti peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di kawasan permukiman kumuh berat. Sedangkan observasi sistematis berarti peneliti telah menyusun kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorinya sehingga dapat memudahkan peneliti dalam proses pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab permukiman kumuh dengan membuat daftar hal-hal yang akan diidentifikasi/diobservasi.

B. Wawancara

Menurut Kartono (dalam Basuki, 2006) *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Sementara menurut Moleong (1990), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang akan mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk melengkapi data sekunder yang telah didapatkan sebelumnya. Selain itu juga dilakukan untuk mengeksplorasi data-data yang tidak bisa didapatkan dengan observasi, seperti data-data kependudukan dan ekonomi, serta digunakan untuk melakukan metode analisis Delphi dan AHP.

Tabel 3. 5 Metode Pengumpulan Data Primer

No	Data	Sumber Informasi	Metode Pengumpulan Data	Kuisisioner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Data identifikasi penyebab permukiman kumuh	Masyarakat Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu	<ul style="list-style-type: none"> – Observasi – Wawancara 	Lampiran 2
2	Variabel penyebab permukiman kumuh	<i>Stakeholders</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Wawancara – Penyebaran kuisisioner 	Lampiran 3
3	Prioritas variabel penyebab kekumuhan untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh	<i>Stakeholders</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Wawancara – Penyebaran kuisisioner 	Lampiran 4

Sumber : Hasil Analisis, 2016

3.5.1.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan survey literatur dan survey instansional yang terdiri dari beberapa instansi, yaitu Bappeda Kota Bekasi, Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Ciketingudik, dan Kelurahan Sumurbatu. Data sekunder dibutuhkan untuk mendukung proses pengkajian yang menyesuaikan dengan data yang ada. Berikut adalah data sekunder yang dibutuhkan :

Tabel 3. 6 Desain Survey

Data	Jenis Data	Sumber Data	Instansi Penyedia Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekunder	a. Data sarana, prasarana, dan utilitas umum b. Data kondisi permukiman c. Data kondisi sosial dan ekonomi d. Dokumen rencana tata ruang e. Dokumen tentang TPST Bantargebang	a. Monografi Kecamatan b. Monografi Kelurahan c. Kecamatan Dalam Angka d. RTRW Kota Bekasi e. RDTRK Mustikajaya f. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan TPA Bantargebang	a. Bappeda Kota Bekasi b. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi c. Dinas Bangunan dan Permukiman d. BPLH Kota Bekasi e. DLH DKI Jakarta f. Kecamatan Bantargebang g. Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu

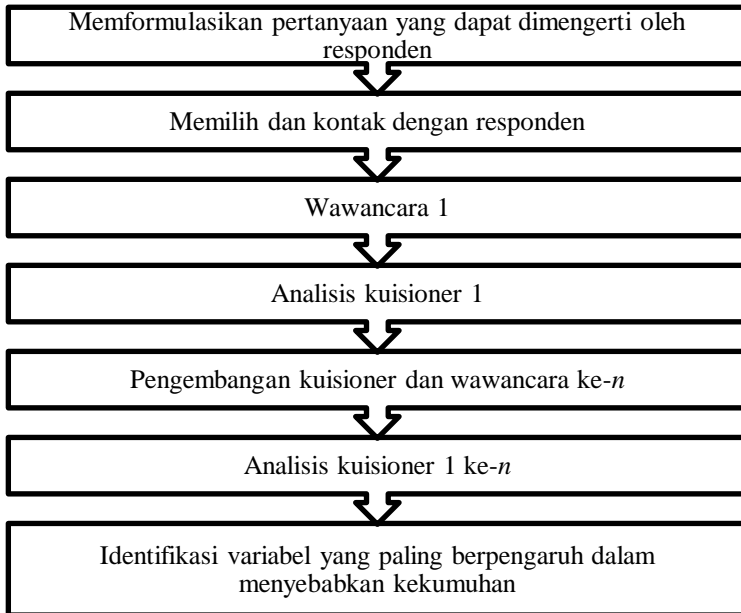
Sumber : Hasil Analisis, 2016

3.5.2 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan berdasarkan tujuan dan sasarannya. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis variabel penyebab kekumuhan

Metode analisis yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah Metode Delphi. Analisis ini berguna sebagai penjaringan opini kelompok yang partisipannya terdiri dari para pakar yang kompeten di bidangnya (Gupta & Clarke, 1996). Ciri dari Metode Delphi adalah semua peserta diperlakukan sebagai pihak yang tidak dikenal. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi pengaruh antar partisipan (Schroeder, 2000). Pada dasarnya, responden yang akan berpartisipasi dalam sasaran ini telah diidentifikasi sebelumnya dengan menggunakan analisis *stakeholders* yang dapat dilihat pada **Lampiran 1**. *Stakeholders* kunci yang akan dijadikan responden dalam sasaran ini terdiri atas pemerintah (*governance*) dan masyarakat. Adapun variabel yang digunakan dalam sasaran ini dapat dilihat pada **Tabel III. 2** dan kuisisioner dapat dilihat pada **Lampiran 3**. Prosedur Metode Delphi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 3 Prosedur Metode Delphi

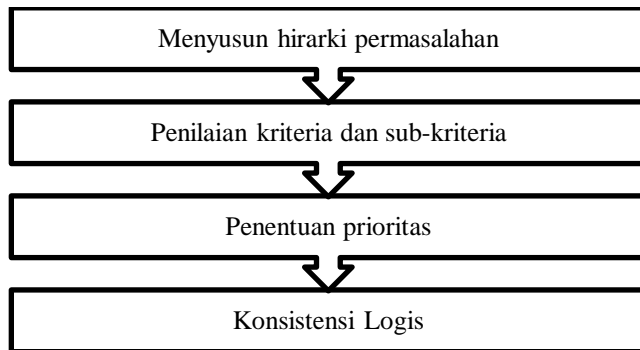
Sumber : (Herdhiansyah, Sutiarso, Purwadi, & Taryono, 2013)

2. Menganalisis prioritas variabel penyebab kekumuhan untuk peningkatan kualitas lingkungan

Metode analisis yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP (*Analytical Hierarchy Process*) merupakan suatu metode dalam sistem pengambilan keputusan yang menggunakan beberapa variabel dengan proses analisis bertingkat. Analisis dilakukan dengan memberi nilai prioritas dari tiap-tiap variabel, kemudian melakukan perbandingan berpasangan dari variabel-variabel tersebut dan alternatif-alternatif yang ada (Saaty & Forman, 1993).

AHP memiliki prinsip untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur serta

menatanya dalam hirarki-hirarki. Tingkat kepentingan tiap-tiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dibandingkan dengan variabel lainnya. Selanjutnya dilakukan sintesa untuk menentukan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin, 2004). Adapun variabel yang digunakan dalam sasaran ini merupakan hasil dari sasaran 1.

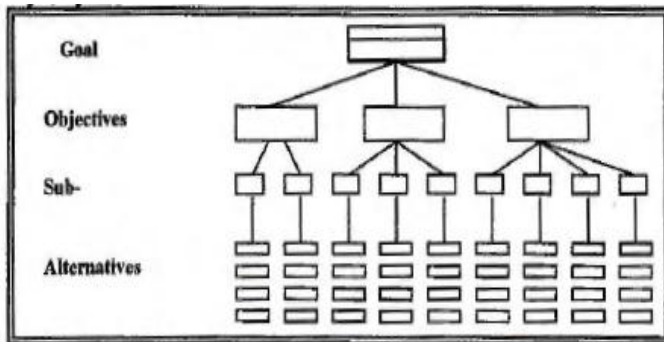


Gambar 3. 4 Langkah dalam Metode AHP

Sumber : (Suryadi & Ramadhani, 2000)

a. Menyusun hirarki permasalahan

Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif. Selanjutnya disusun menjadi struktur hirarki seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 5 Struktur Hirarki AHP

Sumber : (Saaty & Forman, 1993)

b. Penilaian kriteria dan alternatif

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1988), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dalam skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 7 Skala Preferensi dari Perbandingan Dua Kriteria

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen mempunyai kontribusi yang sama terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dengan elemen lain	Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibanding elemen lain
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian saling kuat menyokong satu elemen dibanding elemen yang lain

7	Satu elemen jelas lebih penting mutlak dari elemen lain	Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terhadap praktek
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lain	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memenuhi tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan

Sumber : (Saaty & Forman, 1993)

c. Penentuan prioritas

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik. Dalam penelitian ini akan digunakan *software Expert Choice* dalam melakukan tahap ini.

d. Konsistensi Logis

Perhitungan hasil bobot prioritas setiap kriteria pada tiap matriks ditentukan sesuai dengan besarnya nilai *eigenvalue* (maksimal). Penentuan tingkat konsistensi terhadap penilaian persepsi menggunakan perhitungan Indeks Konsistensi (IK) atau Consistency Index Ratio (CI). Rasio konsistensi (*Consistency Ratio*-CR) harus bernilai kurang dari atau sama dengan 10% ($CR \leq 0,1$) sehingga dapat dianggap bahwa konsistensi responden

dalam memberikan persepsi relatif bersifat valid. Namun sebaliknya, jika nilai rasio konsistensinya lebih dari 10% ($CR \geq 0,1$), maka perlu dilakukan pertimbangan ulang dalam level hirarki atau pengulangan terhadap kuisioner.

3. Menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sumber informasi dalam analisis ini terdiri dari gambaran umum atau fakta empirik dari variabel penyebab kekumuhan (hasil sasaran 1) dan kebijakan terkait sehingga menghasilkan arahan.

Tabel 3. 8 Teknik Analisis Data

No	Sasaran	Input Data	Alat Analisis	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengidentifikasi variabel penyebab kekumuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat <i>stakeholders</i> 	Analisis Delphi	Variabel penyebab kekumuhan
2	Menganalisis prioritas variabel penyebab kekumuhan untuk peningkatan kualitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil sasaran 2 	AHP	Variabel prioritas peningkatan kualitas lingkungan
3	Menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil sasaran 1 • Gambaran umum tiap-tiap variabel • Kebijakan 	Deskriptif kualitatif	Arahan peningkatan kualitas lingkungan

Sumber : Hasil Analisis, 2016

3.6 Tahapan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap tinjauan pustaka, tahap pengumpulan data, tahap analisa, tahap penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Adapun keterangan tiap tahapnya adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap pertama, pendahuluan terdiri dari 5 bagian utama, yaitu penyusunan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang didasari oleh hipotesa awal, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan manfaat penelitian.

b. Tahap Tinjauan Pustaka

Merupakan tahap kedua dalam penelitian. Tahap ini berisikan informasi terkait permasalahan dan objek penelitian berupa teori dan konsep yang mendukung penelitian. Sumber dari teori dan konsep yang digunakan bersumber dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, televisi, media online, dan lain sebagainya.

c. Tahap Pengumpulan Data

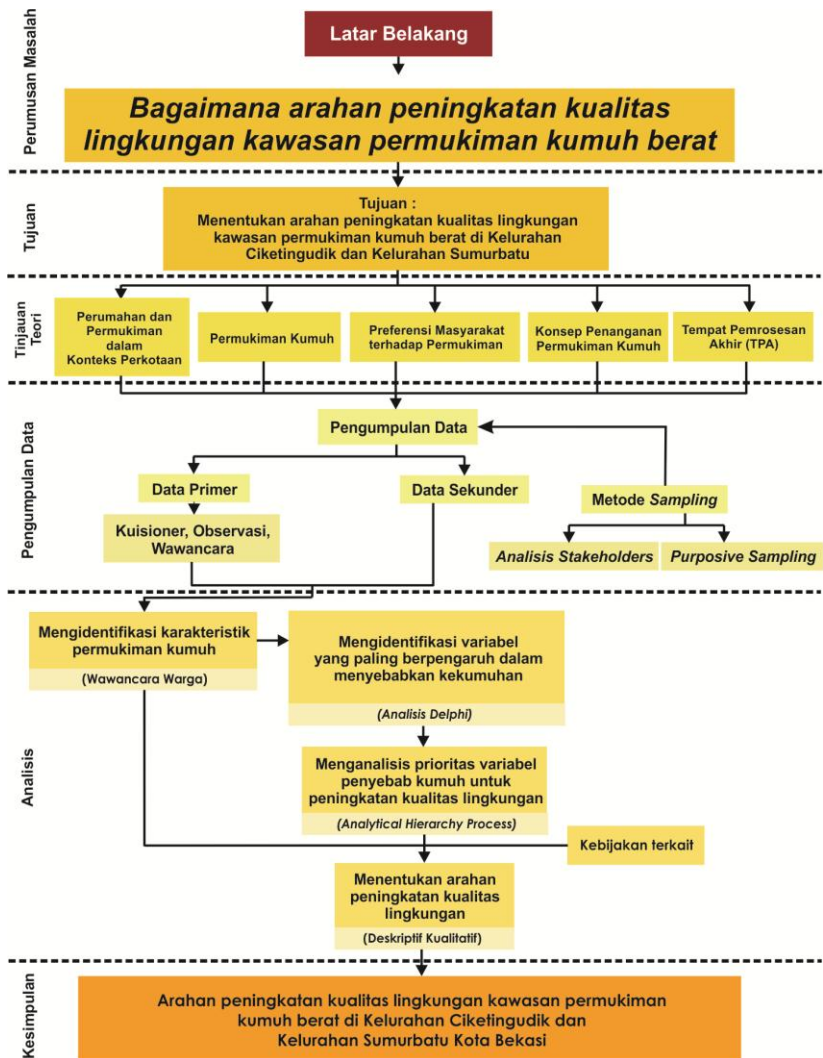
Merupakan tahap ketiga dalam penelitian ini. Pada tahap pengumpulan data, data yang didapatkan harus sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penyebaran kuisioner.

d. Tahap Analisis

Merupakan tahap keempat dalam penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Analisis yang dilakukan adalah dengan meninjau karakteristik permukiman kumuh, variabel penyebab kekumuhan, prioritas variabel peningkatan kualitas, dan akhirnya menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Bantargebang.

e. Tahap Perumusan Kesimpulan dan Rekomendasi

Merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya pada tahap pertama. Setelah itu, rekomendasi dapat berangkat dari kesimpulan yang dihasilkan.



Gambar 3. 6 Tahapan Penelitian

Sumber : Penulis, 2016

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Peran pemerintah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2016, dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi bertanggung jawab menyelenggarakan P3BK yang terdiri dari pembangunan/normalisasi saluran air, tempat pembuangan sampah sementara (TPSS), sekretariat bersama BKM/LKM, LPM, PKK, Pos Keamanan Lingkungan dan prasarana dan sarana penunjang Posyandu dan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kota Bekasi berawal dari adanya program PNPM Perkotaan yang kini telah menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program RUTILAHU merupakan program perbaikan rumah tinggal dengan kondisi fisik dan prasarana bangunan yang tidak layak huni sehingga menjadi rumah tinggal yang layak huni, sehat, dan memiliki prasarana dasar yang layak. Di samping itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan mendorong kepedulian warga masyarakat terhadap warga yang kurang mampu dan bersama-sama dengan pemerintah untuk memerangi dan mengurangi kemiskinan. Maksimal anggaran peningkatan RUTILAHU adalah Rp. 20 juta per unit sesuai kondisi yang harus diperbaiki dengan anggaran yang berasal dari APBN melalui bantuan Kementerian PUPERA, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kota Bekasi, dan swadaya masyarakat. Program ini ditargetkan bagi rumah-rumah dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Ruang sempit, kurang dari 9 m²/orang
- b. Lantai tanah, bambu, kayu murahan
- c. Atap rumbia, alang-alang, genteng tanah murahan

- d. Dinding tidak permanen
- e. Tidak memiliki sambungan listrik
- f. Tidak memiliki prasarana sanitasi MCK
- g. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air yang tidak terlindung, sungai atau hujan.

Adapun realisasi Program RUTILAHU di wilayah penelitian pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Daftar Penerima Bantuan Program RUTILAHU Kota Bekasi Tahun 2016

Kelurahan	RW	RT	Keterangan
Ciketingudik	01	02	1 Rumah
		03	2 Rumah
	04	01	8 Rumah
		02	
		03	
	05	01	1 Rumah
		02	1 Rumah
		03	1 Rumah
Sumurbatu	01		
	02	01	1 Rumah
	03	02	1 Rumah
	04	-	-
	05	-	-

Sumber : Wawancara Ketua RW, 2017

Akan tetapi, menurut warga, program RUTILAHU ini belum sepenuhnya dapat menjadi solusi untuk membangun rumah yang layak huni karena jumlah bantuan yang selama ini diterima warga hanya berkisar antara Rp. 12 – 15 juta dari jumlah maksimal yang ditentukan, yaitu Rp. 20 juta. Sementara itu, status penerima bantuan RUTILAHU yang merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menyebabkan sulitnya menutupi kekurangan dana pembangunan yang diperlukan.



Gambar 4. 1 Rumah Tidak Layak Huni

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016

4.1.2 Ekonomi

4.1.2.1 Tingkat pendapatan

Jenis pekerjaan warga setempat sebagai buruh dan pekerja serabutan tersebut menyebabkan warga hidup dalam kekurangan, yaitu dengan penghasilan harian berkisar antara Rp. 40.000 – Rp. 70.000 dan penghasilan bulanan sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.900.000. Selain itu, umumnya hanya kepala keluarga yang bekerja sehingga tidak ada pemasukan lainnya.

4.1.2.2 Jenis pekerjaan informal

Mayoritas warga di wilayah penelitian bekerja sebagai buruh dan pekerja serabutan. Para buruh tersebut umumnya bekerja di pabrik-pabrik pengolahan sekitar dan sebagian kecil dipekerjakan di TPST Bantargebang menjadi pekerja kebersihan. Sementara itu, pekerja serabutan bekerja sebagai kuli bangunan, pengolah limbah, dan lain sebagainya. Angka pengangguran di wilayah penelitian cenderung tinggi, yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak dapat terserap oleh lapangan

pekerjaan yang ada. Angka pengangguran tertinggi terdapat di RW 05 Kelurahan Sumurbatu, yaitu mencapai 50%.

4.1.3 Kependudukan

4.1.3.1 Laju pertumbuhan

Metode yang digunakan dalam menentukan laju pertumbuhan dan proyeksi penduduk adalah metode aritmatika dan eksponensial seperti keterangan di bawah ini.

Metode Eksponensial (Laju pertumbuhan)

$$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_0} \right)$$

Keterangan :

P_0 = Jumlah penduduk tahun awal

P_t = Jumlah penduduk tahun akhir

t = Selisih antara tahun akhir dan tahun awal

Metode Aritmatika (Proyeksi penduduk tahun 2020)

$$P_n = P_0 \times (1 + (r \cdot n))$$

Keterangan :

P_n = Jumlah penduduk setelah n tahun ke depan

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun awal

r = Angka pertumbuhan penduduk

n = Jangka waktu dalam tahun

Adapun rincian jumlah penduduk tiap-tiap RW, laju pertumbuhan, serta proyeksi penduduk tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 4. 2.**

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk

Kelurahan	RW	Jumlah Penduduk					
		2013	2014	2015	2016	Laju Pertumbuhan (<i>r</i>)	2020
Ciketingudik	01	2.799	2.838	2.756	2.735	-0,007	2.629
	04	1.592	1.557	1.566	1.553	-0,008	1.489
	05	1.406	1.368	1.364	1.343	-0,015	1.241
Sumurbatu	01	2.879	2.904	2.988	3.144	0,019	3.436
	02	2.468	2.578	2.626	2.930	0,031	3.385
	03	2.244	2.196	2.184	2.209	-0,014	2.059
	04	1.591	1.676	1.776	1.806	0,055	2.303
	05	1.998	2.001	1.941	2.346	-0,014	2.176

Sumber : Monografi Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu 2016

Keterangan :		Laju pertumbuhan meningkat
		Laju pertumbuhan menurun

Berdasarkan **Tabel 4. 2** tersebut, jumlah penduduk tertinggi terdapat pada RW 01 Kelurahan Sumurbatu dan jumlah penduduk terendah pada RW 05 Kelurahan Ciketingudik. Dari delapan RW yang diteliti, 5 diantaranya memiliki pertumbuhan penduduk yang negatif atau menurun dengan rentang $-0,007 - -0,015$ dan hanya tiga RW di Kelurahan Sumurbatu (RW 01, 02, 04) yang memiliki pertumbuhan yang positif atau meningkat.

4.1.3.2 Status kependudukan

Sebagian besar pendatang di wilayah penelitian berasal dari Indramayu, Madura, dll yang bekerja sebagai pemulung di TPST Bantargebang dan bertempat tinggal di bangunan-bangunan temporer di atas tanah ilegal (*squatter area*). Sementara itu, penduduk di *slum area* umumnya merupakan warga asli Bekasi.

Terdapat dua karakteristik permukiman, yaitu permukiman yang terbentuk sejak sebelum adanya TPST Bantargebang (RW 01 Ciketingudik dan RW 01, 02, 03, 04, 05 Sumurbatu) dan permukiman yang terbentuk setelahnya (RW 04 dan 05 Ciketingudik). Status kepemilikan lahan warga umumnya berupa surat girik, SPPT, dan akta jual beli tanah, sementara hanya sebagian kecil warga yang sudah memiliki sertifikat hak milik.

4.1.3.3 Kepadatan penduduk

Kondisi kependudukan ditinjau dari kepadatannya dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk (Jiwa) dan luas wilayah (Hektar/Ha). Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kepadatan penduduk diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Klasifikasi kepadatan penduduk tersebut adalah sebagai berikut :

- Rendah : < 150 Jiwa/Ha
- Sedang : $151 - 200$ Jiwa/Ha
- Tinggi : $201 - 400$ Jiwa/Ha
- Sangat tinggi : > 400 Jiwa/Ha

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015

Kelurahan	RW	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
Ciketingudik	01	2.735	49	55,81
	04	1.553	66	23,5
	05	1.343	86	15,6
Sumurbatu	01	3.144	104	30,23
	02	2.930	116	25,25
	03	2.209	143	15,44
	04	1.806	64	28,21
	05	2.346	54	43,44

Sumber : Monografi Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu 2016

Berdasarkan data Monografi Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu 2016 yang disajikan dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di wilayah penelitian tergolong ke dalam kepadatan rendah (< 150 Jiwa/Ha) dengan kepadatan maksimal sebesar 55,81 Jiwa/Ha (RW 01 Ciketingudik) dan terendah adalah 15,44 Jiwa/Ha (RW 03 Sumurbatu).

4.1.3.4 Tingkat pendidikan

Kualitas pendidikan warga di wilayah penelitian rendah. Warga usia tua umumnya hanya menempuh pendidikan formal tingkat SD, sedangkan warga usia muda menempuh pendidikan hingga SMP dan SMA/SMK. Hal tersebut dikarenakan telah diwujudkannya sekolah gratis di Kecamatan Bantargebang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu di SD Swasta Dinamika Indonesia, SMPN 27 Bekasi, SMAN 15 Bekasi, dan SMKN 2 Bekasi.

Kualitas pendidikan para warga usia tua yang berperan sebagai kepala keluarga yang rendah tersebut menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan tetap, yang akhirnya menyebabkan tingginya angka pengangguran di wilayah penelitian ini.



1

Gambar 4. 2 SMPN 27 Bekasi

Sumber : Google Earth, 2017



2

(a)

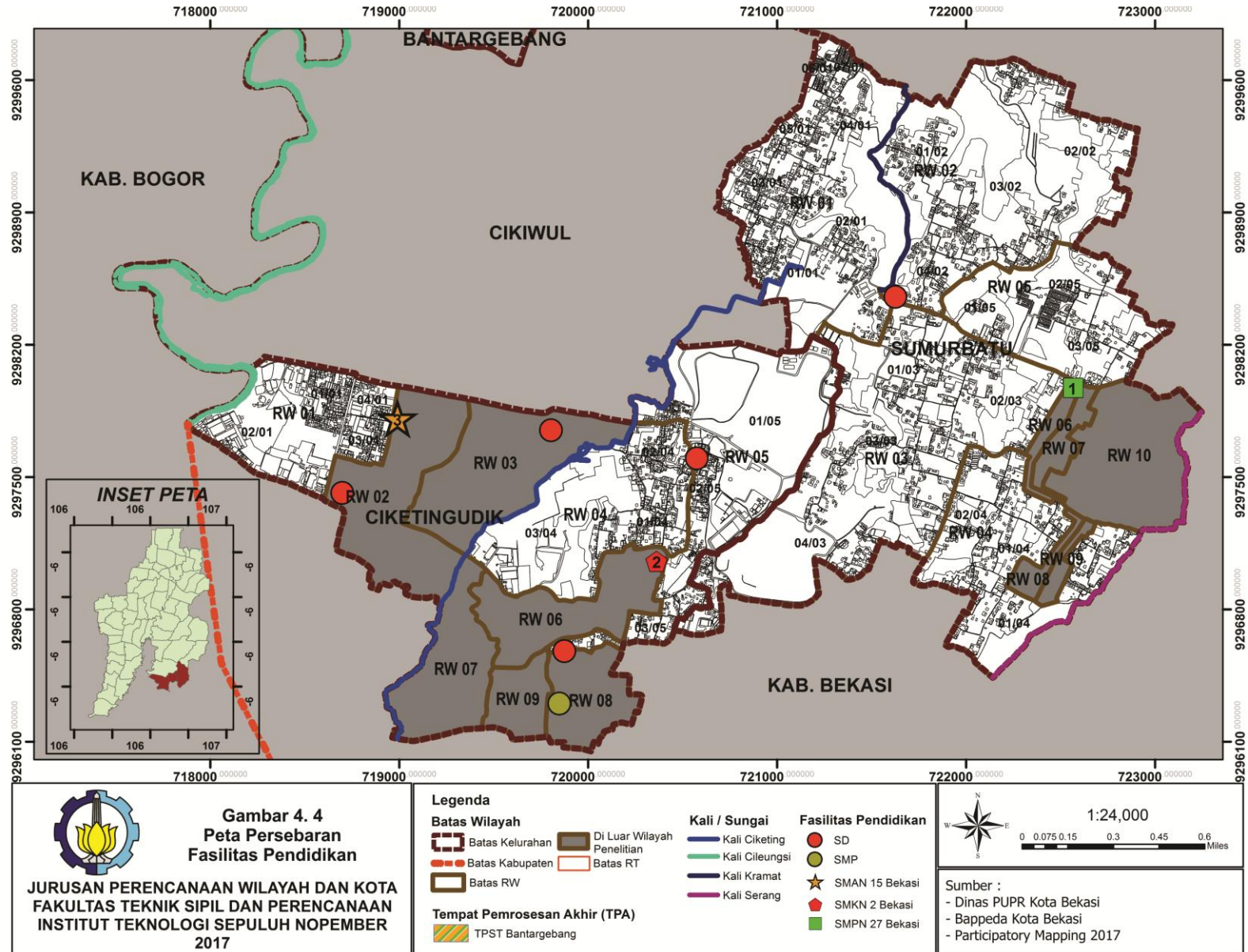


3

(b)

Gambar 4. 3 (a) SMKN 2 Bekasi dan (b) SMAN 15 Bekasi

Sumber : Google Image, 2017



(halaman ini sengaja dikosongkan)

4.1.4 Infrastruktur permukiman

4.1.4.1 Jaringan air bersih

Kualitas jaringan air bersih di wilayah penelitian sangat buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari pelayanan PDAM yang belum menjangkau warga, sehingga warga masih memanfaatkan air tanah. Akan tetapi, kualitas air tanah pada sebagian wilayah telah mengalami pencemaran yang disebabkan oleh interupsi air lindih ke dalam tanah yang menyebabkan air menjadi keruh dan berbau, sehingga air tanah tersebut sama sekali tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga. Rincian sumber dan kualitas air bersih dapat dilihat pada **Tabel 4.5**. Sementara itu, air tanah yang tercemar tersebut juga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan air minum warga seperti yang terdapat pada **Tabel 4.4**.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih warga, maka dibangun 5 buah sumur artesis yang terletak di beberapa titik seperti yang terdapat pada **Tabel 4.6**. Sumur artesis ini dapat mengalirkan air sebanyak 3 kali per hari selama 1 jam, durasi operasional sumur artesis yang singkat tersebut, ditambah dengan belum berfungsinya beberapa sumur artesis, maka menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan air bersih warga secara menyeluruh.



3

Gambar 4. 4 Sumur Artesis di RW 03 Kelurahan Sumurbatu

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016



4

Gambar 4. 5 Sumur Artesis di RW 05 Kelurahan Sumurbatu

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016

Tabel 4. 4 Sumber Air Minum

Kelurahan	RW	RT	Sumber
Ciketingudik	01	Seluruh RT	Air tanah yang dimasak
	04	Seluruh RT	Air kemasan
	05	Seluruh RT	Air tanah yang dimasak
Sumurbatu	01	Seluruh RT	Air kemasan
	02	04, 01	Air kemasan
		02, 03	Air tanah yang dimasak
	03	Seluruh RT	Air kemasan
	04	Seluruh RT	Air kemasan
	05	Seluruh RT	Air kemasan

Sumber : Survey Primer, 2017

Tabel 4. 5 Sumber dan Kualitas Air Bersih

Kelurahan	RW	RT	Sumber	Kualitas
Ciketingudik	01	Seluruh RT	Sumur bor	Baik
	04	Seluruh	Sumur bor	Buruk

		RT		
	05	Seluruh RT	Sumur Artesis	Baik
Sumurbatu	01	01, 02, 03, 04	Sumur bor dan Sumur artesis	Buruk
		05, 06, 07	Sumur bor	Buruk
	02	Seluruh RT	Sumur bor	Baik
	03	01, 03, 04	Sumur bor dan Sumur artesis	Buruk
		02, 05	Sumur bor	Buruk
	04	Seluruh RT	Sumur bor	Buruk
	05	Seluruh RT	Sumur bor	Baik

Sumber : Survey Primer, 2017

Keterangan Kualitas Air

Baik : Air tidak tercemar lindih, tidak berbau, berwarna, dan berasa

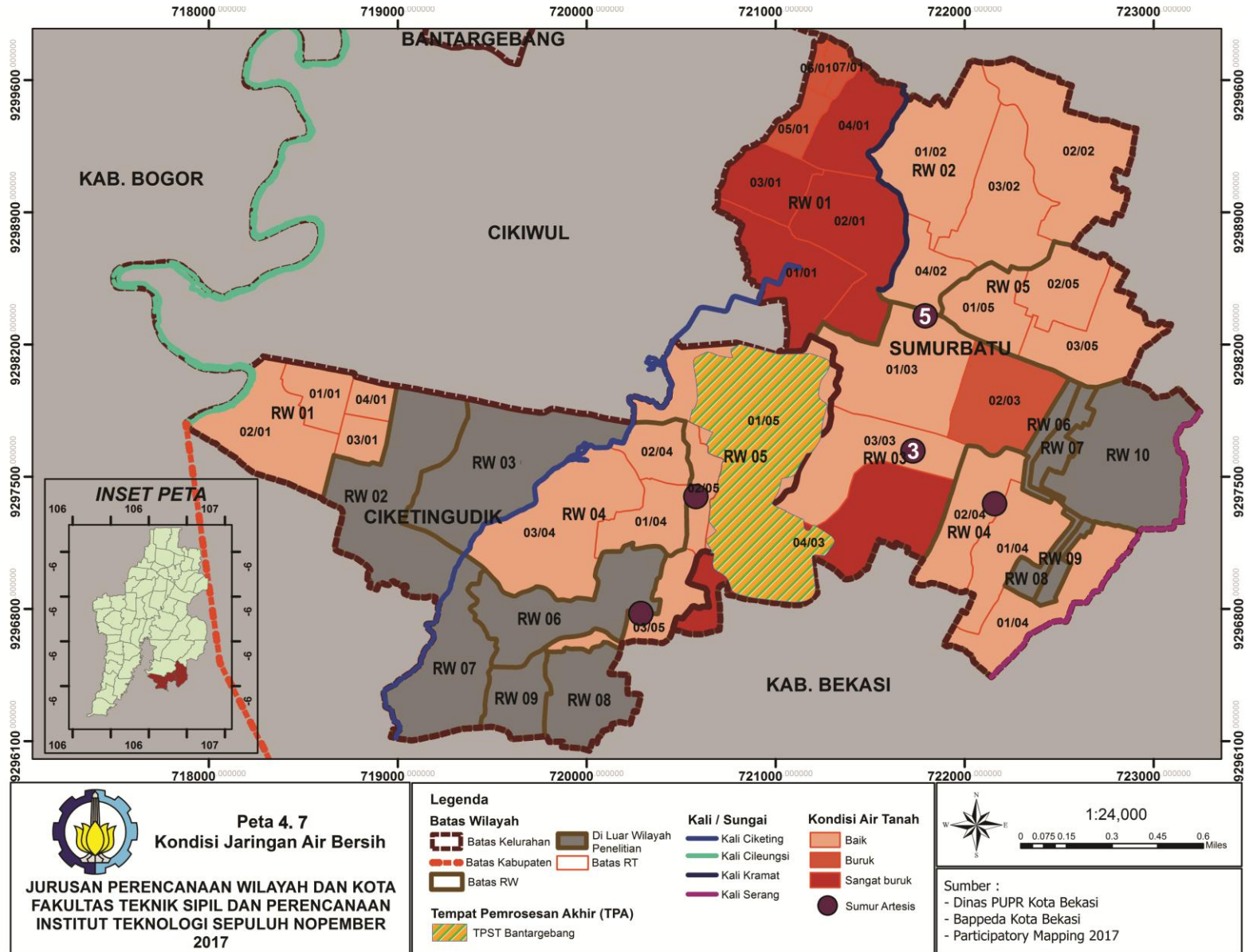
Buruk : Air tercemar lindih, berbau, berwarna, dan berasa

Tabel 4. 6 Sumur Artesis

Kelurahan	RW	RT	Keterangan
Ciketingudik	01	-	-
	04	-	-
	05	02	• Telah mengalir air bagi seluruh warga
		03	• Berfungsi 3 kali per hari dengan durasi 1 jam
Sumurbatu	01	-	-
	02	-	-
	03	01	Tidak berfungsi
		04	Telah mengalir air bagi sebagian kecil warga
	04	02	Tidak berfungsi
	05	-	-

Sumber : Survey Primer, 2017

(halaman ini sengaja dikosongkan)



(halaman ini sengaja dikosongkan)

(jangan di-print)

4.1.4.2 Sanitasi lingkungan

Pada umumnya, pembuangan limbah rumah tangga masih menyatu dengan saluran drainase. Selain itu terdapat pula kolam-kolam penampungan limbah yang terletak di belakang tiap-tiap rumah warga, dan umumnya berupa kolam ikan lele. Sarana pembuangan tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki sistem penyaringan yang baik sehingga mencemari lingkungan.

Sebagian besar rumah-rumah warga telah memiliki WC pribadi, akan tetapi masih terdapat beberapa warga yang belum memiliki WC pribadi, sehingga terdapat MCK komunal/umum. Sebaran MCK umum yang dibangun oleh Pemerintah Kota Bekasi dapat dilihat pada **Tabel 4. 7**. Selain MCK umum yang tertera pada tabel tersebut, Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan Kodim dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dapat dilihat pada **Tabel 4. 8**. Keberadaan MCK umum tersebut dimanfaatkan warga, baik yang memiliki maupun tidak memiliki MCK pribadi, untuk mendapatkan air bersih. Hal tersebut dikarenakan kualitas air di MCK umum lebih baik dari air tanah yang mengalir di rumah-rumah warga. Selain itu, *septic tank* di wilayah penelitian ini seluruhnya merupakan jenis *septic tank* individu.

Tabel 4. 7 MCK Umum

Kelurahan	RW	RT	Keterangan	Kondisi
Ciketingudik	01	-	-	-
	04	02	5 pintu	Berfungsi
		03, 01	2 pintu	Rusak
	05	-	-	-
Sumurbatu	01	02, 04	2 pintu	Berfungsi
		03	4 pintu	Berfungsi
	02	-	-	-
	03	01	2 pintu	Rusak
	04	02	1 pintu	Berfungsi
	05	-	-	-

Sumber : Survey Primer, 2017

Tabel 4. 8 MCK Umum Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi DKI Jakarta, dan Kodim

Kelurahan	RW	Jumlah	Sumber
Ciketingudik	07	20 titik	Pemkot Bekasi & Kodim
	05	1 titik	Pemkot Bekasi & Pemda Prov. DKI Jakarta

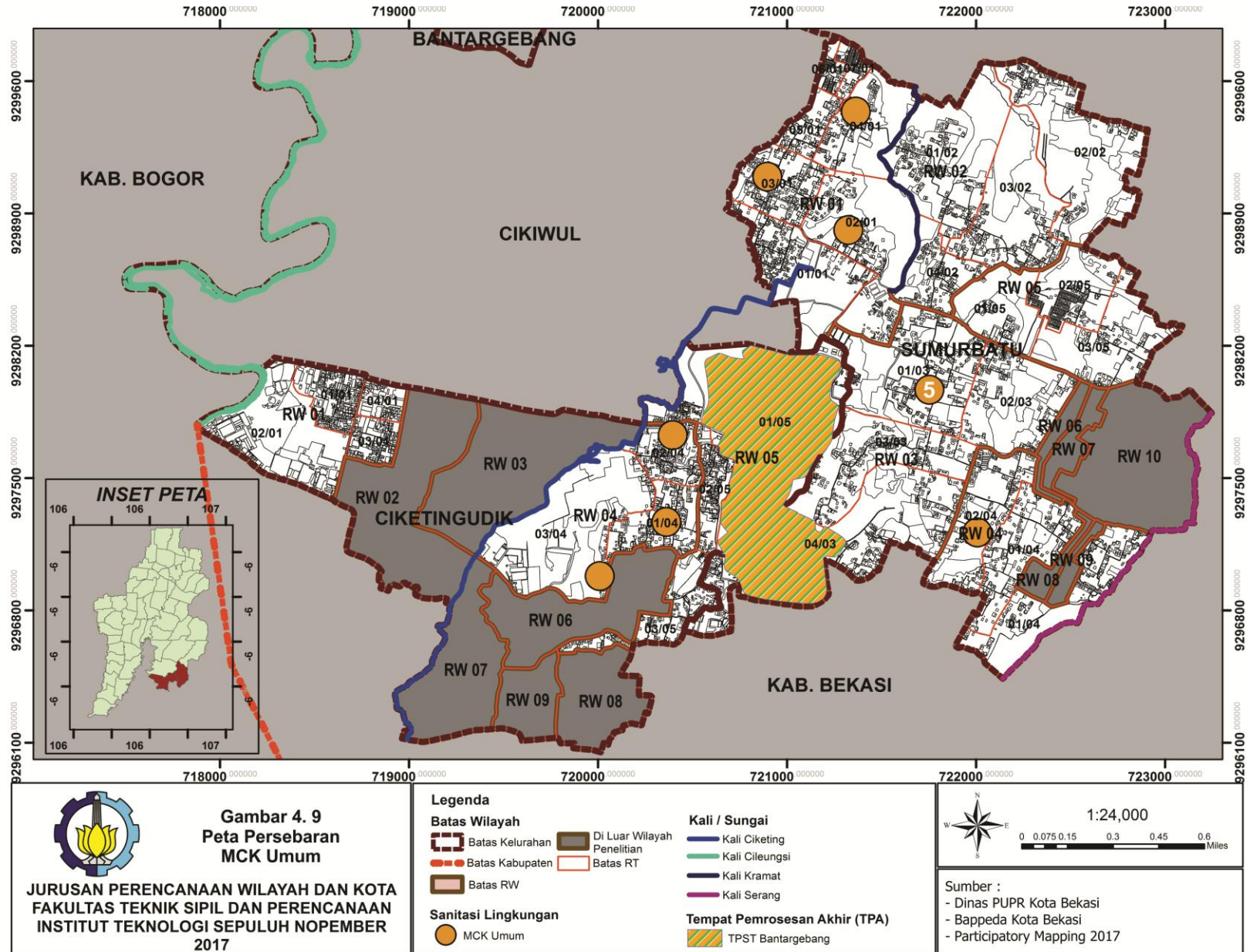
Sumber : Lurah Ciketingudik, 2017



5

Gambar 4. 6 MCK Umum di RW 03 Kelurahan Sumurbatu

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016



(halaman ini sengaja dikosongkan)

(jangan di-print)

4.1.4.3 Fasilitas persampahan

Kondisi persampahan di wilayah penelitian buruk. Buruknya kondisi persampahan dapat dilihat dari tidak terdapatnya fasilitas persampahan seperti bak-bak sampah di seluruh wilayah penelitian. Selain itu, pelayanan pengolahan sampah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi tidak dapat menjangkau seluruh warga. Sistem pengangkutan sampah di wilayah ini juga tidak bekerja dengan maksimal, seperti tidak tersedianya alat angkut sampah, frekuensi pengangkutan yang tidak menentu, bahkan tidak ada sistem pengangkutan sampah. Hal tersebut diperparah dengan kurangnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga sampah-sampah tersebut dibiarkan menggunung di halaman rumah atau di lahan kosong setempat, yang kemudian diolah secara swadaya melalui proses pembakaran. Proses pembakaran sampah umumnya dilakukan warga setiap sebulan sekali. Dampak dari proses pembakaran sampah tersebut menimbulkan asap yang menurunkan kualitas udara setempat. Dari seluruh RW di wilayah penelitian, hanya RW 04 Kelurahan Ciketingudik yang memiliki sistem pengangkutan sampah secara swadaya. Umumnya warga RW 04 ini membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menyewa sebuah bak motor tiap bulannya untuk mengangkut sampah menuju TPST Bantargebang.



6

Gambar 4. 7 Tumpukan Sampah dan Pembakaran Sampah

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016

4.1.4.4 Saluran air hujan / drainase

Saluran drainase di wilayah penelitian seluruhnya merupakan saluran terbuka dengan diameter rata-rata 10 cm – 20 cm dan kedalaman ± 15 cm. Akan tetapi terdapat saluran-saluran drainase yang terputus. Terputusnya saluran tersebut terjadi di seluruh RW seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 4.9**. Khusus di RW 01 Kelurahan Ciketingudik, saluran drainase terputus di Jalan Raya Narogong dikarenakan dilakukannya penggalian Telkom, gas, dan listrik.



Gambar 4. 8 (a) Saluran Drainase dan (b) Saluran Drainase Terputus

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

Tabel 4. 9 Jaringan Jalan Tanpa Saluran Air Hujan/Drainase

Kelurahan	RW	Tanpa Saluran Drainase	Keterangan
Ciketingudik	01	20%	Banjir
	04	40%	Tidak Banjir
	05	75%	Tidak Banjir
Sumurbatu	01	Jl. Pangkalan 20%	Menggenang
		Jl. Macem 80%	
	02	50%	Tidak Banjir
	03	40%	Tidak Banjir
	04	60%	Tidak Banjir
	05	70%	Banjir

Sumber : Survey Primer, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa wilayah yang mengalami banjir. Pada awal tahun 2017 lalu telah dilakukan upaya untuk mengatasi banjir yang terjadi di wilayah penelitian, yaitu dengan melakukan normalisasi Kali Ciketing oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Normalisasi ini dilakukan karena Kali Ciketing mengalami pendangkalan dan mengecilnya diameter kali.

4.1.4.5 Jaringan jalan

Jaringan jalan di wilayah penelitian sebagian besar merupakan jalan dengan perkerasan cor dan tanah dengan lebar 3 meter – 8 meter. Jalan dengan diameter yang lebih besar (± 8 meter) umumnya terdapat di RW 05 Kelurahan Ciketingudik karena merupakan wilayah dengan lokasi pabrik dan tempat pengolahan limbah terbanyak di wilayah penelitian karena letaknya yang berdekatan dengan TPST Bantargebang, sehingga diameter jalan yang besar memungkinkan mobil angkut untuk melewatinya. Dilihat dari kondisinya, terdapat jalan-jalan dengan kondisi yang rusak seperti yang tertera di **Tabel 4.10**. Selain itu, belum terdapat penerangan jalan umum sehingga penerangan saat malam hari hanya berasal dari rumah-rumah warga. Hal tersebut menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas di lingkungan sekitar.

Tabel 4. 10 Presentase Jalan Rusak

Kelurahan	RW	RT	Keterangan
Ciketingudik	01	01	50%
	04	01, 02	40%
	05	Seluruh RT	40%
Sumurbatu	01	01, 02, 03, 04	30%
	02	Seluruh RT	10%
	03	Seluruh RT	40%
	04	Seluruh RT	10%
	05	02, 01	30%

Sumber : Survey Primer, 2017



9



10

Gambar 4. 9 Jaringan Jalan

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

4.1.4.6 Ruang terbuka

Sesuai dengan pengertian ruang terbuka yang dikemukakan Trancik (1986), yaitu ruang yang terdiri dari ruang keras (*hard space*) dibatasi oleh dinding arsitektural serta digunakan untuk aktifitas sosial dan ruang lunak (*soft space*) didominasi oleh lingkungan alam seperti kebun, jalur hijau, dan taman. Maka terdapat beberapa fasilitas yang dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka, yaitu makam, lapangan, pos ronda, dan balai RW seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 4.11**.

Tabel 4. 11 Ruang Terbuka di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu

Kelurahan	RW	Makam	Lapangan	Pos Ronda	Balai RW
Ciketingudik	01	RW 07	-	Tiap RT	-

	04		-	-	-
	05		-	Tiap RT (Rusak)	-
Sumurbatu	01	-	-	Tiap RT	RT 03 (Rusak)
	02	RT 03	-	-	-
	03	-	-	RT 02, 03	RT 01
	04	-	RT 02	-	RT 02
	05	-	-	-	RT 03 (Rusak)

Sumber : Survey Primer, 2017



11

Gambar 4. 10 Pemakaman di RW 03 Kelurahan Sumurbatu
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017



(a)

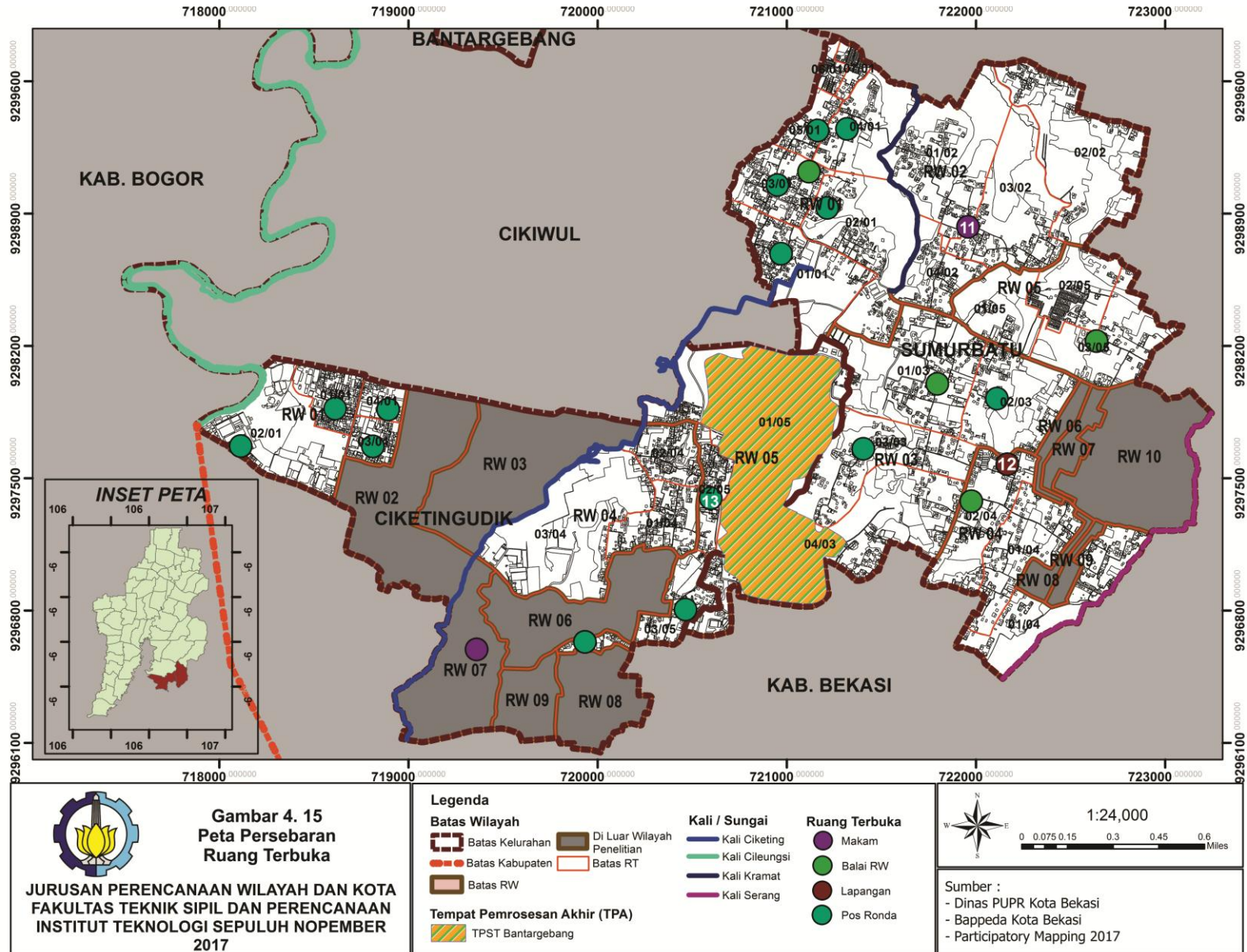
12

(b)

13

**Gambar 4. 11 (a) Lapangan di RW 02 Kelurahan Sumurbatu
dan (b) Pos Ronda di RW 05 Kelurahan Ciketingudik**

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017



(halaman ini sengaja dikosongkan)

4.1.4.7 Keterbatasan lahan permukiman

Karakteristik permukiman di wilayah penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu permukiman padat huni dan permukiman yang renggang atau masih terdapat lahan-lahan kosong yang berpotensi untuk dibangun hunian. Permukiman padat huni hanya terdapat di RW 01 Kelurahan Ciketingudi, sementara RW lainnya merupakan permukiman yang masih renggang.

4.1.5 Bahaya

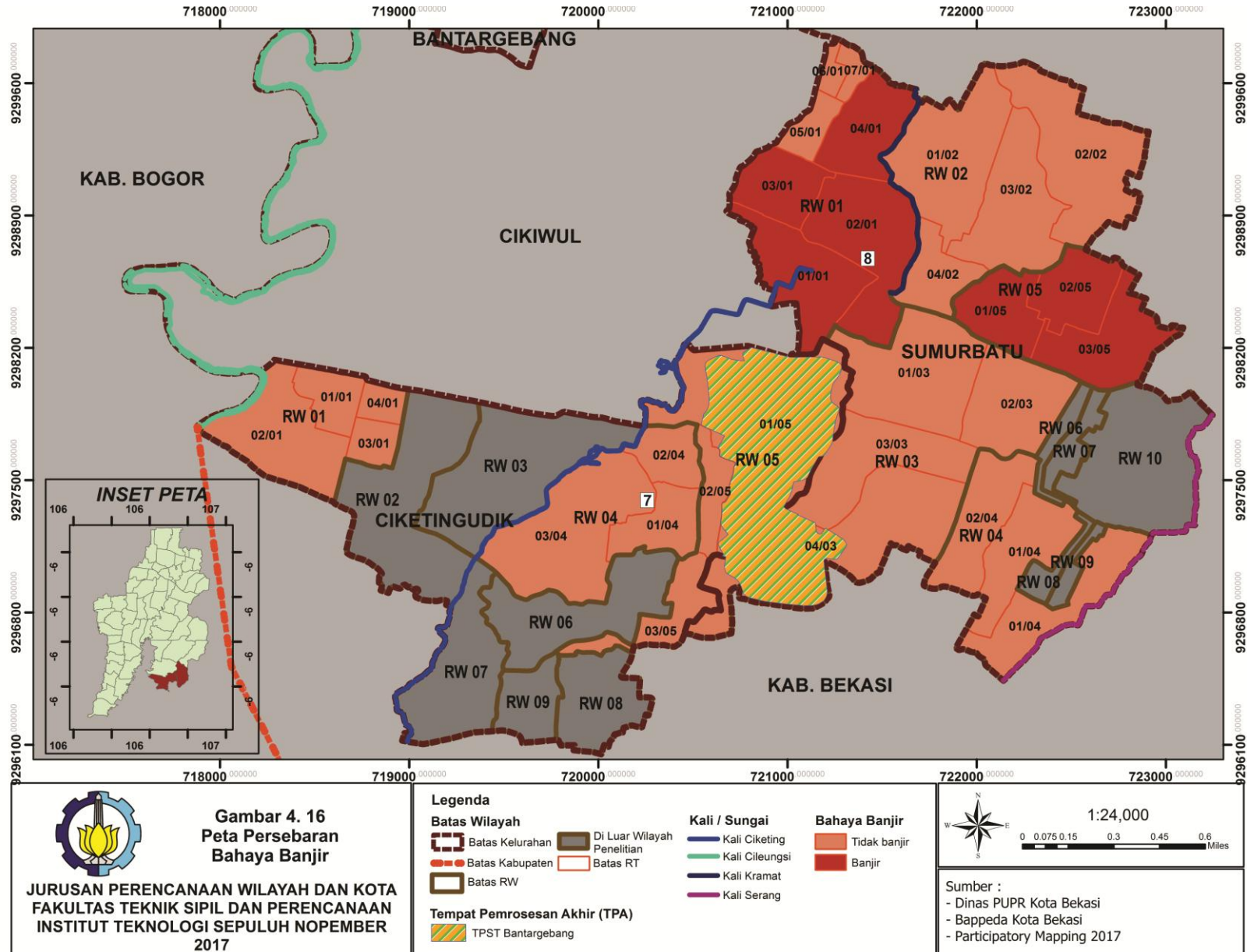
Bahaya yang umumnya terjadi adalah banjir. Banjir terjadi di Kelurahan Ciketingudik (RW 01) dan Kelurahan Sumurbatu (RW 01 dan 05). Ketinggian genangan hanya sebatas ± 30 cm atau sebetis orang dewasa dengan durasi bervariasi antara 1 jam – 2 jam atau hingga hujan berhenti.

Tabel 4. 12 Lokasi Bahaya

Kelurahan	RW	RT	Bahaya		Keterangan
			Banjir	Longsor	
Ciketingudik	01	03, 04	v	-	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran air dipakai galian Telkom, gas, dan listrik • Saluran air terputus • Jalan lebih tinggi dari rumah • Genangan > 30 cm • Durasi gangguan ± 2 jam
	04	-	-	-	-
	05	-	-	-	-
Sumurbatu	01	01, 02, 03, 04	v	-	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran air terputus • Genangan ± 30 cm

					<ul style="list-style-type: none"> • Menyusut saat hujan berhenti
	02	-	-	-	-
	03	-	-	-	-
	04	-	-	-	-
	05	Seluruh RT	v	-	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran air terputus • Genangan ± 30 cm • Durasi genangan ± 1 jam

Sumber : Survey Primer, 2017



(halaman ini sengaja dikosongkan)

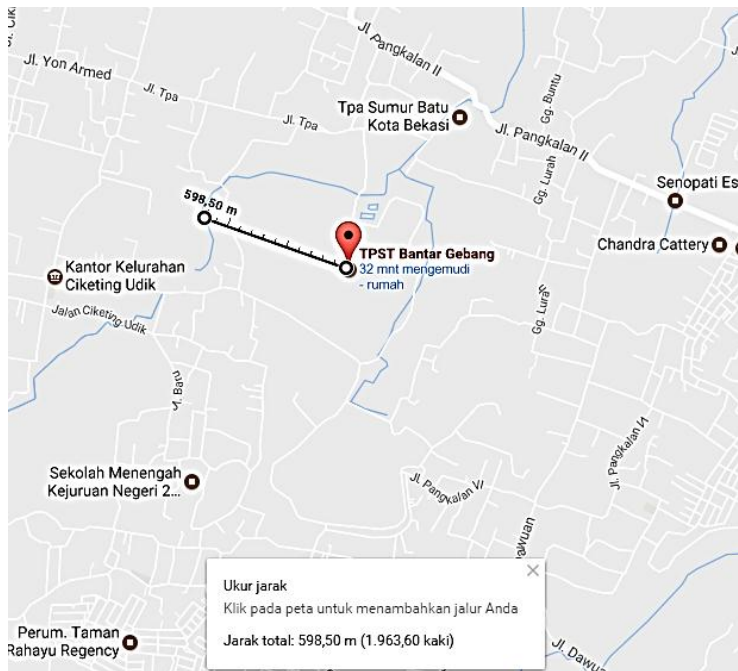
4.1.6 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

4.1.6.1 Jarak terhadap permukiman

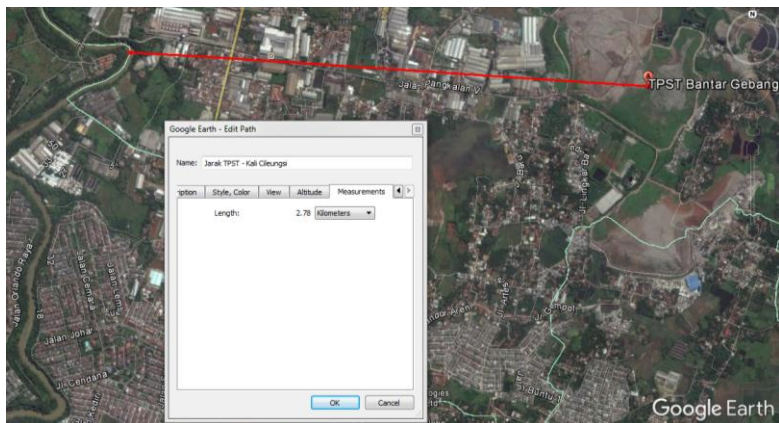
Jarak permukiman standard antara TPA dan permukiman adalah 500 meter, sedangkan jarak permukiman terdekat dengan TPST Bantargebang adalah hanya sejauh ± 50 meter – 100 meter. Permukiman RW 05 Kelurahan Ciketingudik dan RW 03 Kelurahan Sumurbatu merupakan permukiman yang berbatasan langsung dengan TPST Bantargebang, sehingga dampak yang dirasakan lebih besar dari RW lainna.

4.1.6.2 Jarak terhadap badan air

Terdapat dua badan air yang mengalir wilayah penelitian, yaitu Kali Cileungsi dan Kali Kramat. Berdasarkan fitur pengukuran jarak di *Google Earth*, diketahui bahwa Kali Cileungsi berjarak sejauh 2,78 km, sedangkan Kali Kramat berjarak sejauh 590 meter dari TPST Bantargebang. Menurut warga setempat (RW 02 Kel. Sumurbatu), Kali Kramat telah tercemar dikarenakan limbah yang bersumber dari TPST Bantargebang, TPA Sumurbatu, dan industri-industri di sekitarnya.



Gambar 4. 12 Jarak TPST Bantargebang - Kali Kramat
Sumber : Google Map, 2017

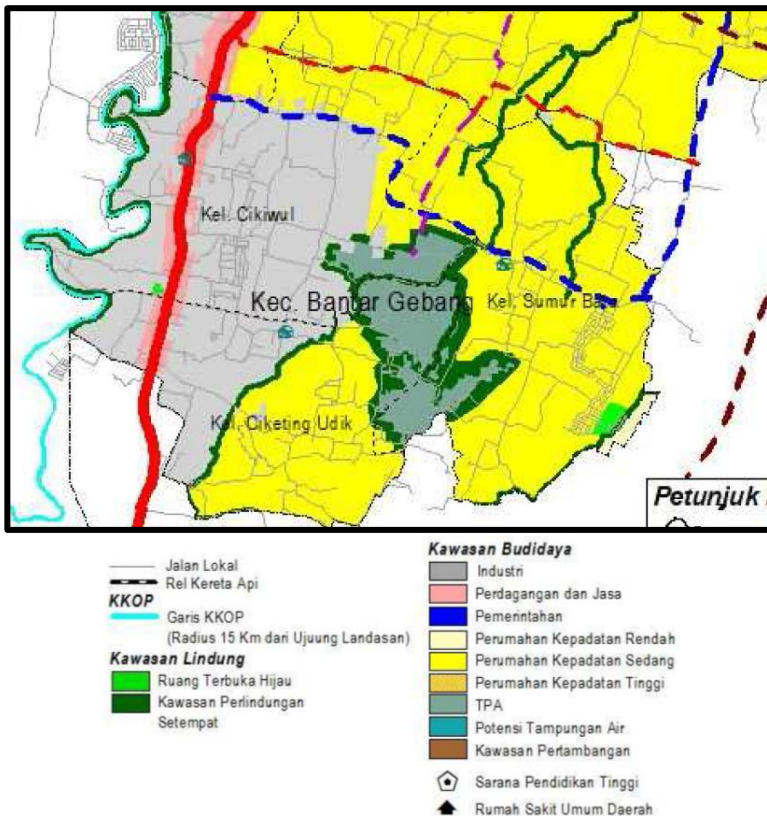


Gambar 4. 13 Jarak TPST - Kali Cileungsi

Sumber : Google Map, 2017

4.1.6.3 Klasifikasi kawasan

Berdasarkan RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031, TPST Bantargebang terletak pada kawasan budidaya TPA dan terdapat *buffer zone* di sekitarnya yang termasuk ke dalam kawasan perlindungan setempat seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 4.14**.



Gambar 4. 14 Klasifikasi Kawasan TPST Bantargebang

Sumber : RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031

4.1.6.4 Bau

Dampak bau yang disebabkan oleh gunungan sampah di TPST Bantargebang dirasakan di sebagian besar wilayah penelitian seperti yang terdapat di **Tabel 4.13**. Umumnya dampak bau tersebut dirasakan oleh warga sepanjang hari, akan tetapi di beberapa wilayah hanya terasa pada waktu-waktu tertentu saja, seperti saat pagi hari ketika sampah di TPST Bantargebang sedang diaduk. Selain jarak permukiman yang berdekatan dengan TPST, faktor lain yang menyebabkan bau adalah arah angin.

Tabel 4. 13 Dampak Bau dari TPST Bantargebang

Kelurahan	RW	Dampak Bau
Ciketingudik	01	Seluruh RT
	04	Seluruh RT
	05	Seluruh RT
Sumurbatu	01	Seluruh RT
	02	RT 02, 04
	03	Seluruh RT
	04	Seluruh RT
	05	Seluruh RT

Sumber : Survey Primer, 2017

4.1.6.5 Transportasi sampah

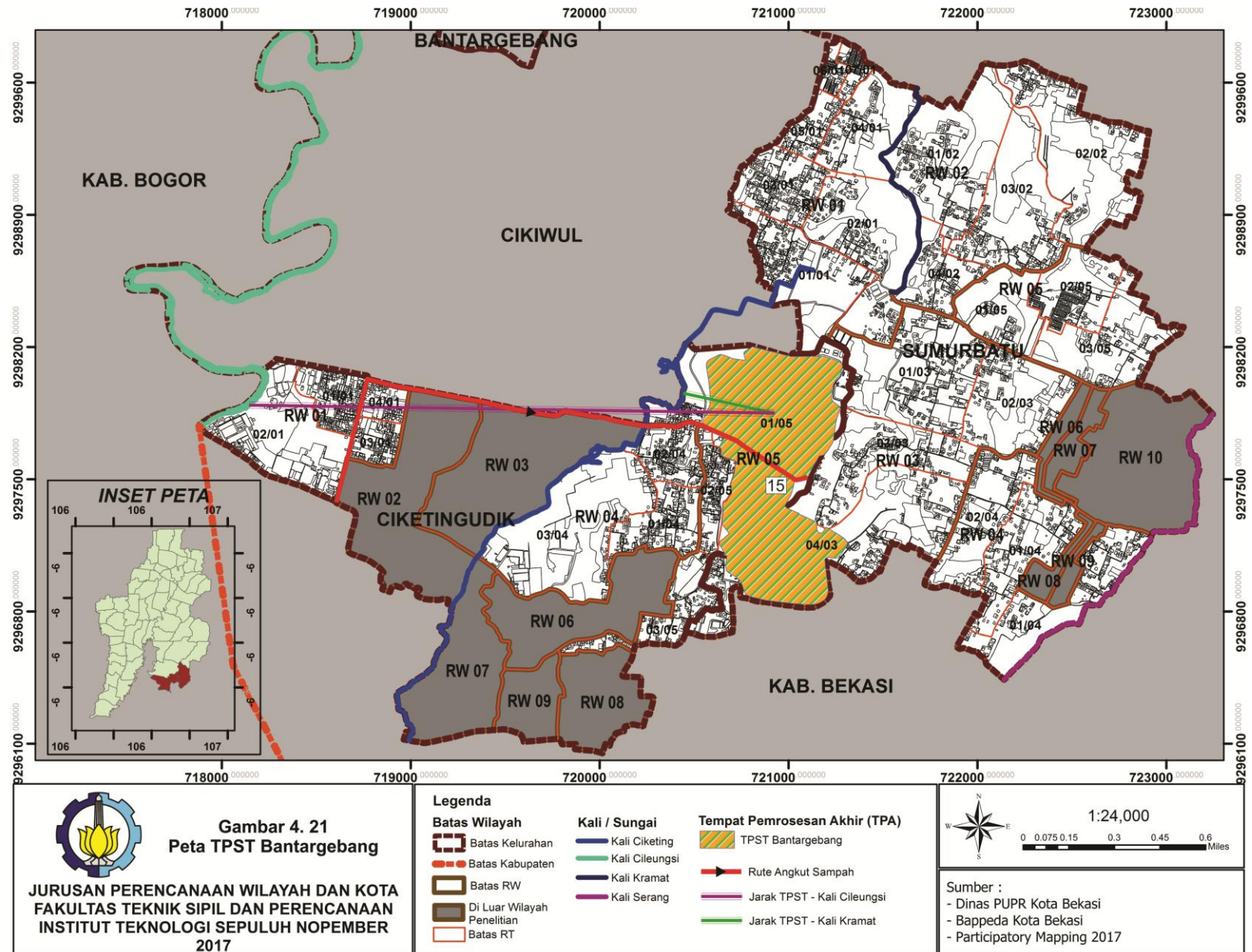
Jalur transportasi sampah hanya melewati Jalan Raya Narogong, berbelok di Jalan Pangkalan V, kemudian masuk ke area TPST Bantargebang. Kondisi jalan yang dilalui oleh truk-truk pengangkut sampah tersebut dalam kondisi yang baik tanpa ada kerusakan, akan tetapi kepadatan lalu lintas sangat tinggi yang menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Narogong. Selain itu, air lindi yang berjatuhan dari truk-truk sampah tersebut menyebabkan jalan menjadi kotor dan sangat berbau.



15

Gambar 4. 15 Transportasi Sampah TPST Bantargebang
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

(halaman ini sengaja dikosongkan)



(halaman ini sengaja dikosongkan)

4.2 Analisis Variabel Penyebab Kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu

Metode yang digunakan adalah Analisis Delphi, dimana terdapat sembilan *stakeholders* yang turut memberikan pendapatnya terkait penyebab kekumuhan di wilayah penelitian, yaitu :

Tabel 4. 14 Daftar Responden

No	Kode Responden	Instansi
1	R1	Bappeda Kota Bekasi
2	R2	Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi
3	R3	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta
4	R4	Dinas PUPR Kota Bekasi
5	R5	Kelurahan Ciketingudik
6	R6	Kelurahan Sumurbatu
7	R7	RW 05 Ciketingudik
8	R8	RW 03 Sumurbatu
9	R9	Akademisi

Sumber : Penulis, 2017

Adapun hasil dari analisis delphi terhadap sembilan *stakeholders* tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5**, **Lampiran 6**, dan **Lampiran 7**. Sementara itu, rangkumannya dapat dilihat pada **Tabel 4. 15**, **Tabel 4. 17**, dan **Tabel 4. 18** di bawah ini.

Tabel 4. 15 Analisis Delphi Putaran 1

Faktor	Variabel	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Peran pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	S	TS	S	TS	S	S	S	S	S
Ekonomi	Tingkat pendapatan	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Jenis pekerjaan informal	S	S	S	S	S	TS	S	TS	S
Kependudukan	Laju pertumbuhan	S	S	S	S	TS	TS	TS	S	S
	Status kependudukan	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Kepadatan penduduk	S	S	S	S	S	S	TS	TS	S
	Tingkat pendidikan	S	TS	S	S	TS	S	S	S	S
Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Sanitasi lingkungan	S	S	S	S	S	TS	S	S	S
	Fasilitas persampahan	S	S	S	S	S	S	S	TS	S
	Saluran air hujan / drainase	S	S	S	S	S	TS	TS	S	S

	Jaringan jalan	TS	S	S	S	TS	TS	TS	S	S
	Ruang terbuka	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	Keterbatasan lahan permukiman	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	S
Bahaya	Bahaya banjir	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	Bahaya longsor	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	S	S	S	S	TS	S	S	S	S
	Jarak terhadap badan air	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Kawasan lindung	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	Bau	S	S	TS	S	S	S	S	S	S
	Transportasi sampah	S	S	S	S	TS	S	S	TS	S

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Terdapat beberapa variabel yang telah disepakati menyebabkan ataupun tidak menyebabkan kekumuhan berdasarkan analisis Delphi putaran pertama tersebut. Variabel-variabel yang belum disepakati akan menjadi input pada analisis Delphi putaran kedua (**Tabel 4. 17**) bersamaan dengan

variabel-variabel baru yang teridentifikasi setelah melakukan analisis Dephi putaran pertama (**Tabel 4.16**).

Tabel 4. 16 Variabel Baru

No	Faktor	Variabel	Sumber
1	Kependudukan	Kesadaran dan kepedulian warga	Dinas Bangunan dan Permukiman dan Kelurahan Ciketingudik
2	Infrastruktur	Hydran	
3	Infrastruktur	Listrik	Akademisi
4	Bahaya	Kebakaran	

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Tabel 4. 17 Analisis Delphi Putaran 2

Faktor	Variabel	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Peran pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	S	TS	S	TS	S	S	S	S	S
Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kependudukan	Laju pertumbuhan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	Kepadatan penduduk	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS

	Transportasi sampah	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
--	---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Terdapat beberapa variabel yang telah disepakati menyebabkan ataupun tidak menyebabkan kekumuhan berdasarkan analisis Delphi putaran kedua tersebut. Variabel-variabel yang belum disepakati akan menjadi input pada analisis Delphi putaran ketiga (**Tabel 4. 18**).

Tabel 4. 18 Analisis Delphi Putaran 3

Faktor	Variabel	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Peran pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kependudukan	Tingkat pendidikan	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan analisis Delphi putaran ketiga tersebut, dapat diketahui bahwa variabel penyebab kekumuhan di wilayah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah

Peran pemerintah menyebabkan kekumuhan karena kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak belum signifikan.

A. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak

Pemerintah memiliki peran penting dalam hal penyediaan infrastruktur pendukung permukiman yang layak. Oleh karena itu, jika terdapat salah satu atau beberapa infrastruktur permukiman yang belum tersedia/rusak di wilayah penelitian, menandakan bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan perannya dan menyebabkan timbulnya permukiman kumuh

2. Ekonomi

Ekonomi menyebabkan kekumuhan karena jenis pekerjaan warga menghasilkan penghasilan yang rendah dan tak menentu. Berikut adalah penjelasannya.

B. Jenis pekerjaan informal

Jenis pekerjaan warga umumnya sebagai kuli bangunan, buruh pabrik, dan pekerja informal lainnya. Banyaknya industri yang ada di wilayah penelitian belum dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi warga. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga terdapat pengangguran, sehingga variabel ini menjadi salah satu penyebab kekumuhan.

C. Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan warga berhubungan erat dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Pendapatan warga umumnya sebesar UMR Kota Bekasi, yaitu Rp. 3,9 juta. Akan tetapi, pendapatan sebagian besar warga lainnya masih di bawah UMR karena pekerjaan yang tidak tetap

atau bahkan menganggur. Rendahnya tingkat pendapatan tersebut menyebabkan ketidakmampuan untuk memiliki hunian yang layak huni, sehingga menyebabkan kekumuhan.

3. Kependudukan

Kependudukan menjadi faktor penyebab kekumuhan karena permukiman temporer yang dibangun oleh pendatang, kurangnya skill dan pendidikan yang dimiliki warga, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian warga. Berikut adalah penjelasannya.

D. Status kependudukan

Status kependudukan dalam penelitian ini dipahami sebagai asal penduduk datang. Variabel ini dianggap sebagai penyebab kumuh karena umumnya para pendatang tersebut mendirikan hunian temporer di lahan-lahan kosong tanpa MCK pribadi dan tidak tertata sehingga menimbulkan kesan tidak teratur dan menyebabkan kekumuhan di wilayah permukiman.

E. Tingkat pendidikan

Variabel ini merupakan salah satu penyebab kumuh jika dilihat dari kualitas pendidikan secara keseluruhan,. Tingkat pendidikan warga usia muda di wilayah penelitian sudah cukup baik, yaitu setingkat SMA/SMK, ditambah dengan dukungan pendidikan gratis di beberapa sekolah di Kecamatan Bantargebang dari jenjang SD hingga SMA. Selain tingkat pendidikan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah *skill*/keterampilan para pelajar. Akan lebih baik jika jurusan di SMK yang ada di Kecamatan Bantargebang menyesuaikan jenis *skill*/keterampilan yang dibutuhkan industri-industri yang berada di kecamatan tersebut, dengan begitu akan lebih banyak warga lulusan SMA/SMK yang akan terserap lapangan pekerjaan.

F. Kesadaran dan kepedulian warga

Variabel ini muncul pada iterasi analisis delphi pertama dari beberapa *stakeholders*. Pada dasarnya, kesadaran dan

kepedulian warga merupakan penentu suatu permukiman menjadi kumuh atau tidak kumuh.

4. Infrastruktur permukiman

Infrastruktur menyebabkan kekumuhan karena pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh warga, tidak terdapat sistem pengangkutan sampah, saluran drainase terputus, dan perkerasan jaringan jalan buruk. Berikut adalah penjelasannya.

G. Jaringan air bersih

Jaringan air bersih di wilayah penelitian dianggap variabel penyebab kumuh karena sebagian besar sumur warga telah mengalami pencemaran, sementara pelayanan PDAM belum menjangkau wilayah mereka, sehingga keberadaan sumur artesis sangat diperlukan. Akan tetapi, beberapa sumur beberapa sumur artesis yang telah tersedia tidak berfungsi sehingga sebagian warga masih menggunakan air yang tercemar tersebut untuk kebutuhan MCK.

H. Fasilitas persampahan

Variabel ini merupakan penyebab kekumuhan karena tidak terdapat sistem pengangkutan sampah domestik sehingga sampah dibiarkan menggunung dan diolah dengan pembakaran yang tidak ramah lingkungan karena menimbulkan asap yang pekat di lingkungan permukiman.

I. Saluran air hujan / drainase

Terputusnya saluran drainase di wilayah penelitian ini merupakan penyebab kekumuhan karena saluran ini berfungsi untuk mengalirkan air hujan sehingga mencegah banjir di masa mendatang.

J. Jaringan jalan

Terdapat beberapa titik dengan jaringan jalan yang masih rusak ataupun masih berupa jalan tanah. Kondisi jalan rusak tersebut sangat membahayakan saat musim hujan. Selain itu, minimnya penerangan jalan yang disebabkan kurangnya bantuan pengadaan lampu jalan dari pemerintah menyebabkan kondisi jalanan gelap dan mengundang kejahatan.

5. Bahaya

Bahaya kebakaran dapat menyebabkan kekumuhan di wilayah penelitian.

K. Bahaya kebakaran

Variabel bahaya kebakaran muncul dari iterasi analisis delphi pertama yang diusulkan oleh pihak akademisi dan disepakati *stakeholders* lainnya. Berdasarkan data, belum pernah terjadi kebakaran di wilayah penelitian. Kebakaran hanya terjadi di dalam area TPST Bantargebang dan asap yang ditimbulkannya sangat berdampak bagi permukiman sekitar. Asap tersebut bertahan hingga berhari-hari dan menyebabkan beberapa warga mengungsi. Selain itu, variabel ini dianggap sebagai penyebab kekumuhan karena belum adanya antisipasi akan bahaya kebakaran yang sangat rawan terjadi di permukiman kumuh.

6. Standard pemanfaatan ruang sekitar TPA

Standard pemanfaatan ruang sekitar TPA menyebabkan kumuh karena jarak terhadap permukiman yang terlalu dekat sehingga dampak bau sangat terasa dan juga pencemaran yang telah mencapai badan air terdekat, yaitu Kali Kramat. Berikut adalah penjelasannya.

L. Jarak terhadap badan air

Jarak TPST Bantargebang terhadap badan air telah melebihi standard yang ditentukan, akan tetapi pencemaran terhadap badan air masih terjadi sehingga menyebabkan air berwarna keruh/gelap dan bau yang menyengat, seperti yang terjadi pada Kali Kramat. Oleh karena itu, variabel ini merupakan penyebab kumuh.

M. Jarak terhadap permukiman

Variabel ini merupakan salah satu penyebab kekumuhan karena jarak sebagian permukiman yang hanya sejauh ± 50 meter dari TPST Bantargebang menyebabkan kualitas lingkungan di permukiman tersebut rendah dikarenakan dampak yang ditimbulkan TPST seperti bau yang menyengat, air tanah yang tercemar, serta keberadaan

hewan-hewan yang mengganggu kesehatan seperti lalat, nyamuk, dan serangga lainnya.

N. Bau

Persebaran bau yang berasal dari TPST Bantargebang tidak disebabkan oleh seberapa dekat jarak dari TPST, akan tetapi disebabkan oleh arah angin yang membawa bau tersebut, bahkan bau tersebut mencapai hingga ke perbatasan Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang ada, seluruh wilayah penelitian terdampak bau tersebut, sehingga variabel ini merupakan penyebab kekumuhan yang ada.

4.3 Analisis Prioritas Variabel Penyebab Kekumuhan untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu

Metode yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Proses* (AHP), dimana terdapat lima *stakeholders* (**Tabel 4. 19**) yang merupakan *expert* untuk turut memberikan pendapatnya dalam menentukan prioritas variabel penyebab kumuh yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, yang terdiri dari :

Tabel 4. 19 Daftar Responden

No	Kode Responden	Instansi
1	R1	Bappeda Kota Bekasi
2	R2	Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi
3	R3	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta
4	R4	Dinas PUPR Kota Bekasi
5	R9	Akademisi

Sumber : Penulis, 2017

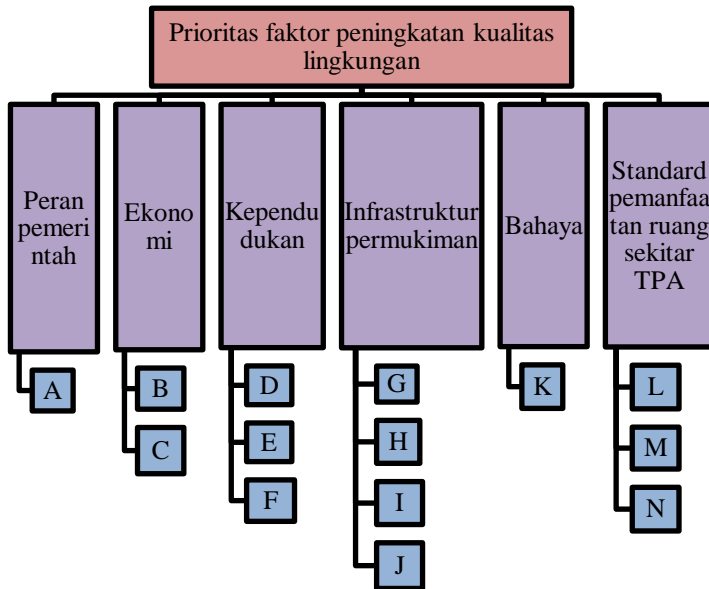
Tabel 4. 20 Faktor Penyebab Kumuh

No	Faktor	Variabel	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peran pemerintah	a. Kemampuan pemerintah	A

		dalam menyediakan hunian layak huni	
2	Ekonomi	a. Jenis pekerjaan informal	B
		b. Tingkat pendapatan	C
3	Kependudukan	a. Status kependudukan	D
		b. Tingkat pendidikan	E
		c. Kesadaran dan kepedulian warga	F
4	Infrastruktur permukiman	a. Jaringan air bersih	G
		b. Fasilitas persampahan	H
		c. Saluran air hujan / drainase	I
		d. Jaringan jalan	J
5	Bahaya	a. Kebakaran	K
6	Standard pemanfaatan ruang sekitar TPA	a. Jarak terhadap badan air	L
		b. Jarak terhadap permukiman	M
		c. Bau	N

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan Teori Saaty (2008), dibutuhkan tujuan (*goal*), kriteria (*criteria*), dan sub-kriteria (*sub-criteria*) untuk menyusun struktur hirarki AHP. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dituju adalah menentukan prioritas variabel untuk peningkatan kualitas lingkungan, kriterianya adalah faktor-faktor penyebab kumuh, sedangkan sub-kriterianya adalah variabel-variabel seperti yang terdapat pada **Tabel 4. 20**. Berikut adalah struktur hirarki AHP pada penelitian ini:



Keterangan

- : Tujuan
- : Kriteria (Faktor)
- : Sub-kriteria (Variabel)

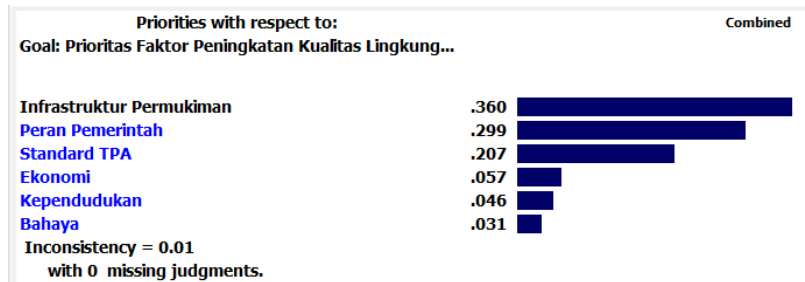
Gambar 4. 16 Struktur Hirarki AHP

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Setelah dilakukan pengumpulan data seperti yang terlampir pada **Lampiran 8**, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan *Software Expert Choice 11* dan menghasilkan hasil sebagai berikut:

4.3.1 Hasil Analisis antar Kriteria (Faktor)

Analisis antar kriteria (faktor) menghasilkan nilai *inconsistency* sebesar 0,01 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini adalah 1%. Prioritas faktor beserta bobotnya secara berturut-turut dari tinggi ke rendah adalah infrastruktur permukiman (0,360), peran pemerintah (0,299), standard pemanfaatan ruang sekitar TPA (0,207), ekonomi (0,057), kependudukan (0,046), dan bahaya (0,031).



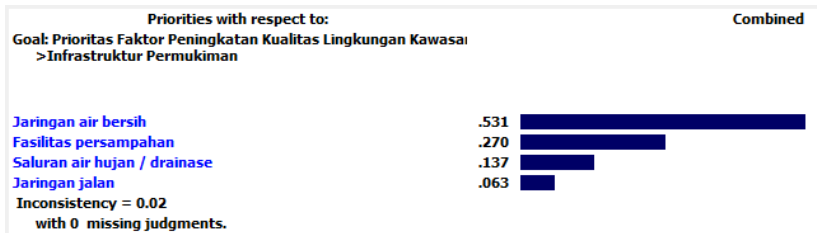
Gambar 4. 17 Hirarki Prioritas Indikator

Sumber : Hasil Analisis, 2017

4.3.2 Hasil Analisis antar Variabel

4.3.2.1 Infrastruktur Permukiman

Analisis antar variabel menghasilkan nilai *inconsistency* sebesar 0,02 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini adalah 2%. Prioritas variabel beserta bobotnya secara berturut-turut dari tinggi ke rendah adalah jaringan air bersih (0,531), fasilitas persampahan (0,270), saluran air hujan / drainase (0,137), dan jaringan jalan (0,063).



Gambar 4. 18 Hirarki Prioritas Variabel Infrastruktur Permukiman

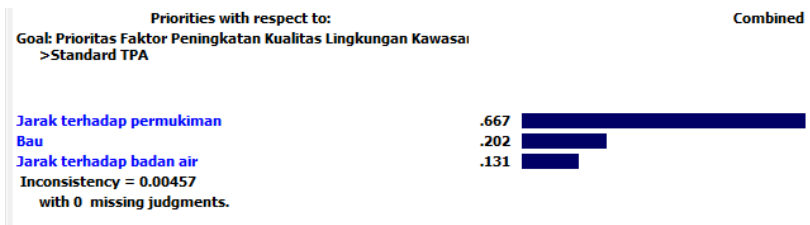
Sumber : Hasil Analisis, 2017

4.3.2.2 Peran pemerintah

Hanya terdapat satu variabel pada indikator ini, yaitu kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian layak huni, sehingga tidak dapat disusun hirarkinya.

4.3.2.3 Standard pemanfaatan ruang sekitar TPA

Analisis antar variabel menghasilkan nilai *inconsistency* sebesar 0,05 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini adalah 5%. Prioritas variabel beserta bobotnya secara berturut-turut dari tinggi ke rendah adalah jarak terhadap permukiman (0,667), bau (0,202), dan jarak terhadap badan air (0,131).



Gambar 4. 19 Hirarki Prioritas Variabel Standard TPA

Sumber : Hasil Analisis, 2017

4.3.2.4 Ekonomi

Analisis antar variabel menghasilkan nilai *inconsistency* sebesar 0 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini adalah 0%. Prioritas variabel beserta bobotnya secara berturut-turut dari

tinggi ke rendah adalah tingkat pendapatan (0,550) dan jenis pekerjaan informal (0,450).

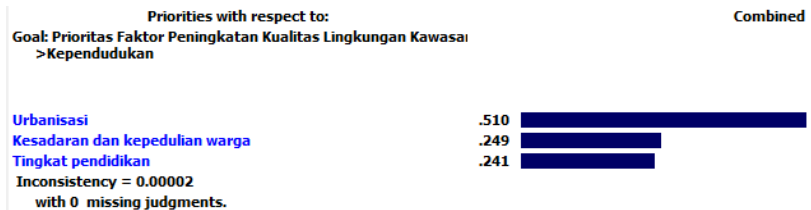


Gambar 4. 20 Hirarki Prioritas Variabel Ekonomi

Sumber : Hasil Analisis, 2017

4.3.2.5 Kependudukan

Analisis antar variabel menghasilkan nilai *inconsistency* sebesar 0,0002 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini adalah 0,02%. Prioritas variabel beserta bobotnya secara berturut-turut dari tinggi ke rendah adalah status kependudukan (0,510), kesadaran dan kepedulian warga (0,249), serta tingkat pendidikan (0,241).



Gambar 4. 21 Hirarki Prioritas Variabel Kependudukan

Sumber : Hasil Analisis, 2017

4.3.2.6 Bahaya

Hanya terdapat satu variabel pada indikator ini, yaitu bahaya kebakaran, sehingga tidak dapat disusun hirarkinya.

Tabel 4. 21 Hirarki Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Berat

Prioritas Faktor	Prioritas Variabel
(1)	(2)

1	Infrastruktur permukiman (0,360)	1	Jaringan air bersih (0,531)
		2	Fasilitas persampahan (0,270)
		3	Saluran air hujan/drainase (0,137)
		4	Jaringan jalan (0,063)
2	Peran pemerintah (0,299)	1	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak
3	Standard pemanfaatan ruang sekitar TPA (0,207)	1	Jarak terhadap permukiman (0,667)
		2	Bau (0,202)
		3	Jarak terhadap badan air (0,131)
4	Ekonomi (0,057)	1	Tingkat pendapatan (0,550)
		2	Jenis pekerjaan informal (0,450)
5	Kependudukan (0,046)	1	Status kependudukan (0,510)
		2	Kesadaran dan kepedulian warga (0,249)
		3	Tingkat pendidikan (0,241)
6	Bahaya (0,031)	1	Kebakaran

Sumber : Hasil Analisis, 20173

4.4 Menentukan Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menghasilkan arahan dalam sasaran ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah gambaran umum dari variabel penyebab kekumuhan (hasil sasaran 1), kebijakan, dan *best practice* (jika ada). Adapun proses analisis dan arahan yang dihasilkan dapat dilihat pada **Tabel 4. 22** di bawah ini.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Tabel 4. 22 Analisis Arahan

No	Variabel	Kondisi Eksisting	Kebijakan	Best Practice	Arahan
Infrastruktur permukiman					
1	Jaringan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan PDAM belum menjangkau warga sehingga masih memanfaatkan air tanah. • Air tanah tercemar (RW 04 Ciketingudik dan RW 01, 02, 03, 04 Sumurbatu) oleh interupsi air lindih TPST. • Terdapat 5 sumur artesis di RT 02/05, 03/05 Ciketingudik dan RT 01/03, 04/03, 02/04 Sumurbatu. Dua diantaranya tidak berfungsi lagi (RT 01/03 dan 02/04 Sumurbatu). 	<ul style="list-style-type: none"> • Permen Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 46 Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar. • Permen Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 53 Pengeboran atau penggalian air tanah wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya. • Development goals Kota Bekasi dalam RPJMD 2013-2018 Perluasan cakupan pelayanan air bersih serta pengendalian pencemaran air tanah dan permukaan. 	<p>1. Penyediaan Air Bersih pada Kawasan Rawan Air Bersih di Pesisir Utara Lamongan (Noviyanti & Setiawan, 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan investasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, untuk pengembangan HIPPAM. • Membuat sumur bor air bersih, melalui pengembangan HIPPAM yang memiliki kontribusi dalam penyediaan air bersih selain PDAM. • Mengembangkan HIPPAM dengan sumber embung dan waduk penangkapan air hujan (PAH) untuk desa/kelurahan yang memiliki sumber air tanah langka, serta memanfaatkan simpanan air embung dan waduk secara efektif dan selektif untuk mengatasi kekeringan air bersih di musim kemarau. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penutupan sumur bor yang tercemar di RW 01 Sumurbatu RT 01 – 07. Penutupan dapat dilakukan dengan cor semen. b. Revitalisasi sumur artesis yang telah tidak berfungsi di RT 01/03 dan 02/04 Sumurbatu. c. Pengadaan HIPPAM di RW 04 Ciketingudik, RW 01, 03 (RT 02 dan 05), 04 Sumurbatu.
2	Fasilitas persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapatnya fasilitas persampahan seperti bak sampah di seluruh wilayah. • Sistem pengangkutan sampah tidak bekerja maksimal, tidak ada alat angkut sampah, frekuensi pengangkutan yang tidak menentu. • Sistem pengangkutan sampah hanya ada di RW 04 Ciketingudik yang dilakukan dengan swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep makro tata ruang Jabodetabek-punjur dan RTRW Kota Bekasi 2011-2031 Menuntut kebutuhan <i>green infrastructue</i> yang mempunyai dimensi waktu ke depan dan ramah lingkungan. Penanganan sampah diarahkan menggunakan pola 3R (<i>reuse, reduce, recycle</i>) dengan memaksimalkan <i>input</i> dan meminimalkan <i>output</i>. • RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 Mengolah sampah yang holistik 	<p>1. Pengelolaan Persampahan di Kota Semarang (Pandie, 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan/menambah sarana prasana pengelolaan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. • Mengadakan lomba kebersihan lingkungan yang salah satu item penilaiannya adalah kebersihan (Surat Edaran Walikota No 658.1/213 tanggal 18 Januari 2011). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan bak sampah kecil dengan volume ± 1 m3 per rumah dan bak sampah di tiap-tiap RW. b. Pengadaan sistem pengangkutan sampah dengan alat angkut berupa motor bak yang menyesuaikan dimensi jalan setempat. Pengangkutan sampah dilakukan 3x1 minggu dengan alur rumah – bak sampah RW – TPST

		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran sehingga mengolah sampah dengan pembakaran. • Pengelolaan dilakukan secara tunggal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 	<p>berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Pasgad (Pasukan Sapu Jagad) yang bertindak jika ada keluhan dari warga dan juga menyapu jalan. • Inovasi penganggaran dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (APBN). • Kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dan pihak swasta, yaitu PT Narpati Agung Karya Persada untuk mengelola sampah organik di TPA menjadi pupuk organik. 	<p>Bantargebang.</p> <p>c. Pemberian reward untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pola 3R dan meninggalkan kebiasaan membakar/menimbun sampah.</p> <p>d. Mengadakan kerjasama antara pengelola TPST (Pemerintah DKI Jakarta) dengan pihak swasta untuk mengolah sampah organik di TPST.</p>
3	Saluran air hujan/drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran drainase seluruhnya merupakan saluran terbuka dengan diameter rata-rata 20 cm – 40 cm dan kedalaman ±30 cm. • Terdapat saluran-saluran drainase yang terputus di beberapa ruas jalan sehingga menyebabkan banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 Terpenuhinya kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas dengan indikasi saluran drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. 	<p>1. Penataan Saluran Drainase di Kota Kepanjen Kabupaten Malang (Cahyono, Masrevanah, & Priyantoro, 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normalisasi • Saluran baru • Pengurangan beban • Penampang saluran ganda 	<p>a. Mengadakan saluran baru pada jaringan jalan tanpa saluran dengan sistem drainase terpadu sehingga saluran air dapat mengalirkan air dari saluran tersier ke saluran sekunder Kota Bekasi.</p> <p>b. Melakukan normalisasi berupa pelebaran diameter saluran, terutama pada RW 01 Ciketingudik dan RW 01, 05 Sumurbatu.</p>
4	Jaringan jalan	<p>Berdasarkan keterangan narasumber, Walikota Bekasi telah menerima sebanyak 40.000 unit lampu dan 10.000 unit diantaranya dialokasikan untuk Kecamatan Bantargebang. Akan tetapi, tiang lampu belum tersedia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 Mengamankan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan serta peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU). 	-	<p>a. Pengadaan tiang lampu bagi ruas-ruas jalan tanpa penerangan jalan umum (PJU).</p> <p>b. Perbaikan perkerasan jalan terutama pada wilayah dengan presentase kerusakan jalan yang tinggi, seperti pada Kelurahan Ciketingudik (RW 01, 04, 05) dan Kelurahan Sumurbatu (RW 01, 03, 05) sebagai bentuk rehabilitasi jalan.</p>

Peran pemerintah					
1	Kemampuan pemerintah menyediakan hunian layak huni	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 16 rumah yang mendapat bantuan program RUTILAHU pada tahun 2016. • Dana yang diberikan sebesar 12-15 juta per rumah. • Penerima bantuan merupakan MBR sehingga sulit menyanggupi swadaya masyarakat senilai 30% dari total kegiatan. 	Dana minimal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah sangat sederhana yang layak huni adalah Rp. 35 juta untuk tipe 36 dan Rp. 47 juta untuk tipe 45, seperti yang telah diaplikasikan pada Rumah Instant Indocement.	1. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Tanahkalikedinding, Surabaya (Andini, 2013) <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan kelembagaan UMKM • Pelatihan keterampilan usaha • Perbaikan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun <i>database</i> calon penerima bantuan berdasarkan skala prioritasnya dengan melakukan <i>scoring</i>. b. Memprioritaskan kualitas (jumlah dana bantuan) daripada kuantitas (jumlah penerima bantuan). Jika jumlah penerima dikurangi, maka dana bantuan dapat dinaikkan mencapai dana minimal yang dibutuhkan untuk membangun rumah layak huni, yaitu sebesar Rp. 35 juta/rumah. Hal tersebut dapat bersifat <i>multi-years</i>. c. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi yang berbasis ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama atau UMKM (Variabel Jenis pekerjaan Informal).
Standard pemanfaatan ruang sekitar TPA					
1	Jarak terhadap permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak permukiman terdekat dengan TPST Bantargebang adalah hanya ± 50 meter – 100 meter. • Permukiman RW 05 Kelurahan Ciketingudik dan RW 03 Kelurahan Sumurbatu berbatasan langsung dengan TPST Bantargebang, sehingga dampak bau dan pencemaran air tanah yang dirasakan lebih besar dari RW lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permen Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 46 Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar. • Permen Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 53 Pengeboran atau penggalian air tanah wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi 	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Relokasi permukiman di RW 03 (RT 01, 03, 04) Sumurbatu dan RW 05 (RT 02, 03) dan RW 04 (RT 01, 02) Ciketingudik ke wilayah yang berjarak ≥ 50 meter dari TPST. b. Pengadaan jaringan HIPPAM seperti dijelaskan pada variabel jaringan air bersih dan penanaman vegetasi (<i>green barrier</i>) sekitar area TPST Bantargebang seperti

			<p>sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Development goals Kota Bekasi dalam RPJMD 2013-2018 Perluasan cakupan pelayanan air bersih serta pengendalian pencemaran air tanah dan permukaan. • Dinas Cipta Karya Untuk mengantisipasi penyebaran bau dan populasi lalat yang tinggi, maka perlu dibuat <i>green barrier</i> berupa area pepohonan disekeliling TPA. Tebal <i>green barrier</i> kurang lebih 10 meter (canopi). Pohon yang cepat tumbuh dan rimbun untuk memenuhi kebutuhan ini antara lain jenis pohon angsa 		dijelaskan pada variabel bau.
2	Bau	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak bau yang disebabkan oleh gunung sampah di TPST Bantargebang dirasakan di sebagian besar wilayah penelitian. • Umumnya dampak bau dirasakan oleh warga sepanjang hari, akan tetapi di beberapa wilayah hanya terasa pada pagi dan sore hari ketika sampah di TPST Bantargebang sedang diaduk. Selain jarak permukiman yang berdekatan dengan TPST, • Faktor lain yang menyebabkan bau adalah arah angin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Cipta Karya Untuk mengantisipasi penyebaran bau dan populasi lalat yang tinggi, maka perlu dibuat sabuk hijau (<i>green barrier</i>) tanaman keras yang dipadukan dengan tanaman perdu terutama yang dapat menyerap racun dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> – Jenis tanaman tinggi dikombinasi dengan tanaman perdu yang mudah tumbuh dan rimbun terutama tanaman yang dapat menyerap bau – Kerapatan pohon adalah minimum 10 m. 	-	<p>Pengadaan <i>green barrier</i> di sekeliling TPST dengan penanaman vegetasi dengan kerapatan yang cukup dan tebal ≥ 10 meter di sekeliling area TPST Bantargebang. Vegetasi yang diusulkan adalah Sonokeling, Cempaka Kuning, Tanjung, Kesambi, dan Mahoni.</p>
3	Jarak terhadap badan air	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dua badan air, yaitu Kali Cileungsi yang berjarak sejauh 2,78 km dan Kali Kramat yang berjarak sejauh 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Kebutuhan Permukiman dan Fasilitas Penunjangnya Tahun 2012 Pengendalian pencemaran air 	-	<p>a. Pengadaan sumur uji untuk mengidentifikasi pencemaran air lindih TPST di permukiman sekitar.</p>

		<p>590 meter dari TPST Bantargebang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kali Kramat telah tercemar limbah yang bersumber dari TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu. 	<p>(pengendalian mutu air sungai) mengingat adanya pembuangan air limbah perkotaan yang bermuara ke sungai, tidak dibenarkan membuang sampah langsung ke sungai dan sekitarnya (dengan alasan apapun) tanpa pengolahan terlebih dahulu, serta perlu dijaga ketat untuk mencegah terjadi kemungkinan pencemaran pada sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Cipta Karya Sumur uji diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya pencemaran terhadap air tanah yang disebabkan oleh adanya rembesan lindih dari dasar TPA (dasar TPA tidak kedap, adanya retakan lapisan tanah, adanya kebocoran geomembran). 		<p>b. Pelibatan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pencemaran telah terjadi dengan sistem pelaporan jika sumur mereka telah tercemar.</p> <p>c. Pengadaan IPAL Terpadu untuk mengolah air limbah TPST Bantragebang dan industri di sekitar Bantargebang agar tidak mencemari sungai/kali.</p>
Ekonomi					
1	Tingkat pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Jenis pekerjaan warga adalah buruh dan pekerja serabutan Penghasilan harian berkisar antara Rp. 40.000 – Rp. 70.000 dan penghasilan bulanan sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.900.000. Umumnya hanya kepala keluarga yang bekerja sehingga tidak ada pemasukan lainnya. 	<p>Variabel tingkat pendapatan berkaitan erat dengan jenis pekerjaan informal. Semakin baik jenis pekerjaan, maka semakin meningkat pendapatannya. Selain itu, semakin berkurang angka pengangguran, maka dapat semakin meningkatkan taraf hidup warga.</p>	<p>1. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Tanahkalikedinding, Surabaya (Andini, 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan kelembagaan UMKM Pelatihan keterampilan usaha Perbaikan rumah 	<p>Mendukung program pemberian keterampilan dan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi berbasis ekonomi keluarga.</p>
2	Jenis pekerjaan informal	<ul style="list-style-type: none"> Mayoritas warga di wilayah penelitian bekerja sebagai buruh dan pekerja serabutan di pabrik-pabrik pengolahan sekitar dan sebagian kecil dipekerjakan di TPST. Angka pengangguran di wilayah penelitian cenderung 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Rencana Kebutuhan Permukiman dan Fasilitas Penunjangnya Tahun 2012 pendekatan Tridaya yang mencakup pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Tujuan dari program ini adalah menyiapkan masyarakat (individu maupun kelompok) dalam 		<p>a. Pemberian pelatihan bagi warga angkatan kerja, terutama pada pengangguran, terkait keterampilan yang aplikatif sehingga dapat menjadi modal mencari pekerjaan.</p> <p>b. Pemberdayaan kegiatan usaha</p>

		tinggi, yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada	<p>menyiapkan, melaksanakan dan mengelola, serta memelihara program.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Development goals Kota Bekasi dalam RPJMD 2013-2018 Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha UMKM. 		ekonomi yang berbasis ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama atau UMKM. Kegiatan usaha dapat berupa usaha pemilihan dan pengolahan sampah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki daya jual.
Kependudukan					
1	Status kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar pendatang berasal dari Indramayu, Madura, dll yang bekerja sebagai pemulung di TPST dan bertempat tinggal di bangunan-bangunan temporer di atas tanah ilegal (<i>squatter area</i>). Sementara itu, penduduk di <i>slum area</i> umumnya merupakan warga asli Bekasi. • Permukiman yang terbentuk sejak sebelum adanya TPST Bantargebang (RW 01 Ciketingudik dan RW 01, 02, 03, 04, 05 Sumurbatu) dan yang terbentuk setelahnya (RW 04 dan 05 Ciketingudik). • Status kepemilikan lahan umumnya surat girik, SPPT, dan akta jual beli tanah, sementara hanya sebagian kecil warga yang sudah memiliki sertifikat hak milik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Kebutuhan Permukiman dan Fasilitas Penunjangnya Tahun 2012 Penataan lingkungan perkotaan dengan serasi dan memperhatikan batasan daya dukung lahan, kawasan lindung, serta kebutuhan akan permukiman bagi masyarakat perkotaan yang banyak dihuni oleh pendatang / kaum migran. 	-	<p>a. Penyusunan <i>data base</i> kebutuhan permukiman bagi masyarakat pendatang dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.</p> <p>b. Mengadakan permukiman khusus bagi pendatang yang akan bekerja sebagai pemulung di TPST sehingga tidak menempati lahan ilegal dan menyebabkan visual lingkungan buruk.</p>
2	Kesadaran dan kepedulian warga	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran dan kepedulian warga masih kurang dalam menjaga kebersihan lingkungannya. • Pengolahan sampah dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Kebutuhan Permukiman dan Fasilitas Penunjangnya Tahun 2012 Pendekatan Tridaya yang mencakup pemberdayaan sosial kemasyarakatan. 	1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Propinsi Bali (Alit, 2005)	<p>a. Melakukan diskusi dengan warga untuk menentukan permasalahan yang terjadi di lingkungan permukiman.</p> <p>b. Pemberian</p>

		<p>pembakaran dan penimbunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar warga tidak memiliki pemahaman bahwa lingkungan mereka dikategorikan sebagai permukiman kumuh berat dan perlu peningkatan kualitas 	<p>Tujuan dari program ini adalah menyiapkan masyarakat (individu maupun kelompok) dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengelola serta memelihara program.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengenalan permasalahan yang dihadapi di lingkungan permukimannya, dapat memunculkan berbagai ide/gagasan yang positif. Dilakukan pendekatan peran serta masyarakat (community based approach). Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, sampai melakukan pemeliharaan agar kualitas lingkungan minimal sama atau meningkat dengan adanya partisipasi aktif dari warga masyarakat. 	<p>pendidikan/sosialisasi sejak usia dini tentang pentingnya menjaga lingkungan agar menjadi layak huni.</p>
3	Tingkat pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pendidikan rendah. Warga usia tua (kepala keluarga) umumnya hanya menempuh pendidikan formal tingkat SD menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan tetap, yang akhirnya menyebabkan tingginya angka pengangguran. Warga usia muda menempuh pendidikan hingga SMP dan SMA/SMK. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Rencana Kebutuhan Permukiman dan Fasilitas Penunjangnya Tahun 2012 Pendekatan Tridaya yang mencakup pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Tujuan dari program ini adalah menyiapkan masyarakat (individu maupun kelompok) dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengelola, serta memelihara program. RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 Peningkatan pelayanan pendidikan non formal dan kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas. 	<p>1. Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pangkalpinang (HARIYANTO, 2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dengan penambahan sarana pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal (PKBM). 	<p>a. Pemberian pelatihan bagi warga usia tua terkait keterampilan yang bersifat non-fisik, seperti administrasi pemilahan sampah.</p> <p>b. Peningkatan kualitas pendidikan bagi warga usia muda untuk setidaknya menempuh pendidikan formal setara SMA dan memiliki kemampuan/skill yang dibutuhkan oleh industri yang ada di wilayah sekitar.</p> <p>c. Pelatihan kewirausahaan bagi warga usia muda agar tercipta lapangan-lapangan pekerjaan baru.</p>
Bahaya					
1	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Kebakaran hanya pernah terjadi di dalam area TPST Bantargebang dan asap yang ditimbulkan sangat 	<ul style="list-style-type: none"> RPJMD 2013-2018 Mengarahkan untuk melakukan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 	<p>1. Mitigasi Kebakaran Berbasis Masyarakat (Fatmah, 2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan SATLAKAR / BALAKAR (Barisan 	<p>a. Pre</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelarangan membakar sampah kering di halaman rumah.

		<p>berdampak negatif di permukiman sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat peluang terjadinya kebakaran tetap ada dikarenakan kebiasaan warga mengolah sampah dengan cara dibakar dan belum terdapat hydran kebakaran. • Kota Bekasi idealnya memiliki 12 pos damkar, tetapi hanya terdapat empat damkar di Kota Bekasi, yaitu di Kantor Pemkot Bekasi, Perumahan Mutiara Gading (Kec. Mustikajaya), Jatisampurna, dan Perumnas I (Kec. Bekasi Selatan). 	<ul style="list-style-type: none"> • SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Penyediaan hydran kebakaran dapat berupa kran dengan jarak maksimum 200 meter atau jika tidak memungkinkan dapat berupa sumur-sumur/kolam kebakaran dan jarak dengan tepi jalan minimum 3 meter. Kerangka berpikir atau model dalam manajemen bencana adalah <i>Pre-During-Post Disaster Model</i> (Dwijayanti, 2011). 	<p>Sukarelawan Kebakaran) yang bertugas menjadi baroisan terdepan penanggulangan kebakaran dan memotivasi warga untuk melakukan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bahwa kini telah dibentuk organisasi Satuan Koordinator Pelaksana (Satkorlak), Satuan Koordinator Masyarakat (Satkormas), dan Satuan Dinas Masyarakat (Satdinmas) yang bertugas membantu masyarakat ketika terjadi bencana. • Penyediaan dapur umum dan air PDAM. • Penggunaan smart alarm yang terhubung langsung ke Sudin PK/DPK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan hydran kebakaran berupa kolam kebakaran karena diameter jaringan jalan yang tidak memungkinkan untuk membangun hydran berupa kran dan sumur yang berpotensi tercemar. • Pembangunan pos damkar di Kecamatan Bantargebang. • Membentuk organisasi/tim kebakaran di tingkat RW dengan keterlibatan masyarakat. Tugasnya adalah penanggulan dan pencegahan kebakaran. Mereka dapat melakukan <i>controlling</i> dan melakukan pemantauan kondisi bahaya untuk dilaporkan pada pihak berwenang/kelurahan. <p>b. During</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan awal kebakaran saat api masih kecil sampai petugas pemadam kebakaran tiba oleh organisasi/tim kebakaran. <p>c. Post</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan permukiman yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek bahaya kebakaran.
--	--	---	--	--	---

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan komparasi antara kondisi eksisting, keijakan, dan best practice pada **Tabel 4. 22** tersebut, maka dapat disimpulkan arahan tiap-tiap variabel adalah sebagai berikut.

1. Jaringan air bersih
 - a. Penutupan sumur bor yang tercemar di RW 01 Sumurbatu RT 01 – 07. Penutupan dapat dilakukan dengan cor semen.
 - b. Revitalisasi sumur artesis yang telah tidak berfungsi di RT 01/03 dan 02/04 Sumurbatu.
 - c. Pengadaan HIPPAM di RW 04 Ciketingudik, RW 01, 03 (RT 02 dan 05), 04 Sumurbatu.
2. Fasilitas persampahan
 - a. Penyediaan bak sampah kecil dengan volume ± 1 m³ per rumah dan bak sampah di tiap-tiap RW.
 - b. Pengadaan sistem pengangkutan sampah dengan alat angkut berupa motor bak yang menyesuaikan dimensi jalan setempat. Pengangkutan sampah dilakukan 3x1 minggu dengan alur rumah – bak sampah RW – TPST Bantargebang.
 - c. Pemberian reward untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pola 3R dan meninggalkan kebiasaan membakar/menimbun sampah.
 - d. Mengadakan kerjasama antara pengelola TPST (Pemerintah DKI Jakarta) dengan pihak swasta untuk mengolah sampah organik di TPST.
3. Saluran air hujan/drainase
 - a. Mengadakan saluran baru pada jaringan jalan tanpa saluran dengan sistem drainase terpadu sehingga saluran air dapat mengalirkan air dari saluran tersier ke saluran sekunder Kota Bekasi.
 - b. Melakukan normalisasi berupa pelebaran diameter saluran, terutama pada RW 01 Ciketingudik dan RW 01, 05 Sumurbatu.
4. Jaringan jalan

- a. Pengadaan tiang lampu bagi ruas-ruas jalan tanpa penerangan jalan umum (PJU).
 - b. Perbaikan perkerasan jalan terutama pada wilayah dengan presentase kerusakan jalan yang tinggi, seperti pada Kelurahan Ciketingudik (RW 01, 04, 05) dan Kelurahan Sumurbatu (RW 01, 03, 05) sebagai bentuk rehabilitasi jalan.
5. Kemampuan pemerintah menyediakan hunian layak huni
 - a. Menyusun database calon penerima bantuan berdasarkan skala prioritasnya dengan melakukan scoring.
 - b. Memprioritaskan kualitas (jumlah dana bantuan) daripada kuantitas (jumlah penerima bantuan). Jika jumlah penerima dikurangi, maka dana bantuan dapat dinaikkan mencapai dana minimal yang dibutuhkan untuk membangun rumah layak huni, yaitu sebesar Rp. 35 juta/rumah. Hal tersebut dapat bersifat multi-years.
 - c. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi yang berbasiskan ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama atau UMKM (Variabel Jenis pekerjaan Informal).
6. Jarak terhadap permukiman
 - a. Relokasi permukiman di RW 03 (RT 01, 03, 04) Sumurbatu dan RW 05 (RT 02, 03) dan RW 04 (RT 01, 02) Ciketingudik ke wilayah yang berjarak ≥ 50 meter dari TPST.
 - b. Pengadaan jaringan HIPPAM seperti dijelaskan pada variabel jaringan air bersih dan penanaman vegetasi (green barrier) sekitar area TPST Bantargebang seperti dijelaskan pada variabel bau.
7. Bau
 - a. Pengadaan green barrier di sekeliling TPST dengan penanaman vegetasi dengan kerapatan yang cukup dan tebal ≥ 10 meter di sekeliling area TPST Bantargebang.

Vegetasi yang diusulkan adalah Sonokeling, Cempaka Kuning, Tanjung, Kesambi, dan Mahoni.

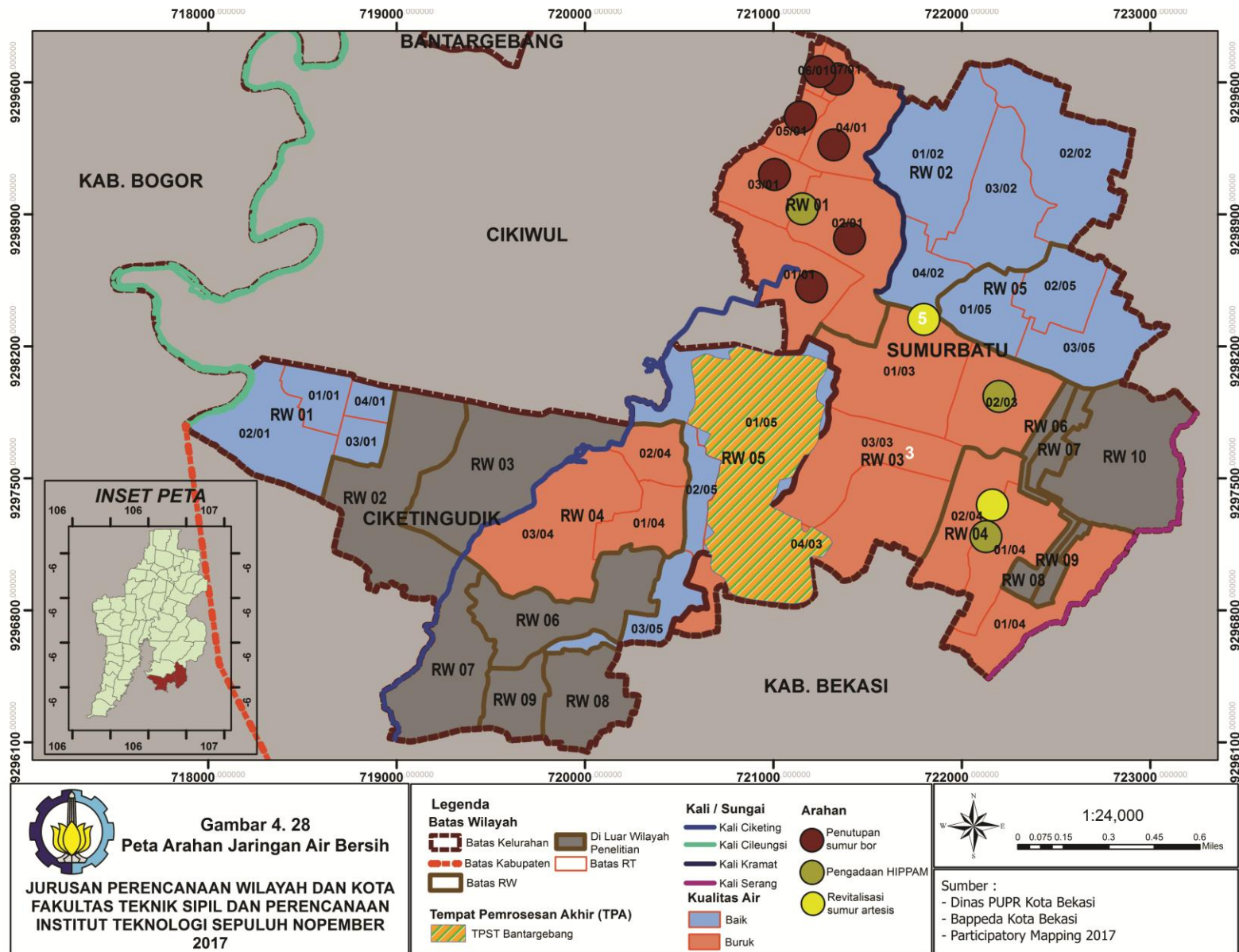
8. Jarak terhadap badan air
 - a. Pengadaan sumur uji untuk mengidentifikasi pencemaran air lindih TPST di permukiman sekitar.
 - b. Pelibatan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pencemaran telah terjadi dengan sistem pelaporan jika sumur mereka telah tercemar.
 - c. Pengadaan IPAL Terpadu untuk mengolah air limbah TPST Bantragebang dan industri di sekitar Bantargebang agar tidak mencemari sungai/kali.
9. Tingkat pendapatan
 - a. Mendukung program pemberian keterampilan dan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi berbasis ekonomi keluarga.
10. Jenis pekerjaan informal
 - a. Pemberian pelatihan bagi warga angkatan kerja, terutama pada pengangguran, terkait keterampilan yang aplikatif sehingga dapat menjadi modal mencari pekerjaan.
 - b. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi yang berbasiskan ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama atau UMKM. Kegiatan usaha dapat berupa usaha pemilihan dan pengolahan sampah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki daya jual.
11. Status kependudukan
 - a. Penyusunan data base kebutuhan permukiman bagi masyarakat pendatang dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.
 - b. Mengadakan permukiman khusus bagi pendatang yang akan bekerja sebagai pemulung di TPST sehingga tidak menempati lahan ilegal dan menyebabkan visual lingkungan buruk.
12. Kesadaran dan kepedulian warga

- a. Melakukan diskusi dengan warga untuk menentukan permasalahan yang terjadi di lingkungan permukiman.
 - b. Pemberian pendidikan/sosialisasi sejak usia dini tentang pentingnya menjaga lingkungan agar menjadi layak huni.
13. Tingkat pendidikan
- a. Pemberian pelatihan bagi warga usia tua terkait keterampilan yang bersifat non-fisik, seperti administrasi pemilahan sampah.
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan bagi warga usia muda untuk setidaknya menempuh pendidikan formal setara SMA dan memiliki kemampuan/skill yang dibutuhkan oleh industri yang ada di wilayah sekitar.
 - c. Pelatihan kewirausahaan bagi warga usia muda agar tercipta lapangan-lapangan pekerjaan baru.
14. Bahaya kebakaran
- a. Pre
 - Pelarangan membakar sampah kering di halaman rumah.
 - Pengadaan hydran kebakaran berupa kolam kebakaran karena diameter jaringan jalan yang tidak memungkinkan untuk membangun hydran berupa kran dan sumur yang berpotensi tercemar.
 - Pembangunan pos damkar di Kecamatan Bantargebang.
 - Membentuk organisasi/tim kebakaran di tingkat RW dengan keterlibatan masyarakat. Tugasnya adalah penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Mereka dapat melakukan controlling dan melakukan pemantauan kondisi bahaya untuk dilaporkan pada pihak berwenang/kelurahan.
 - b. During
 - Penanggulangan awal kebakaran saat api masih kecil sampai petugas pemadam kebakaran tiba oleh organisasi/tim kebakaran.

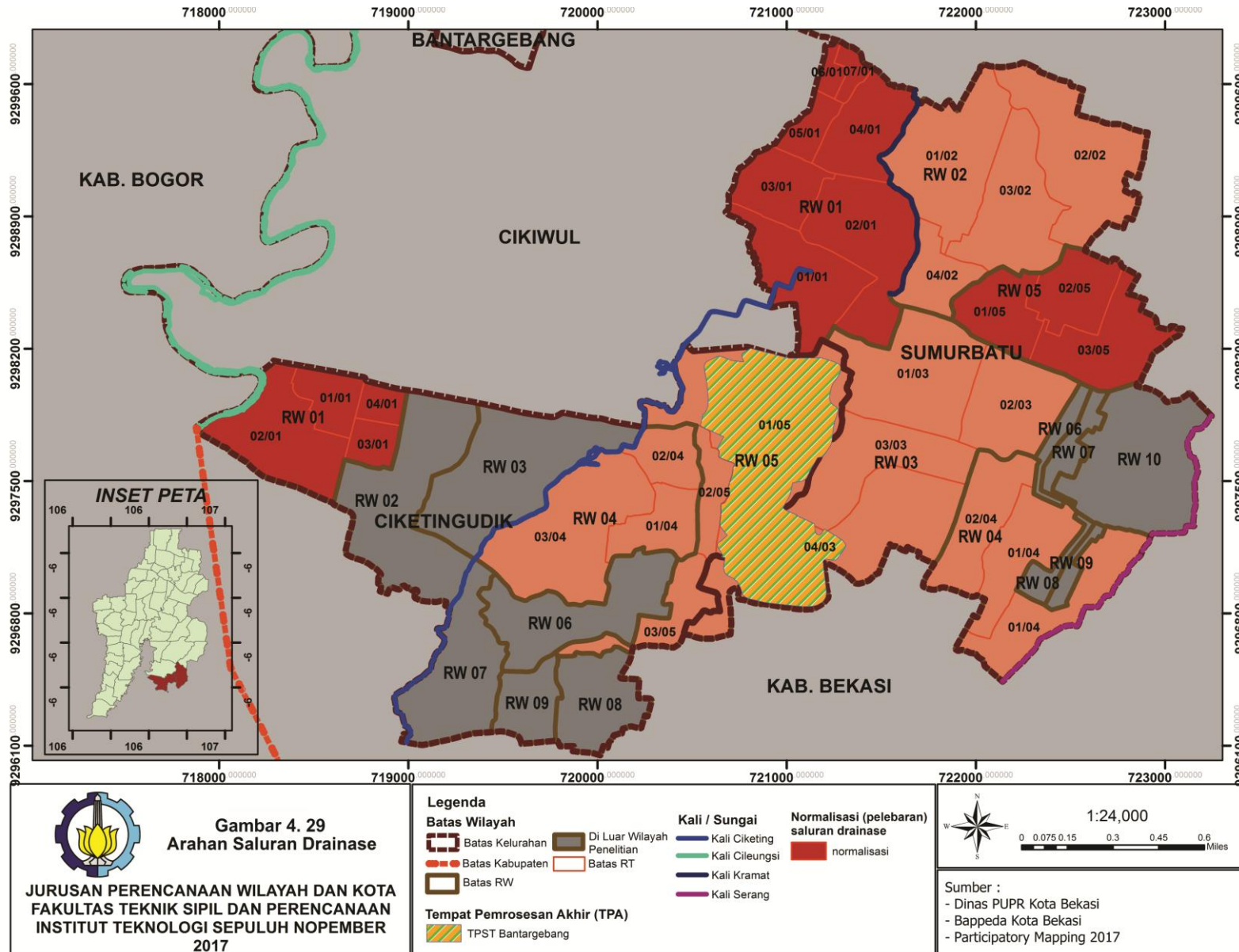
c. Post

- Penataan permukiman yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek bahaya kebakaran.

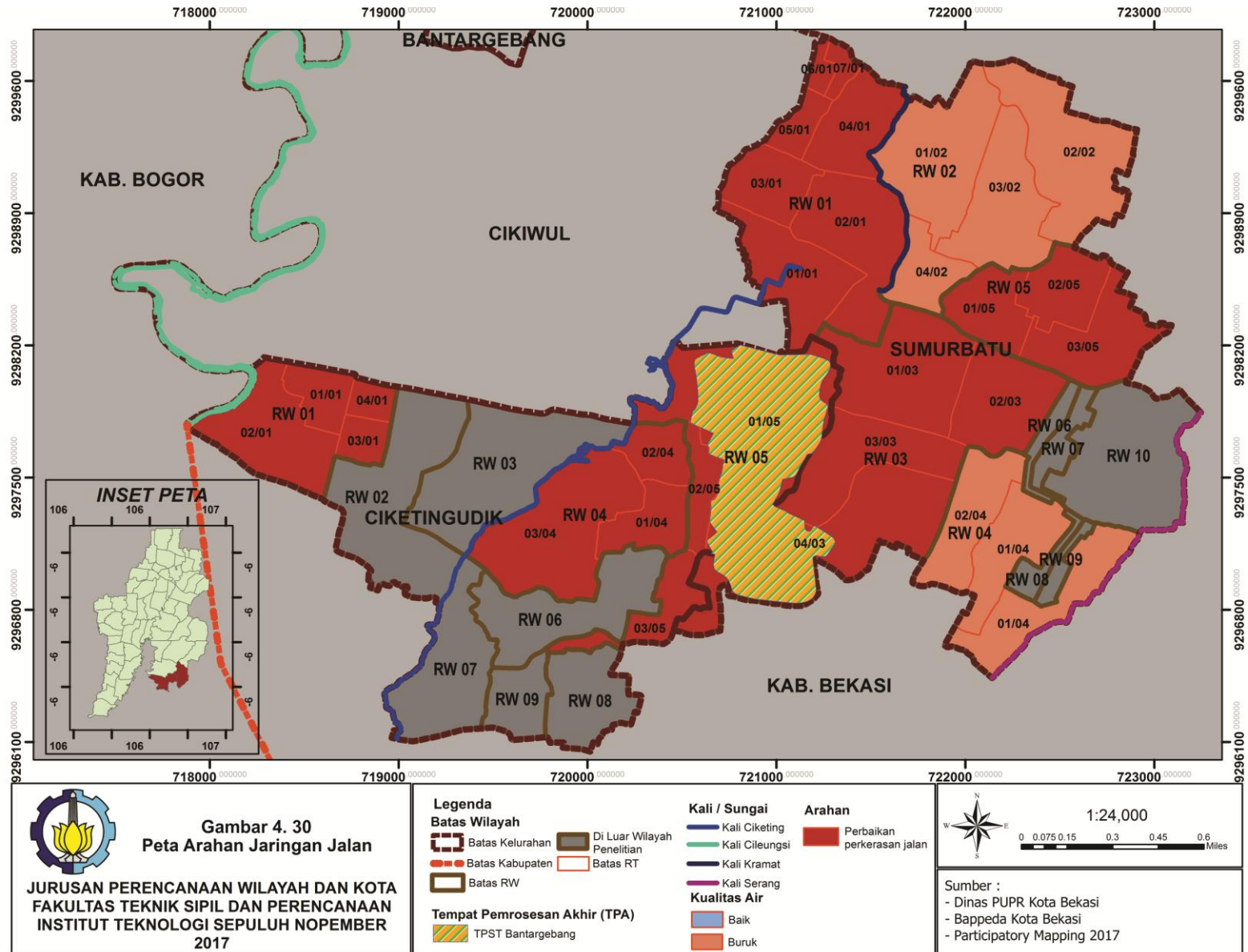
(halaman ini sengaja dikosongkan)



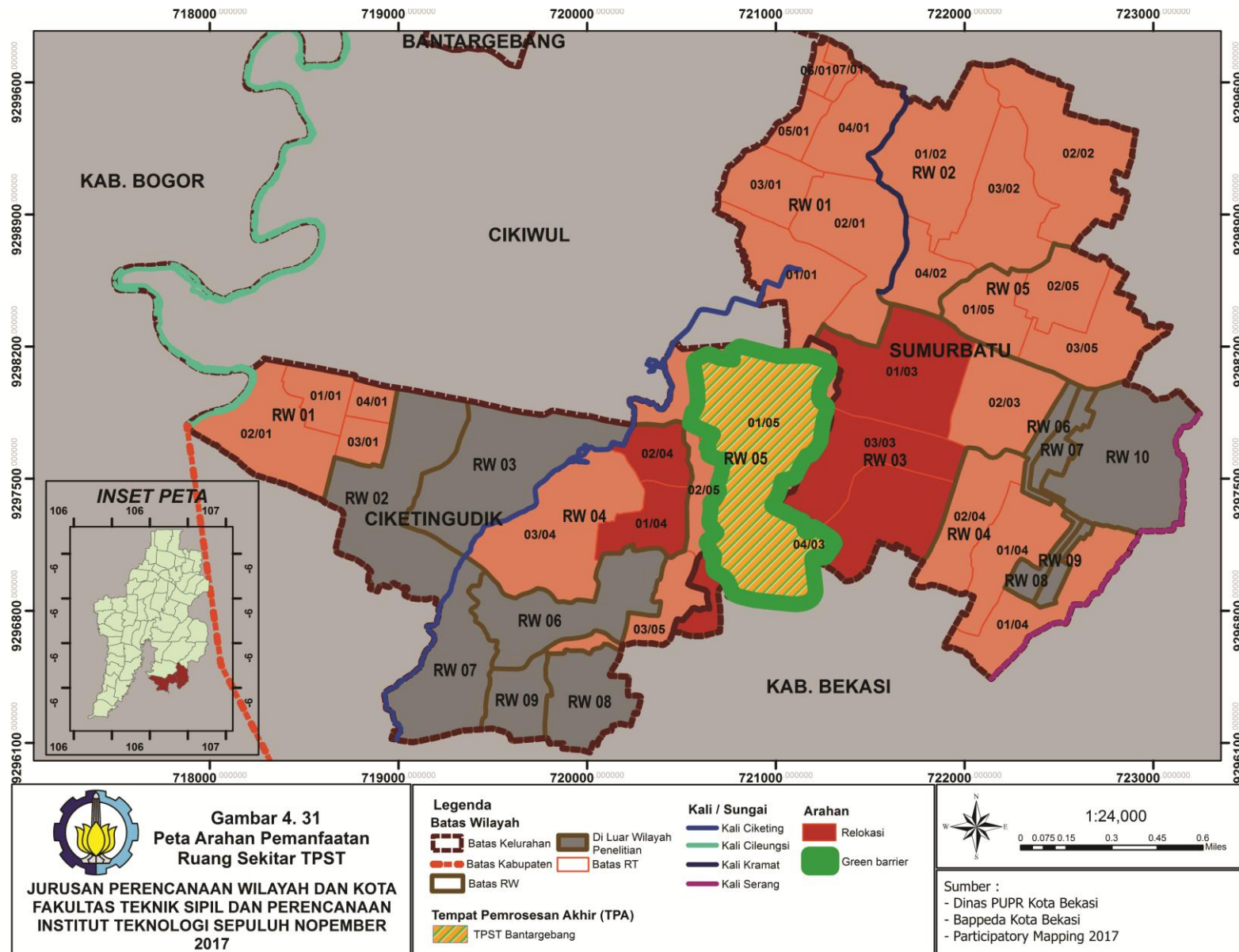
(halaman ini sengaja dikosongkan)



(halaman ini sengaja dikosongkan)



(halaman ini sengaja dikosongkan)



(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan yang dihasilkan dari proses analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi beserta prioritas peningkatannya secara berturut-turut adalah sebagai berikut : (1) infrastruktur permukiman (jaringan air bersih, persampahan, saluran drainase, jaringan jalan), (2) Peran pemerintah (kemampuan pemerintah menyediakan hunian layak), (3) Standard pemanfaatn ruang sekitar TPA (jarak terhadap permukiman, bau, jarak terhadap badan air), (4) Ekonomi (tingkat pendapatan, jenis pekerjaan), (5) Kependudukan (kesadaran dan kepedulian, tingkat pendidikan), (6) Bahaya kebakaran.
2. Prioritas tertinggi adalah peningkatan kualitas jaringan air bersih dikarenakan kondisinya yang telah mengalami pencemaran oleh air lindih TPST. Arahana yang diusulkan terkait isu tersebut adalah penutupan sumur bor yang tercemar di RW 01 Sumurbatu RT 01 – 07, revitalisasi sumur artesis yang telah tidak berfungsi di RT 01/03 dan 02/04 Sumurbatu, serta engadaan HIPPAM di RW 04 Ciketingudik, RW 01, 03 (RT 02 dan 05), 04 Sumurbatu..
3. Beberapa arahan lain dalam meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah studi adalah (a) penyediaan fasilitas dan sistem persampahan, penerangan jalan umum, green barrier, sumur uji, dan IPAL terpadu (b) perbaikan perkerasan jalan, (c) pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan (d) peningkatan peran pemerintah dalam menyediakan hunian layak huni bagi warga.

Sedangkan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Diperlukan dukungan pihak swasta melalui program CSR untuk mengatasi kekumuhan yang ada di wilayah penelitian.
- b. Diperlukan kerja sama antar daerah yang baik dalam pengelolaan TPST Bantargebang dan pemanfaatan ruang di sekitarnya.
- c. Melakukan kajian kebutuhan dan sistem jaringan PDAM di wilayah penelitian.
- d. Melakukan kajian kebutuhan perumahan berdasarkan kondisi ketersediaan lahan dan proyeksi permintaan kebutuhan akan rumah bagi masyarakat pendatang.
- e. Melakukan kajian penentuan lokasi pos damkar baru di Kecamatan Bantargebang.
- f. Melakukan kajian penataan permukiman yang mempertimbangkan aspek bahaya kebakaran.
- g. Melakukan kajian zonasi kawasan sekitar TPST Bantargebang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alit, I. K. (2005). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH DI PROPINSI BALI . *JURNAL PERMUKIMAN NATAH VOL. 3 NO.1* , 1-61.
- Andini, I. (2013). Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 36-47.
- AR, S., & Damayanti, V. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Rosda.
- Arikunto, P. D. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Armela, T., D.S., D., & Ischak, M. (2015). Pengaruh Kondisi Permukiman Terhadap Preferensi Bermukim Buruh Industri di Permukiman Tiban Kampung. *Jurnal Arsitektur*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2016). *Kecamatan Bantargebang Dalam Angka*. Bekasi: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.
- Basri, H., Ispurwono S, M.Arch, & Soemardiono, D. (2010). Model Penanganan Permukiman Kumuh Studi Kasus Permukiman Kumuh Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *Seminar nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010*.
- Boeree, D. C. (1998). *Personality Theories*.
- Bourne, L. S. (1981). *The Geography of Housing*. V.H. Winston.
- Cahyono, D. A., Masrevaniah, A., & Priyantoro, D. (2013). KAJIAN PENATAAN SALURAN DRAINASE BERDASARKAN RENCANA TATA GUNA LAHAN KOTA KEPANJEN KABUPATEN MALANG. *Jurnal Pengairan*, Vol 4, No 2.

- Chiara, J. D., & Koppelman. (1997). *Standar Perencanaan Tapak*. Jakarta: Erlangga.
- Chiara, J. D., & Koppelman. (1997). *Standar Perencanaan Tapak*. Jakarta: Erlangga.
- Darmawan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pekerjaan Umum. (1979). *Pedoman Perencanaan Lingkungan*.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum. (2006, Desember). *Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan*. Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.
- Djarwanto. (2005). *Statistik Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Dwijayanti, F. (2011, September 9). *GDL Digital Library*. Retrieved April 27, 2017, from Digilib ITB: <https://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-fajaresthy-33603>
- F, R. M. (2015). *PENGOLAHAN AIR SAMPAH DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) BANTARGEBAK BEKASI*.
- Fatmah. (2009). Model Mitigasi Kebakaran Berbasis Masyarakat : Kajian Kualitatif pada Aparat Pemerintah dan LSM. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 4, No. 3*, 99-108.
- Fauzi, A. F. (2015). *Inovasi Pemerintah Kota Bandung Dalam Program Penyelesaian Permasalahan Permukiman Kumuh*.
- Gupta, U. G., & Clarke, R. (1996). *Theory and Application of The Delphi Technique : A Bibliography (1975-1994). Technological Forecasting and Social Change*, 185-211.
- Harian Rakyat Merdeka. (2016, Agustus Rabu). *Warga Bantar Gebang Minta Pemprov DKI Alirkan Air Bersih*. Retrieved Oktober Jum'at, 2016, from RMOL.CO: <http://www.rmol.co/read/2016/08/10/256427/Warga-Bantar-Gebang-Minta-Pemprov-DKI-Alirkan-Air-Bersih>

- HARIYANTO, A. (2007). STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG SEHAT (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang). *Jurnal PWK Unisba* , 11-30.
- Herdhiansyah, D., Sutiarto, L., Purwadi, D., & Taryono. (2013). Kriteria Kualitatif Penentuan Produk Unggulan Komoditas Perkebunan dengan Metode Delphi di Kabupaten Kolaka-Sulawesi Tenggara. *Agritech, Vol. 33, No.1*, 60-69.
- Heryati. (2008). Identifikasi dan Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh Kota Gorontalo.
- Holsti, O. R. (1969). *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*. Reading: Addison-Wesley.
- Juliansah, M. H. (2010). Analisis Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- Krisnajayanti, F., & Zain, I. (2016). KAJIAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PESISIR DESA JATIREJO KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN . *Swara Bhumi*.
- Kurniasih, S. (2009). Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara-Jakarta Selatan .
- Linton, R. (1936). *The Study of Man*. New York: Appleton Press.
- Mantra, I. B. (2005). KAJIAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN PADA PERUMAHAN (SUATU KAJIAN PENDAHULUAN DI PERUMAHAN SARIJADI BANDUNG). *JURNAL PERMUKIMAN NATAH*, 1-61.
- Manurung, H. D. (2009). Optimasi Pengelolaan Lingkungan Terpadu Berkelanjutan TPST Bantargebang, Kota Bekasi.
- Marimin. (2004). *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Mizwar, A. (2012). Penentuan Lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Kota Banjarbaru Menggunakan Sistem

- Informasi Geografis (SIG). *Jurnal EnviroScientee* ISSN 1978-8096, vol. 8(1), 16-22.
- Muhadjir, N. (2002). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Rave Sarasin.
- Noviyanti, E., & Setiawan, R. (2014). PENYEDIAAN AIR BERSIH PADA KAWASAN RAWAN AIR BERSIH DI PESISIR UTARA LAMONGAN. *Tata Loka*, 116-132.
- Nusyahbani, R., & Pigawati, B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus : Kampung Gandekan Semarang). *Jurnal Teknik PWK Volume 4 nomor 2 2015*, 267-281.
- O'Donoghue, & Punch. (2003). *Qualitative Educational Research in Action*. London: RoutledgeFalmer.
- Pandie, A. (2013). Pengelolaan Persampahan dalam Mendukung Perolehan Adipura di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11-19.
- Panudju, B. (1999). *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Alumni.
- Patilima, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Pemerintah Kota Bekasi. (2014). *Situs Resmi Pemerintah Kota Bekasi*. Retrieved Oktober 20, 2016, from https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibwISX-_rPAhUcS48KHQgFAHAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fbekasikota.go.id%2Fread%2F14627%2Finformasi-laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-kota-bekasi&usg=AFQjCNES
- Prasetyo, B., & Lina, M. J. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putro, J. D. (2011). Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil Untan*.

- Raharjo, N. P. (2010). *Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus: Penghuni Rumah Tipe Kecil Griya Pagutan Indah, Mataram)*.
- Ramli, S. (2010). *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran*. In H. Djajaningrat, & R. Praptono, *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran* (pp. 165-169). Jakarta: Dian Rakyat.
- Rindarjono, M. G. (2007). *Residential Mobility di Pinggiran Kota Semarang Jawa Tengah (Studi Kasus Kaum Miskin Kota di Kota Semarang)*. 135-146.
- Rindarjono, M. G. (2012). *SLUM : Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Pustaka.
- Saaty, T., & Forman, E. (1993). *The Hierarchon – A Dictionary of Hierarchies*. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
- Sadyohutomo, M. (2008). *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salam, M. A., & noguchi, T. (2006). *Evaluating Capacity Development for Participatory Forest Management in Bangladesh's Sal Forests Based on '4Rs' Stakeholder Analysis*. *Forest Policy and Economics* 8, 785-796.
- Schroeder, R. G. (2000). *Operations Management: Contemporary Concepts*. Boston: Mc Graw-Hill Companies, Inc.
- Septiani, A. (2013). *Permukiman Kumuh Sebelum dan Setelah Berdirinya TPST Bantar Gebang*. 392-400.
- Setiadi, A. (2014). *Tipologi dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Bontang*. *Tata Loka*, 220-233.
- Sinulingga, B. (2005). *Pembangunan Kota. Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sinulingga, B. (2005). *Pembangunan Kota. Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetomo, S. (2009). *Urbanisasi & Morfologi. Proses Perkembangan Peradaban & Wadah Ruang Fisiknya*:

- Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryadi, K., & Ramadhani, A. (2000). *Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengembangan Keputusan*. Bandung: PT. Rosdakarya Offset.
- Suud, B., & Navitas, P. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. *Jurnal Teknik ITS Vol. 4 No. 1*, 33-35.
- United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). (2008). Retrieved Oktober 21, 2016, from <http://www.un-habitat.org/>:
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_3tTKmPvPAhWBOI8KHeswAQ8QFggkMAI&url=http%3A%2F%2Fjohannes.lecture.ub.ac.id%2Ffiles%2F2012%2F10%2FPERUMAHAN-BAGI-KAUM-MISKIN_PERUMAHAN-UNTUK-MBR.pdf&usg=AFQjCNFpR
- Urban Poor Consortium. (2007). *Urban Poor Consortium: Berbagi LahaUrban Poor Consortium, Berbagi Kehidupan*. Retrieved Oktober 15, 2016, from Urban Poor Consortium:
<http://www.urbanpoor.or.id/download/435/>
- Wiersma, W. (1986). *Research Methods in Education : An Introduction*. Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.
- Yudohusodo, S. (1991). *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Percetakan Bharakerta.
- Yunus, H. S. (2000). *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuriyah, A. (2010). *Arahan Penanganan Permukiman Kumuh Nelayan di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran Lamongan*. Surabaya: ITS.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 (Analisa Stakeholders)

Daftar Stakeholders dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu

Stakeholders	<i>Interest stakeholders</i> terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh	Pengaruh (<i>influence</i>) <i>stakeholders</i> terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh	Dampak program terhadap <i>interest</i> (+)(0)(-)	Kepentingan (<i>importance</i>) <i>stakeholders</i> terhadap kesesuaian program 1 = <i>Little / No Importance</i> 2 = <i>Some Importances</i> 3 = <i>Moderate Importances</i> 4 = <i>Very Importance</i> 5 = <i>Critical Player</i>	Pengaruh (<i>influence</i>) 1 = <i>Little / No Influence</i> 2 = <i>Some Influences</i> 3 = <i>Moderate Influence</i> 4 = <i>Signifikan Influence</i> 5 = <i>Very influencial</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelompok Pemerintah					
Bappeda Kota Bekasi	Memiliki kepentingan untuk menyusun, mengendalikan dan	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasi manajemen permukiman 	+	5	5

	mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	perkotaan • Terlibat di dalam perencanaan permukiman			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi	Memiliki kepentingan menjadi <i>leader</i> untuk melaksanakan penataan ruang di wilayah Kota Bekasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian	Terlibat di dalam penataan ruang di wilayah Kota Bekasi	+	5	5
Dinas Bangunan dan Permukiman	Memiliki kepentingan untuk melaksanakan urusan bidang perencanaan teknis, bidang bangunan gedung, bidang perumahan dan permukiman serta bidang pengawasan dan pengendalian	Terlibat di perencanaan teknis bidang bangunan perumahan dan permukiman	+	5	5

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Memiliki kepentingan untuk mengelola TPST Bantargebang	Memiliki pengaruh dalam peningkatan jumlah sampah masuk Kota Bekasi tiap tahunnya	+	5	5
Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu	Mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum permukiman di wilayah Kelurahan Bantargebang	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	+	5	5
Kelompok Akademisi					
Dosen Arsitektur ITS	Menguasai bidang perumahan dan permukiman	Memiliki kepentingan dalam memberikan sudut pandang keilmuan tentang perumahan dan permukiman terhadap permasalahan permukiman kumuh.	+	5	3
Kelompok Masyarakat					

Ketua RW	Mewakili kelompok masyarakat yang menghuni dan mengetahui kondisi permukiman. Kelompok ini berpengaruh sebagai <i>decision maker</i> dalam pemilihan permukiman.	Terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan permukiman	+	4	4
----------	--	---	---	---	---

Sumber : Penulis, 2016

Pemetaan Kepentingan Stakeholders

<i>Importance Of Stakeholders</i>	<i>Influence Of Activity To Stakeholders</i>				
	<i>Little/No Influence</i>	<i>Some Influences</i>	<i>Moderate Influence</i>	<i>Significant Influence</i>	<i>Very Influencial</i>
<i>Little/No Importance</i>					
<i>Some Importances</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PT Goedang Tua Jaya • PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI) 				
<i>Moderate Importance</i>					
<i>Very Importance</i>					
<i>Official Player</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Dosen Arsitektur ITS 		<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kota Bekasi • Dinas PUPR • Dinas Pembangunan dan Permukiman

					<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu • Ketua RW
--	--	--	--	--	--

Keterangan :: *Stakeholder* Kunci: *Stakeholder* Pendukung

LAMPIRAN 2 (Kuisiener Identifikasi Penyebab Permukiman Kumuh)

No	Variabel	Pertanyaan	Sumber
1	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	a. Program apa yang telah dilakukan pemerintah kota bekasi dalam menyediakan hunian yang layak? b. Bagaimana pelaksanaannya?	Bappeda Kota Bekasi
2	Keterbatasan lahan permukiman	a. Menurut Bapak/Ibu, apakah luas lahan permukiman di wilayah penelitian tidak dapat memenuhi kebutuhan warga akan tempat tinggal?	
3	Laju pertumbuhan	-	Monografi Kelurahan
4	Kepadatan penduduk	-	
5	Tingkat pendapatan	b. Berapa pendapatan Bapak/Ibu per bulannya? c. Berapakah jumlah tanggungan Bapak/Ibu? d. Apakah ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan? e. Apa saja bentuk pengeluaran rumah tangga yang Bapak/Ibu keluarkan? <ul style="list-style-type: none"> • Rumah (kontrak/sewa/pajak/perawatan) • Makan : Rp. (per hari/bulan) • Sekolah : Rp. (per hari/bulan) • Pakaian : Rp. (per hari/bulan) • Transportasi : Rp. (per hari/bulan) 	Masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> • Air bersih : Rp. (per hari/bulan) • Listrik : Rp. (per hari/bulan) • Kesehatan : Rp. (per hari/bulan) • Hiburan : Rp. (per hari/bulan) • Tabungan : Rp. (per hari/bulan) 	
6	Status kependudukan	a. Apakah Bapak/Ibu warga asli Bekasi atau pendatang? b. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di sini? c. Status kependudukan yang Bapak/Ibu miliki saat ini? d. Apa alasan Bapak/Ibu memilih bertempat tinggal di sini?	
7	Jenis pekerjaan informal	a. Apa jenis pekerjaan yang Bapak/Ibu miliki?	
8	Tingkat pendidikan	a. Apa jenjang pendidikan terakhir yang Bapak/Ibu tempuh?	
9	Jaringan air bersih	a. Darimana sumber air minum dan air bersih Anda? b. Apakah PDAM telah dapat menyalurkan air bersih ke RW ini? (<i>gambaran dalam peta – mana yg sudah/belum</i>) c. Jika belum terlayani PDAM, maka darimana sumber air bersihnya? d. Apakah terdapat sumur artesis di RW ini? (<i>tunjukkan dalam peta</i>) e. Bagaimana kualitas air bersih tersebut?	

		(keruh/berbau/berasa) f. Berapa jumlah air bersih yang Anda butuhkan per bulan (dalam liter)? g. Berapa jumlah uang yang harus Anda keluarkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih per bulan?	
10	Sanitasi lingkungan	a. Apakah terdapat MCK umum? Jika ada, dimana lokasinya? (<i>tunjukkan dalam peta</i>) b. Apakah telah tersedia <i>septic tank</i> ? Jika ada, apakah individu atau komunal? c. Apakah masih terdapat rumah tanpa MCK pribadi?	
11	Fasilitas persampahan	a. Dimana lokasi TPS? b. Dimana lokasi TPA? c. Apakah terdapat sarana persampahan (bak sampah)? d. Apakah terdapat sistem pengangkutan sampah? <ul style="list-style-type: none"> • Jika ya, apa alat angkut yang digunakan? Bagaimana frekuensi pengangkutannya? Siapa yang bertanggung jawab? • Jika tidak, bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan warga? 	
12	Saluran air hujan / drainase	a. Apakah jaringan drainase termasuk tipe tertutup atau terbuka? b. Bagaimana kondisinya? Apakah masih bercampur dengan pembuangan kotoran dan limbah? c. Apakah masih terdapat jaringan jalan tanpa saluran drainase? (<i>tunjukkan dalam peta</i>)	

13	Jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa jenis mayoritas perkerasan jalan lingkungan (paving, aspal, tanah, dll) yang ada? b. Apakah masih terdapat jaringan jalan dalam kondisi rusak? (<i>tunjukkan dalam peta</i>) c. Berapa rata-rata diameternya? d. Apakah telah terdapat lampu penerangan jalan? 	
14	Ruang terbuka	<ul style="list-style-type: none"> a. Dimana lokasi RTH (Taman, taman bermain, lapangan, makam)? b. Jika tidak ada, dimana kah umumnya anak-anak bermain atau tempat pelaksanaan kegiatan RW? c. Bagaimana kondisinya? 	
15	Bahaya banjir	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana frekuensi kejadian banjir di RW ini? b. Dimana titik banjirnya? (<i>tunjukkan dalam peta</i>) c. Apakah saluran drainase dapat menyalurkan air hujan? d. Berapa tinggi genangannya? e. Berapa lama genangannya? 	
16	Bahaya longsor	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana frekuensi kejadian longsor di RW ini? b. Dimana titik longsornya? (<i>tunjukkan dalam peta</i>) c. Apakah terdapat bangunan yang rusak? d. Apakah terdapat korban jiwa? 	
17	Bau	a. Sejauh mana dampak bau dari TPST Bantargebang terasa di RW ini? (<i>gambarkan dalam peta</i>)	
	Transportasi sampah	a. Bagaimana jalur angkut sampah di Kecamatan Bantargebang? (<i>gambarkan dalam peta</i>)	

		b. Bagaimana kondisi jaringan jalannya? (diameter dan perkerasannya) c. Apa saja moda angkut yang digunakan dan berapa volume angkutnya? d. Berapa jumlah angkutan sampah yang masuk TPST Bantargebang per harinya?	
18	Jarak terhadap permukiman	-	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
19	Jarak terhadap badan air	-	
20	Kawasan lindung	-	

LAMPIRAN 3 (Lembar Observasi)

Keterangan			
Tanggal observasi	:		
Kelurahan	:		
RW / RT	:		
Panduan Observasi			
No	Kriteria Prasarana	Checklist	Lokasi & Foto
(1)	(2)	(3)	(4)
Jaringan Jalan			
1	Perkerasan jalan		
	a. Paving		
	b. Aspal		
	c. Tanah		
	d. Berbatu		
	e. Lain-lain :		
2	Diameter jalan		
	a. > 2 meter		
	b. 2 – 4 meter		
	c. 5 – 7 meter		
	d. > 7 meter		
3	Atribut jalan		
	a. Penerangan jalan umum		
	b. <i>Pedestrian</i>		
	c. lain-lain :		
	a. Tidak ada		
	b. Ada (Komunal / Individu)		
Jaringan Drainase			
1	Ketersediaan sauran drainase		
	a. Ada		
	b. Tidak ada		
2	Tipe drainase		
	a. Terbuka		
	b. Tertutup		

3	Diameter drainase		
	a. <10 cm		
	b. 10 cm – 20 cm		
	c. >20 cm		
4	Kedalaman drainase		
	a. < 10 cm		
	b. 10 cm – 15 cm		
	c. > 15 cm		
5	Kondisi Kali Kramat		
	a. Tercemar, ket :		
	b. Tidak tercemar		
6	Kondisi Kali Ciketing		
	a. Tercemar, ket :		
	b. Tidak tercemar		
Persampahan			
1	TPS		
	a. Tidak ada		
	b. Ada, lokasi :		
2	Sarana persampahan (bak sampah, dll)		
	a. Tidak ada		
	b. Ada		
3	Kondisi jalur angkut sampah		
	a. Berdebu		
	b. Berserakan sampah		
	c. Berbau		
	d. Rapih dan bersih		
Ruang terbuka			
1	Jenis ruang terbuka :		
	Kondisi :		
	Fasilitas yang tersedia :		

LAMPIRAN 4 (Kuisisioner Delphi)

KUISISIONER WAWANCARA DELPHI

Biodata Peneliti

Nama : Anindita Wilandari
 NRP : 3613100026
 Alamat / No HP : Jalan Cikal Raya No. 218 RT 05/RW 07,
 Rawalumbu Bekasi / 081295496546
 Jurusan / institut : Perencanaan Wilayah dan Kota / Institut Teknologi
 Sepuluh Nopember
 Dosen Pembimbing : Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

Pendahuluan

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Anindita Wilandari selaku mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS Surabaya sedang melakukan penelitian yang berjudul *Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi* sebagai kelengkapan mata kuliah Tugas Akhir. Penelitian ini terkait dengan persepsi Anda sebagai *stakeholder* dalam pengidentifikasian faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Bantargebang. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Identitas Responden

Dinas/Badan/Institusi :
 Jabatan :
 No HP :

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih

jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak			
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan			
		Jenis pekerjaan informal			
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan			
		Status kependudukan			
		Kepadatan penduduk			
		Tingkat pendidikan			
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih			
		Sanitasi lingkungan			
		Fasilitas persampahan			
		Saluran air hujan / drainase			
		Jaringan jalan			
		Ruang terbuka			
		Keterbatasan lahan permukiman			
5	Bahaya	Bahaya banjir			
		Bahaya longsor			
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman			
		Jarak terhadap badan air			

		Kawasan lindung			
		Bau			
		Transportasi sampah			

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1		
2		
3		

LAMPIRAN 5 (Kuisisioner AHP)

KUISISIONER WAWANCARA AHP

Biodata Peneliti

Nama : Anindita Wilandari
NRP : 3613100026
Alamat / No HP : Jalan Cikal Raya No. 218 RT 05/RW 07, Rawalumbu Bekasi / 081295496546
Jurusan / institut : Perencanaan Wilayah dan Kota / Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Dosen Pembimbing : Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

Pendahuluan

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Anindita Wilandari selaku mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS Surabaya sedang melakukan penelitian yang berjudul ***Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi*** sebagai kelengkapan mata kuliah Tugas Akhir. Penelitian ini terkait dengan persepsi Anda sebagai *stakeholder* dalam pengidentifikasian faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Identitas Responden 1

Dinas/Badan/Institusi :
Jabatan :

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan faktor-faktor penyebab kekumuhan yang diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya. Pembobotan kriteria dibagi ke dalam 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut :

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua faktor memiliki prioritas yang sama dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan diprioritaskan dibandingkan dengan faktor lain dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.
5	Faktor jelas lebih penting dan diprioritaskan daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor

		pembandingnya dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.
7	Faktor sangat jelas lebih penting dan diprioritaskan daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.
9	Faktor mutlak lebih penting dan diprioritaskan dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam menentukan prioritas peningkatan kualitasnya karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai di bawah dan di atasnya, dimana faktor yang diberikan bila terdapat dua kompromi di antara dua pilihan.

Contoh :

Manakah yang lebih diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya dari faktor-faktor penyebab kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu di bawah ini?

Faktor/Variabel A	Pembobotan	Faktor/Variabel B
-------------------	------------	-------------------

Tata bangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kualitas bangunan
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa kualitas bangunan lebih diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya dibandingkan dengan kondisi tata bangunan. Dengan ini, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab daftar pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan persepsi Bapak/Ibu.

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.
3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.

4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.
6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak terhadap badan air, dan bau.

Faktor A	Pembobotan																	Faktor B
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya

Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Laju pertumbuhan	Jumlah pertambahan penduduk dari tahun ke tahun
2	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang
3	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
4	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Laju pertumbuhan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Status kependudukan

Laju pertumbuhan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Laju pertumbuhan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Kesadaran dan kepedulian warga	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan

		jalan
--	--	-------

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Ketersediaan dan luas daerah penyangga dalam m ²

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

LAMPIRAN 6 (Hasil Kuisisioner Delphi Putaran 1)

KUISISIONER WAWANCARA DELPHI

Biodata Peneliti

Nama : Anindita Wilandari
NRP : 3613100026
Alamat / No HP : Jalan Cikal Raya No. 218 RT 05/RW 07, Rawalumbu Bekasi / 081295496546
Jurusan / institut : Perencanaan Wilayah dan Kota / Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Dosen Pembimbing : Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

Pendahuluan

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Anindita Wilandari selaku mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS Surabaya sedang melakukan penelitian yang berjudul ***Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi*** sebagai kelengkapan mata kuliah Tugas Akhir. Penelitian ini terkait dengan persepsi Anda sebagai *stakeholder* dalam pengidentifikasian faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Bantargebang. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Identitas Responden 1

Dinas/Badan/Institusi : Bappeda Kota Bekasi
 Jabatan : Kasubid PUPR dan Perhubungan

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Masih mementingkan kuantitas dalam pelaksanaannya, terutama program RUTILAHU yang disebutkan tadi.
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan	√		Sesuai yang disebutkan, penghasilan warga masih rendah.
		Jenis pekerjaan informal	√		Penghasilan sebesar UMR hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak cukup untuk memperbaiki hunian.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan	√		Angka jumlah penduduk berpengaruh

					terhadap kepadatan penduduk.
		Status kependudukan	√		Sangat berpengaruh mengingat banyaknya penduduk masuk Kecamatan Bantargebang untuk bekerja (informal).
		Kepadatan penduduk	√		Semakin padat suatu permukiman menyebabkan semakin kumuh permukiman tersebut.
		Tingkat pendidikan	√		Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan dan penghasilan. Jika rendah, maka menyebabkan kemiskinan yang berujung pada kekumuhan.
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	√		Setuju karena air tanah telah tercemar.
		Sanitasi lingkungan	√		Ketersediaan MCK pribadi perlu, jika masih ada hunian tanpa MCK pribadi maka hal tersebut menyebabkan kumuh.
		Fasilitas persampahan	√		Tidak tersedianya pengangkutan sampah menyebabkan kumuh karena sampah-sampah didiamkan di lingkungan sekitar.
		Saluran air hujan / drainase	√		Saluran drainase sangat penting ketika terjadi hujan, sementara saluran

					drainase di wilayah tersebut terputus.
		Jaringan jalan		√	Jaringan jalan sudah dalam kondisi baik. Penerangan jalan belum maksimal, tetapi tidak terlalu berpengaruh negatif.
		Ruang terbuka		√	Ruang terbuka seperti yang disebutkan tidak terlalu dibutuhkan, yang terpenting wilayah telah diberi penghijauan (RTH).
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Ketersediaan permukiman sudah cukup, bahkan masih terdapat lahan-lahan yang berpotensi untuk permukiman.
5	Bahaya	Bahaya banjir		√	Karena tidak pernah terjadi banjir yang signifikan.
		Bahaya longsor		√	Karena tidak pernah terjadi longsor sama sekali.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Jarak terlalu dekat sehingga dampak sangat terasa.
		Jarak terhadap badan air	√		Jarak mungkin terlalu dekat sehingga kali tercemar.
		Kawasan lindung		√	Seperti yang disebutkan, bahwa letaknya tidak di kawasan lindung sehingga tidak masalah.

		Bau	√		Bau sangat mengganggu, terutama terhadap kesehatan warga.
		Transportasi sampah	√		Sampah dan air licit rawan berjatuhan di jalan jika truk tanpa penutup (tidak sesuai standard).

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1	-	-
2		
3		

Identitas Responden 2

Dinas/Badan/Institusi : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Permukiman

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak		√	Program pemerintah hanya bersifat stimulan sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat juga.
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan	√		Penghasilan rendah menyebabkan tidak mampu untuk memperbaiki lingkungan.
		Jenis pekerjaan informal	√		Pekerjaan yang tidak tetap merupakan penyebabnya.

3	Kependudukan	Laju pertumbuhan	√		Laju pertumbuhan yang meningkat menyebabkan pemadatan hunian.
		Status kependudukan	√		Pemulung yang terus menerus datang dan membangun gubuk memberikan <i>image</i> kumuh.
		Kepadatan penduduk	√		Kepadatan penduduk dalam satu hunian juga merupakan penyebab kumuh.
		Tingkat pendidikan		√	Yang lebih tepat adalah keterampilan yang dimiliki yang menyesuaikan kebutuhan industri sekitar.
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	√		Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika tidak dapat terpenuhi, maka orang tersebut hidup dalam kekumuhan.
		Sanitasi lingkungan	√		Air limbah seharusnya tidak dibuang di kolam, akan tetapi harus difiltrasi terlebih dahulu.
		Fasilitas persampahan	√		Pengangkutan sampah yang teratur merupakan suatu kebutuhan.
		Saluran air hujan / drainase	√		Fungsi saluran drainase sangat penting sehingga harus dipenuhi.
		Jaringan jalan	√		Jaringan jalan merupakan penghubung sehingga harus dalam kondisi yang

					baik dan layak.
		Ruang terbuka		√	Ketersediaan taman bukanlah hal yang <i>urgent</i> .
		Keterbatasan lahan permukiman	√		Keterbatasan tersebut menyebabkan kepadatan, lalu kekumuhan.
5	Bahaya	Bahaya banjir		√	Tidak menyebabkan kumuh karena tidak pernah terjadi.
		Bahaya longsor		√	Tidak menyebabkan kumuh karena tidak pernah terjadi.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Jarak yang terlalu dekat tidak baik untuk warga permukiman tersebut.
		Jarak terhadap badan air	√		Walaupun jaraknya sudah sesuai aturan yang ada, akan tetapi jika masih terjadi pencemaran, maka hal tersebut menyebabkan kumuh.
		Kawasan lindung		√	Sesuai data, tidak pada kawasan lindung.
		Bau	√		Bau mendatangkan lalat yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan memberikan kesan kumuh.
		Transportasi sampah	√		Muatan truk dapat merusak jalan.

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1	Ketersediaan hydran	Penting untuk pertolongan kebakaran
2	Kesadaran dan kepedulian warga	Kepedulian warga terhadap permukimannya penting dalam menjaga lingkungan tetap baik.
3		

Identitas Responden 3

Dinas/Badan/Institusi : UPST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 Jabatan : Kepala Sub Bagian TU

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Adanya permukiman kumuh menandakan bahwa peran pemerintah setempat masih belum maksimal.
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan	√		Seperti data yang disajikan, tingkat pendapatan masih rendah sehingga tidak dapat memiliki hunian yang layak huni.
		Jenis pekerjaan informal	√		Seperti data yang disajikan, pekerjaan

					dan penghasilan warga tidak mencukupi untuk memperbaiki hunian mereka menjadi layak huni.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan	√		Seperti data yang disajikan, laju pertumbuhan di beberapa RW meningkat dan berpotensi untuk menjadi tujuan tinggal bagi warga di RW-RW yang posisinya lebih berdekatan dengan TPST.
		Status kependudukan	√		Seperti data yang disajikan, status kependudukan di wilayah tersebut tinggi tanpa didukung oleh kemampuan pendatang untuk memiliki hunian yang layak.
		Kepadatan penduduk	√		Seperti data yang disajikan, kepadatan penduduk memang tidak tinggi akan tetapi perlu diperhatikan di masa depannya.
		Tingkat pendidikan	√		Seperti data yang disajikan, masih sedikit warga yang menempuh jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	√		Seperti data yang disajikan, sumber air bersih warga tercemar sehingga masih menggunakan air tercemar tersebut

					untuk keperluan sehari-hari.
		Sanitasi lingkungan	√		Seperti data yang disajikan, MCK komunal sangat diperlukan sumber airnya, tetapi masih terdapat MCK komunal yang sudah rusak.
		Fasilitas persampahan	√		Seperti data yang disajikan, sampah-sampah yang tidak terangkut menyebabkan kesan kumuh.
		Saluran air hujan / drainase	√		Seperti data yang disajikan, saluran drainase masih belum 100% tersedia.
		Jaringan jalan	√		Seperti data yang disajikan, masih terdapat banyak jalan rusak sehingga tidak layak.
		Ruang terbuka		√	Ruang terbuka hijau di kawasan TPST sudah tercukupi.
		Keterbatasan lahan permukiman	√		Jika kebutuhan permukiman tidak dapat dicukupi, maka kepadatan dan kekumuhan akan terjadi.
5	Bahaya	Bahaya banjir		√	Tidak pernah terjadi.
		Bahaya longsor		√	Tidak pernah terjadi.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Jarak permukiman yang berdekatan dengan TPST menyebabkan kekumuhan, akan tetapi TPST dibangun lebih dahulu (1989), sehingga

					seharusnya permukiman yang menyesuaikan jaraknya.
		Jarak terhadap badan air	√		Jarak sudah sesuai, tetapi tingkat interupsi air lindih sangat tinggi.
		Kawasan lindung		√	Karena tidak dibangun pada kawasan lindung.
		Bau		√	Bau tergantung pada arah angin dan semakin lama akan semakin terbiasa.
		Transportasi sampah	√		Jalur transportasi sampah sempat bermasalah ketika dikelola oleh pihak swasta.

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1	-	-
2		
3		

Identitas Responden 4

Dinas/Badan/Institusi : Dinas PUPR Kota Bekasi
 Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pengolahan Data

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak		√	Keterbatasan dana yang diberikan merupakan penyebabnya
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan	√		Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan kemiskinan.
		Jenis pekerjaan informal	√		Jenis pekerjaan sebagai pekerja

					informal menghasilkan pendapatan rendah yang identik dengan kemiskinan.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan	√		Laju pertumbuhan umumnya disebabkan penduduk yang datang ke wilayah tersebut dan menyebabkan kepadatan baik penduduk maupun bangunan.
		Status kependudukan	√		Status kependudukan pemulung-pemulung tersebut jika tidak dikendalikan akan berbahaya.
		Kepadatan penduduk	√		Kepadatan penduduk menyebabkan kepadatan bangunan sehingga memberikan citra kumuh suatu kota.
		Tingkat pendidikan	√		Pendidikan merupakan bekal dasar. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mendapatkan kesempatan lebih terhadap dunia kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	√		Pencemaran sumur warga merupakan penyebabnya.
		Sanitasi lingkungan	√		Penyaringan limbah domestik perlu diadakan sehingga tidak diuang di kolam-kolam.

		Fasilitas persampahan	√		Sistem pengangkutan sampah sangat diperlukan.
		Saluran air hujan / drainase	√		Saluran drainase tidak boleh terputus sehingga air dapat mengalir.
		Jaringan jalan	√		Jaringan jalan yang rusak merupakan penyebabnya.
		Ruang terbuka		√	Lebih diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, bukan pengadaan ruang terbuka.
		Keterbatasan lahan permukiman	√		Ketersediaan lahan permukiman harus dapat mengantisipasi jumlah penduduk yang datang untuk bermukim.
5	Bahaya	Bahaya banjir		√	Tidak pernah terjadi.
		Bahaya longsor		√	Tidak pernah terjadi.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Semakin dekat jaraknya, kekumuhan semakin tinggi dan <i>urgent</i> untuk diatasi.
		Jarak terhadap badan air	√		Yang terpenting adalah tidak tercemar, bukan soal jaraknya.
		Kawasan lindung		√	Tidak masalah karena tidak dibangun pada lahan kawasan lindung.
		Bau	√		Bau sangat menyebabkan kumuh karena mendatangkan penyakit.
		Transportasi sampah	√		Jalur yang dilewati angkutan sampah

					menjadi kotor dan bau sehingga merugikan sekitarnya.
--	--	--	--	--	--

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1	Kesadaran masyarakat	Perilaku masyarakat
2		

Identitas Responden 5

Dinas/Badan/Institusi : Kelurahan Ciketingudik

Jabatan : Lurah Ciketingudik

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Bantuan RUTILAHU pemerintah terlalu kecil (nominalnya) sehingga warga miskin masih kesulitan untuk menutupi kekurangannya.
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan	√		Masih banyak warga dengan tingkat pendapatan di bawah UMR.
		Jenis pekerjaan informal	√		Masih banyak warga dengan pekerjaan yang tidak tetap.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Laju pertumbuhan cenderung menurun sehingga tidak masalah.
		Status kependudukan	√		Mayoritas warga datang ke sini untuk menjadi pemulung dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah.

		Kepadatan penduduk	√		Kepadatan penduduk berpusat di beberapa titik saja.
		Tingkat pendidikan		√	Tingkat pendidikan warga sudah baik, yaitu rata-rata telah menempuh SMA/SMK.
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	√		Belum terlayani PDAM dan sumur artesis (hanya sebagian).
		Sanitasi lingkungan	√		Belum ada penyaringan limbah rumah tangga.
		Fasilitas persampahan	√		Pemerintah belum dapat menyediakan tempat sampah bagi tiap-tiap rumah.
		Saluran air hujan / drainase	√		Masih terdapat saluran yang terputus, terutama di jalan-jalan lingkungan.
		Jaringan jalan		√	Tidak ada masalah, bahkan sudah tidak ada jalan tanah di sini.
		Ruang terbuka		√	Sudah ada rencana pembangunan taman di depan kantor kelurahan.
		Keterbatasan lahan permukiman	√		Tidak banyak pengembang yang berminat membangun permukiman di sini.
5	Bahaya	Bahaya banjir		√	Tidak pernah terjadi.
		Bahaya longsor		√	Tidak pernah terjadi.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman		√	Tidak ada masalah selama warga tidak keberatan.

	Jarak terhadap badan air	√		Masih terjadi pencemaran di Kali Kramat.
	Kawasan lindung		√	Tidak masalah selama tidak di kawasan lindung
	Bau	√		Bau yang disebabkan TPST sangat mengganggu warga.
	Transportasi sampah		√	Setelah dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta telah membaik.

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1	Kesadaran dalam menjaga K3	Seluruhnya berawal dari kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, sehingga dapat membantu mendukung program pemerintah setempat.
2		
3		

Identitas Responden 6

Dinas/Badan/Institusi : Kelurahan Sumurbatu
 Jabatan : Sekretaris Lurah Sumurbatu

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Masih banyak rumah tidak layak huni.
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan	√		Tingkat pendapatan masih rendah, paling tinggi hanya sebatas UMR.
		Jenis pekerjaan informal		√	Sudah banyak yang bekerja di pabrik-pabrik dan beberapa dipekerjakan di TPST dan TPA.

3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Karena laju pertumbuhan menurun.
		Status kependudukan	√		Masalah terbesar di sini adalah pendatang yang hanya bertujuan untuk menjadi pemulung di TPST.
		Kepadatan penduduk	√		Kepadatan penduduk tidak masalah karena tingkat rendah.
		Tingkat pendidikan	√		Pendidikan warga sudah baik, yaitu mencapai SMK, dan sebagian kecil perguruan tinggi di luar daerah.
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	√		Warga berhak mendapat air yang tidak tercemar, tetapi beberapa diantaranya masih belum mendapatkan haknya.
		Sanitasi lingkungan		√	Sudah disediakan/dibangun beberapa titik MCK umum oleh Kodim dan Pemerintah DKI Jakarta.
		Fasilitas persampahan	√		Belum ada bantuan tempat sampah dan sistem angkutnya.
		Saluran air hujan / drainase		√	Walaupun terdapat saluran yang terputus, tapi tidak menyebabkan banjir yang signifikan karena letak geografisnya lebih tinggi.
		Jaringan jalan		√	Jaringan jalan sudah bagus. Sudah dapat mendapat bantuan 10.000 lampu untuk Kecamatan Bantargebang, akan

					tetapi belum disediakan tiang lampunya.
		Ruang terbuka		√	Tidak terlalu dibutuhkan warga.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Masih terdapat banyak lahan-lahan kosong yang belum dipergunakan.
5	Bahaya	Bahaya banjir		√	Banjir hanya menggenang hingga hujan selesai, tidak pernah terjadi banjir parah.
		Bahaya longsor		√	Tidak pernah terjadi longsor.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Permukiman yang terlalu dekat TPST sangat rawan terhadap dampak bau dan dampak asap kebakaran di area TPST.
		Jarak terhadap badan air	√		Kali Asem dan Kali Kramat masih tercemar, bau dan berwarna hitam.
		Kawasan lindung		√	Selama tidak pada kawasan lindung tidak masalah.
		Bau	√		Warga yang sudah terbiasa hidup dekat TPST pun masih merasa terganggu dengan baunya.
		Transportasi sampah	√		Terkadang masih ada truk-truk sampah yang kurang sesuai standard (tanpa penutup/jaring) sehingga sampah berjatuhan.

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1	-	-
2		

Identitas Responden 7

Dinas/Badan/Institusi : Masyarakat
Jabatan : Ketua RW 05 Ciketingudik

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Seharusnya ditingkatkan jumlah penerimanya.
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan	√		Karena masih banyak warga saya yang dalam kategori keluarga miskin.
		Jenis pekerjaan informal	√		Karena pekerjaannya hanya buruh dan beberapa tidak tetap.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Karena laju pertumbuhan tidak besar sesuai data yang ada.
		Status kependudukan	√		Yang menyebabkan kumuh adalah kedatangan para pemulung.
		Kepadatan penduduk		√	Karena kepadatan penduduk hanya tinggi di permukiman pemulung (<i>squatter</i>).
		Tingkat pendidikan	√		Belum terdapat perguruan tinggi di wilayah ini yang menyebabkan warga harus menyediakan biaya lebih untuk kuliah.
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	√		Karena masih ada warga saya yang belum terlayani sumur artesis.

		Sanitasi lingkungan	√		Karena MCK umum dibutuhkan untuk mengambil air bersihnya.
		Fasilitas persampahan	√		Karena sampah masih dibakar dan ditimbun tanah.
		Saluran air hujan / drainase		√	Karena tidak menyebabkan banjir yang lama.
		Jaringan jalan		√	Karena jalan masih dapat dilalui kendaraan.
		Ruang terbuka		√	Karena tidak terlalu membutuhkan taman, anak-anak dapat bermain di jalanan / halaman mesjid / halaman rumah warga.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Karena masih banyak lahan yang belum digunakan pemiliknya / dijual.
5	Bahaya	Bahaya banjir		√	Banjir hanya menggenang sebentar saja.
		Bahaya longsor		√	Tidak pernah longsor di permukiman, hanya di area TPST.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Dampak buruk TPST sangat terasa.
		Jarak terhadap badan air	√		Air kali menjadi hitam dan bau.
		Kawasan lindung		√	Karena tidak dibangun di kawasan lindung sesuai data yang ada.
		Bau	√		Sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di

					sini tapi masih terasa bau dan mengganggu, terutama apabila sampah sedang diaduk (pagi dan sore).
		Transportasi sampah	√		Hanya lewat jalan besar akan tetapi menyebabkan debu.

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1	-	-
2		
3		

Identitas Responden 8

Dinas/Badan/Institusi : Masyarakat
Jabatan : Ketua RW 03 Sumurbatu

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Jumlah penerima dan jumlah dananya harus diperbanyak lagi.
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan	√		Tingkat pendapatan masih di bawah rata-rata sehingga sulit memperbaiki rumah yang tidak layak.
		Jenis pekerjaan informal		√	Pihak RW dapat membantu warga yang menginginkan pekerjaan di pabrik

					sekitar, akan tetapi tergantung pada <i>skill</i> warga tersebut.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan	√		Laju pertumbuhan dikarenakan warga dari luar Bekasi yang berdatangan.
		Status kependudukan	√		Didominasi oleh warga dari Jawa Barat.
		Kepadatan penduduk		√	Tidak terlalu padat penduduk.
		Tingkat pendidikan	√		Warga usia tua yang merupakan kepala keluarga mayoritas hanya lulusan SD sehingga hanya bisa menjadi buruh.
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	√		Karena masih ada warga yang menggunakan air yang tercemar.
		Sanitasi lingkungan	√		Karena MCK yang ada sudah rusak dan tidak pernah diperbaiki.
		Fasilitas persampahan		√	Karena masing-masing rumah punya halaman yang cukup untuk membakar/menimbun sampah.
		Saluran air hujan / drainase	√		Terdapat jalan tanpa saluran.
		Jaringan jalan	√		Jalan yang ada memiliki diameter yang kecil sehingga tidak dapat dilalui mobil.
		Ruang terbuka		√	Tidak berpengaruh bagi saya dan warga.

		Keterbatasan lahan permukiman		√	Lahan permukiman masih banyak tersedia.
5	Bahaya	Bahaya banjir		√	Banjir hanya menggenang sebentar hingga hujan berhenti.
		Bahaya longsor		√	Longsor tidak pernah terjadi di sini.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Merasa terganggu karena terlalu dekat, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa.
		Jarak terhadap badan air	√		Kali yang ada sudah tercemar.
		Kawasan lindung		√	Tidak di dalam kawasan lindung.
		Bau	√		Belum bisa terbiasa dengan baunya sehingga sangat mengganggu.
		Transportasi sampah		√	Tidak masalah karena sudah lebih baik dari sebelumnya.

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1	-	-

2		
3		

Identitas Responden 9

Dinas/Badan/Institusi : Jurusan Arsitektur ITS
 Jabatan : Dosen

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. BAGIAN 1

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Ketika masih terdapat permukiman kumuh, maka peran pemerintah belum maksimal dalam memberantasnya dan harus segera merumuskan kebijakan

					yang tepat.
2	Ekonomi	Tingkat pendapatan	√		Kemiskinan merupakan penyebab kekumuhan, baik fisik lingkungan maupun mental kumuh.
		Jenis pekerjaan informal	√		Berhubungan dengan pendapatan dan kemiskinan.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan	√		Data menunjukkan laju pertumbuhan menurun, akan tetapi perlu diantisipasi laju pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang yang berpotensi meningkat.
		Status kependudukan	√		Karena pendatang yang masuk tidak memiliki latar belakang kemampuan yang cukup.
		Kepadatan penduduk	√		Sama seperti laju pertumbuhan.
		Tingkat pendidikan	√		Tingkat pendidikan harus berbanding lurus dengan <i>skill</i> . <i>Skill</i> yang dimiliki juga harus sesuai kebutuhan.
4	Infrastruktur permukiman	Jaringan air bersih	√		Karena masih ada pencemaran.
		Sanitasi lingkungan	√		Karena masih terdapat rumah tanpa MCK pribadi.
		Fasilitas persampahan	√		Karena sampah masih diolah dengan dibakar swadaya, tidak diangkut ke TPS/TPA.
		Saluran air hujan /	√		Karena masih terdapat saluran drainase

		drainase			yang terputus dan presentasinya besar.
		Jaringan jalan	√		Karena masih terdapat jalan tanah yang membahayakan jika terjadi hujan dan juga penerangannya minim.
		Ruang terbuka		√	Ruang terbuka tidak hanya dipandang sebagai taman (RTH). Jika di wilayah ini telah terdapat ruang-ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat kapan pun (RTNH), maka tidak menjadi masalah.
		Keterbatasan lahan permukiman	√		Jika tidak tersedia lahan permukiman, warga cenderung untuk memanfaatkan lahan yang masih kosong (walaupun ilegal) dan membangun hunian yang padat.
5	Bahaya	Bahaya banjir		√	Bahaya banjir tidak terlalu signifikan di permukiman kumuh, terlebih lagi wilayah ini terletak lebih tinggi dari wilayah sekitarnya.
		Bahaya longsor		√	Kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi longsor.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Permukiman harus dibangun sesuai jarak standard yang ada, karena jika tidak sesuai (terlalu dekat) maka

					semakin besar dampak negatif yang akan dirasakan.
		Jarak terhadap badan air	√		Aturan (standard jarak minimal) harus diacu, akan tetapi jika aturan tersebut tidak dapat menjadi solusi/pencegah (badan air masih tercemar), maka aturan tersebut harus direvisi.
		Kawasan lindung		√	Selama tidak mengubah fungsi kawasan lindung dan tidak dibangun di situ, maka tidak berpengaruh.
		Bau	√		Bau menyebabkan kualitas udara menurun dan berpengaruh pada pelapukan bangunan, serta menurunkan kualitas kesehatan warga.
		Transportasi sampah	√		Perlu ditinjau muatan tiap truk, jumlah truk masuk per harinya, dan juga kepadatan lalu lintas yang ditimbulkan.

B. BAGIAN 2

Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu, Bekasi? Berikan alasan Bapak/Ibu menambahkan faktor tersebut!

No	Faktor	Alasan
1	Infrastruktur : listrik	Karena umumnya PLN akan melayani seluruh permukiman, baik legal maupun ilegal (berbeda dengan PDAM), sehingga perlu dibenahi.
2	Bahaya : kebakaran	Bahaya yang umumnya terjadi di permukiman kumuh adalah kebakaran, bukan longsor.

LAMPIRAN 7 (Hasil Kuisioner Delphi Putaran 2)

KUISIONER WAWANCARA DELPHI

Biodata Peneliti

Nama : Anindita Wilandari
 NRP : 3613100026
 Alamat / No HP : Jalan Cikal Raya No. 218 RT 05/RW 07, Rawalumbu Bekasi / 081295496546
 Jurusan / institut : Perencanaan Wilayah dan Kota / Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 Dosen Pembimbing : Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

Pendahuluan

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Anindita Wilandari selaku mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS Surabaya sedang melakukan penelitian yang berjudul ***Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi*** sebagai kelengkapan mata kuliah Tugas Akhir. Penelitian ini terkait dengan persepsi Anda sebagai *stakeholder* dalam pengidentifikasian faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Bantargebang. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Identitas Responden 1

Dinas/Badan/Institusi : Bappeda Kota Bekasi
Jabatan : Kasubid PUPR dan Perhubungan

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Masih mementingkan kuantitas dalam pelaksanaannya, terutama program RUTILAHU yang disebutkan tadi.
2	Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	√		Penghasilan sebesar UMR hanya cukup

					untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak cukup untuk memperbaiki hunian.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Karena sesuai data yang ada, sebagian besar laju pertumbuhan menurun.
		Kepadatan penduduk		√	Karena sesuai data yang ada, kepadatan penduduk adalah rendah.
		Tingkat pendidikan	√		Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan dan penghasilan. Jika rendah, maka menyebabkan kemiskinan yang berujung pada kekumuhan.
		Kesadaran dan kepedulian warga	√		Karena kesadaran dalam menjaga lingkungan diperlukan.
4	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan	√		Ketersediaan MCK pribadi perlu, jika masih ada hunian tanpa MCK pribadi maka hal tersebut menyebabkan kumuh.
		Fasilitas persampahan	√		Tidak tersedianya pengangkutan sampah menyebabkan kumuh karena sampah-sampah didiamkan di lingkungan sekitar.
		Saluran air hujan / drainase	√		Saluran drainase sangat penting ketika terjadi hujan, sementara saluran

					drainase di wilayah tersebut terputus.
		Jaringan jalan	√		Penerangan jalan masih minim, hanya tersedia di jalan besar saja.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Ketersediaan permukiman sudah cukup, bahkan masih terdapat lahan-lahan yang berpotensi untuk permukiman.
		Listrik		√	Karena pelayanan listrik sudah 100%.
		Hydran		√	Karena ini merupakan solusi penanganan kebakaran.
5	Bahaya	Kebakaran	√		Karena ini merupakan bahaya yang sangat rawan terjadi sehingga harus diantisipasi.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Jarak terlalu dekat sehingga dampak sangat terasa.
		Bau	√		Bau sangat mengganggu, terutama terhadap kesehatan warga.
		Transportasi sampah		√	Karena telah dilakukan pembersihan dan perawatan jalan yang termasuk ke dalam rute angkut sampah.

Identitas Responden 2

Dinas/Badan/Institusi : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Permukiman

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak		√	Program pemerintah hanya bersifat stimulan sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat juga.
2	Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	√		Pekerjaan yang tidak tetap merupakan penyebabnya.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Laju pertumbuhan sebagian besar menurun.
		Kepadatan penduduk		√	Kepadatan penduduk tergolong rendah.
		Tingkat pendidikan		√	Yang lebih tepat adalah keterampilan yang dimiliki yang menyesuaikan kebutuhan industri sekitar.
		Kesadaran dan	√		Sangat penting karena kekumuhan

		kepedulian warga			berawal dari kurangnya kesadaran / mental kumuh.
4	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	MCK umum sudah tersedia dan air bersih dalam kondisi baik.
		Fasilitas persampahan	√		Pengangkutan sampah yang teratur merupakan suatu kebutuhan.
		Saluran air hujan / drainase	√		Fungsi saluran drainase sangat penting sehingga harus dipenuhi.
		Jaringan jalan	√		Jaringan jalan merupakan penghubung sehingga harus dalam kondisi yang baik dan layak.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Karena kondisi permukiman masih renggang.
		Listrik		√	PLN sudah melayani wilayah ini.
		Hydran		√	Dapat dijelaskan di variabel kebakaran.
5	Bahaya	Kebakaran	√		Rawan terjadi dan belum dilengkapi dengan hydran pemadam kebakaran.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Walaupun jaraknya sudah sesuai aturan yang ada, akan tetapi jika masih terjadi pencemaran, maka hal tersebut menyebabkan kumuh.
		Bau	√		Bau mendatangkan lalat yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan memberikan kesan kumuh.

		Transportasi sampah		√	Telah menjadi lebih baik semenjak pergantian pengelola.
--	--	---------------------	--	---	---

Identitas Responden 3

Dinas/Badan/Institusi : UPST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 Jabatan : Kepala Sub Bagian TU

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Adanya permukiman kumuh menandakan bahwa peran pemerintah setempat masih belum maksimal.
2	Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	√		Seperti data yang disajikan, pekerjaan dan penghasilan warga tidak mencukupi untuk memperbaiki hunian mereka menjadi layak huni.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Karena laju pertumbuhan menurun.
		Kepadatan penduduk		√	Karena kepadatan penduduk rendah.
		Tingkat pendidikan	√		Seperti data yang disajikan, masih

					sedikit warga yang menempuh jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
		Kesadaran dan kepedulian warga	√		Merupakan dasar penentu kumuh atau tidak kumuh.
4	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	Masih belum ada sistem penyaringan limbah.
		Fasilitas persampahan	√		Seperti data yang disajikan, sampah-sampah yang tidak terangkut menyebabkan kesan kumuh.
		Saluran air hujan / drainase	√		Seperti data yang disajikan, saluran drainase masih belum 100% tersedia.
		Jaringan jalan	√		Seperti data yang disajikan, masih terdapat banyak jalan rusak sehingga tidak layak.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Karena berdasarkan data masih terdapat banyak lahan kosong.
		Listrik		√	Pelayanan listrik sudah menjangkau wilayah ini.
		Hydran		√	Berkaitan dengan kebakarran.
5	Bahaya	Kebakaran	√		Sangat rawan terjadi, terlebih lagi terdapat kebiasaan untuk membakar sampah.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Jarak permukiman yang berdekatan dengan TPST menyebabkan

					kekumuhan, akan tetapi TPST dibangun lebih dahulu (1989), sehingga seharusnya permukiman yang menyesuaikan jaraknya.
		Bau	√		Warga masih terganggu dengan bau sampah di TPST.
		Transportasi sampah		√	Sudah membaik dengan pengelolaan yang dilakukan DLH Provinsi DKI Jakarta.

Identitas Responden 4

Dinas/Badan/Institusi : Dinas PUPR Kota Bekasi
 Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pengolahan Data

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak		√	Keterbatasan dana yang diberikan merupakan penyebabnya
2	Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	√		Jenis pekerjaan sebagai pekerja informal menghasilkan pendapatan rendah yang identik dengan kemiskinan.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Laju pertumbuhan negatif walaupun sudah diproyeksikan ke tahun 2020.
		Kepadatan penduduk		√	Kepadatan penduduk sangat rendah.

		Tingkat pendidikan	√		Pendidikan merupakan bekal dasar. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mendapatkan kesempatan lebih terhadap dunia kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
		Kesadaran dan kepedulian warga	√		Perilaku sangat penting dalam menjaga agar tidak kumuh.
4	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan	√		Penyaringan limbah domestik perlu diadakan sehingga tidak diuang di kolam-kolam.
		Fasilitas persampahan	√		Sistem pengangkutan sampah sangat diperlukan.
		Saluran air hujan / drainase	√		Saluran drainase tidak boleh terputus sehingga air dapat mengalir.
		Jaringan jalan	√		Jaringan jalan yang rusak merupakan penyebabnya.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Tidak setuju, karena masih terdapat lahan untuk permukiman jika saja ada pengembang yang berminat membangun permukiman.
		Listrik		√	PLN telah melayani wilayah ini seluruhnya.
		Hydran		√	Merupakan penanganan kebakaran yang terjadi.

5	Bahaya	Kebakaran	√		Api dari pembakaran sampah rumah tangga ataupun daun kering oleh warga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Semakin dekat jaraknya, kekumuhan semakin tinggi dan <i>urgent</i> untuk diatasi.
		Bau	√		Bau sangat menyebabkan kumuh karena mendatangkan penyakit.
		Transportasi sampah		√	Pengelolaan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta lebih baik daripada PT. Goedang Tua.

Identitas Responden 5

Dinas/Badan/Institusi : Kelurahan Ciketingudik
Jabatan : Lurah Ciketingudik

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Bantuan RUTILAHU pemerintah terlalu kecil (nominalnya) sehingga warga miskin masih kesulitan untuk menutupi kekurangannya.
2	Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	√		Masih banyak warga dengan pekerjaan yang tidak tetap.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Laju pertumbuhan cenderung menurun sehingga tidak masalah.
		Kepadatan penduduk		√	Karena kepadatan penduduk sangat rendah.
		Tingkat pendidikan		√	Tingkat pendidikan warga sudah baik,

					yaitu rata-rata telah menempuh SMA/SMK.
		Kesadaran dan kepedulian warga	√		Dukungan warga untuk menyukseskan program pemerintah sangat diperlukan.
4	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan	√		Belum ada penyaringan limbah rumah tangga.
		Fasilitas persampahan	√		Pemerintah belum dapat menyediakan tempat sampah bagi tiap-tiap rumah.
		Saluran air hujan / drainase	√		Masih terdapat saluran yang terputus, terutama di jalan-jalan lingkungan.
		Jaringan jalan	√		Perkerasan jalan masih belum maksimal, sehingga masih terdapat jalan-jalan yang berlubang.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Lahan permukiman di wilayah ini masih tersedia.
		Listrik		√	Sudah dilayani PLN dengan baik.
		Hydran		√	Belum tersedia tapi belum dibutuhkan karena tidak pernah terjadi kebakaran.
5	Bahaya	Kebakaran	√		Belum pernah terjadi kebakaran di wilayah ini tapi patut diantisipasi.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Tidak ada masalah selama warga tidak keberatan.
		Bau	√		Bau yang disebabkan TPST sangat mengganggu warga.

		Transportasi sampah		√	Setelah dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta telah membaik.
--	--	---------------------	--	---	---

Identitas Responden 6

Dinas/Badan/Institusi : Kelurahan Sumurbatu
 Jabatan : Sekretaris Lurah Sumurbatu

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Masih banyak rumah tidak layak huni.
2	Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	√		Jenis pekerjaan informal yang tidak tetap menyebabkan pendapatan rendah.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Karena laju pertumbuhan menurun.
		Kepadatan penduduk		√	Berdasarkan data yang ada, kepadatan penduduk di wilayah ini sangat rendah.

		Tingkat pendidikan	√		Pendidikan warga sudah baik, yaitu mencapai SMK, dan sebagian kecil perguruan tinggi di luar daerah.
		Kesadaran dan kepedulian warga	√		Kesadaran warga masih kurang, terutama tentang persampahan.
4	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	Sudah disediakan/dibangun beberapa titik MCK umum oleh Kodim dan Pemerintah DKI Jakarta.
		Fasilitas persampahan	√		Belum ada bantuan tempat sampah dan sistem angkutnya.
		Saluran air hujan / drainase	√		Saluran yang masih terputus mungkin menyebabkan banjir kedepannya.
		Jaringan jalan	√		Jaringan jalan masih berlubang dan sempit.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Masih terdapat banyak lahan-lahan kosong yang belum dipergunakan.
		Listrik		√	Pelayanan listrik sudah maksimal.
		Hydran		√	Belum memerlukan hydran pemadam kebakaran.
5	Bahaya	Kebakaran	√		Tidak pernah terjadi kebakaran akan tetapi berpotensi terjadi.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Permukiman yang terlalu dekat TPST sangat rawan terhadap dampak bau dan dampak asap kebakaran di area TPST.

		Bau	√		Warga yang sudah terbiasa hidup dekat TPST pun masih merasa terganggu dengan baunya.
		Transportasi sampah		√	Pemerintah DKI Jakarta sudah mengelola dengan baik.

Identitas Responden 7

Dinas/Badan/Institusi : Masyarakat
Jabatan : Ketua RW 05 Ciketingudik

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Seharusnya ditingkatkan jumlah penerimanya.
2	Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	√		Karena pekerjaannya hanya buruh dan beberapa tidak tetap.

3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Karena laju pertumbuhan tidak besar sesuai data yang ada.
		Kepadatan penduduk		√	Karena kepadatan penduduk hanya tinggi di permukiman pemulung (<i>squatter</i>).
		Tingkat pendidikan	√		Belum terdapat perguruan tinggi di wilayah ini yang menyebabkan warga harus menyediakan biaya lebih untuk kuliah.
		Kesadaran dan kepedulian warga	√		Kepedulian masih kurang karena pendidikannya kurang.
4	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan	√		Karena MCK umum dibutuhkan untuk mengambil air bersihnya.
		Fasilitas persampahan	√		Karena sampah masih dibakar dan ditimbun tanah.
		Saluran air hujan / drainase	√		Saluran yang terputus menyebabkan air genangan tidak dapat mengalir.
		Jaringan jalan	√		Kondisi jalan yang berlubang menyebabkan timbulnya genangan-genangan air.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Karena masih banyak lahan yang belum digunakan pemiliknya / dijual.
		Listrik		√	Pemenuhan kebutuhan listrik sudah maksimal.

		Hydran		√	Tidak membutuhkan hydran karena dapat menggunakan layanan pemadam kebakaran.
5	Bahaya	Kebakaran	√		Patut untuk diwaspadai karena bangunan-bangunan yang berdekatan.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Dampak buruk TPST sangat terasa.
		Bau	√		Sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini tapi masih terasa bau dan mengganggu, terutama apabila sampah sedang diaduk (pagi dan sore).
		Transportasi sampah		√	Sudah baik dan tidak menyebabkan macet.

Identitas Responden 8

Dinas/Badan/Institusi : Masyarakat
Jabatan : Ketua RW 03 Sumurbatu

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Jumlah penerima dan jumlah dananya harus diperbanyak lagi.
2	Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	√		Pekerjaan yang tidak tetap tersebut menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan.
3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Laju pertumbuhan menurun, sesuai data yang ada.
		Kepadatan penduduk		√	Tidak terlalu padat penduduk.
		Tingkat pendidikan	√		Warga usia tua yang merupakan kepala keluarga mayoritas hanya lulusan SD

					sehingga hanya bisa menjadi buruh.
		Kesadaran dan kepedulian warga	√		Kesadaran masih rendah karena sulit untuk mengatur warga.
4	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan	√		Karena MCK yang ada sudah rusak dan tidak pernah diperbaiki.
		Fasilitas persampahan	√		Pengangkutan sampah dapat membuat lingkungan menjadi lebih bersih, tetapi belum diterapkan di sini.
		Saluran air hujan / drainase	√		Terdapat jalan tanpa saluran.
		Jaringan jalan	√		Jalan yang ada memiliki diameter yang kecil sehingga tidak dapat dilalui mobil.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Lahan permukiman masih banyak tersedia.
		Listrik		√	Pelayanan listrik sudah baik.
		Hydran		√	Belum dibutuhkan warga.
5	Bahaya	Kebakaran	√		Dapat terjadi kapanpun, sehingga harus diwaspadai.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Merasa terganggu karena terlalu dekat, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa.
		Bau	√		Belum bisa terbiasa dengan baunya sehingga sangat mengganggu.
		Transportasi sampah		√	Tidak masalah karena sudah lebih baik

					dari sebelumnya.
--	--	--	--	--	------------------

Identitas Responden 9

Dinas/Badan/Institusi : Jurusan Arsitektur ITS

Jabatan : Dosen

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Ketika masih terdapat permukiman kumuh, maka peran pemerintah belum maksimal dalam memberantasnya dan harus segera merumuskan kebijakan yang tepat.
2	Ekonomi	Jenis pekerjaan informal	√		Berhubungan dengan pendapatan dan kemiskinan.

3	Kependudukan	Laju pertumbuhan		√	Laju pertumbuhan penduduk sebagian besar masih negatif.
		Kepadatan penduduk		√	Kepadatan penduduk masih tergolong tingkat rendah.
		Tingkat pendidikan	√		Tingkat pendidikan harus berbanding lurus dengan <i>skill</i> . <i>Skill</i> yang dimiliki juga harus sesuai kebutuhan.
		Kesadaran dan kepedulian warga	√		Kesadaran dan pendidikan yang rendah menyebabkan kumuh.
4	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan	√		Karena masih terdapat rumah tanpa MCK pribadi.
		Fasilitas persampahan	√		Karena sampah masih diolah dengan dibakar swadaya, tidak diangkut ke TPS/TPA.
		Saluran air hujan / drainase	√		Karena masih terdapat saluran drainase yang terputus dan persentasenya besar.
		Jaringan jalan	√		Karena masih terdapat jalan tanah yang membahayakan jika terjadi hujan dan juga penerangannya minim.
		Keterbatasan lahan permukiman		√	Jika masih terdapat lahan yang cukup untuk permukiman di wilayah ini maka tidak menjadi masalah.
		Listrik		√	Jika pelayanan sudah 100% maka tidak menjadi masalah.

		Hydran		√	Berkaitan dengan variabel kebakaran.
5	Bahaya	Kebakaran	√		Sangat berpotensi terjadi kebakaran di permukiman kumuh dan belum terdapat antisipasinya sehingga sangat sulit untuk menghentikannya.
6	Standard TPA	Jarak terhadap permukiman	√		Permukiman harus dibangun sesuai jarak standard yang ada, karena jika tidak sesuai (terlalu dekat) maka semakin besar dampak negatif yang akan dirasakan.
		Bau	√		Bau menyebabkan kualitas udara menurun dan berpengaruh pada pelapukan bangunan, serta menurunkan kualitas kesehatan warga.
		Transportasi sampah		√	Jika pengelolaan di tangan Pemerintah DKI Jakarta sudah baik maka tidak menjadi masalah.

LAMPIRAN 8 (Hasil Kuisisioner Delphi Putaran 3)

KUISISIONER WAWANCARA DELPHI

Biodata Peneliti

Nama : Anindita Wilandari
NRP : 3613100026
Alamat / No HP : Jalan Cikal Raya No. 218 RT 05/RW 07, Rawalumbu Bekasi / 081295496546
Jurusan / institut : Perencanaan Wilayah dan Kota / Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Dosen Pembimbing : Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

Pendahuluan

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Anindita Wilandari selaku mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS Surabaya sedang melakukan penelitian yang berjudul ***Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi*** sebagai kelengkapan mata kuliah Tugas Akhir. Penelitian ini terkait dengan persepsi Anda sebagai *stakeholder* dalam pengidentifikasian faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Bantargebang. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Identitas Responden 1

Dinas/Badan/Institusi : Bappeda Kota Bekasi
 Jabatan : Kasubid PUPR dan Perhubungan

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Masih mementingkan kuantitas dalam pelaksanaannya, terutama program RUTILAHU yang disebutkan tadi.
2	Kependudukan	Tingkat pendidikan	√		Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan dan penghasilan. Jika rendah, maka menyebabkan kemiskinan yang berujung pada kekumuhan.
3	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	Sebagian besar sudah memiliki MCK pribadi sehingga tidak terlalu bergantung pada MCK umum lagi.

Identitas Responden 2

Dinas/Badan/Institusi : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Permukiman

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Walaupun program RUTILAHU bersifat stimulan, namun dana bantuan yang diberikan dirasa terlalu minim oleh warga.
2	Kependudukan	Tingkat pendidikan	√		Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan tidak terserapnya di lapangan pekerjaan yang tersedia, karena yang pertama kali dilihat adalah jenjang pendidikan formalnya.
3	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	MCK umum sudah tersedia dan air bersih dalam kondisi baik.

Identitas Responden 3

Dinas/Badan/Institusi : UPST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 Jabatan : Kepala Sub Bagian TU

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Adanya permukiman kumuh menandakan bahwa peran pemerintah setempat masih belum maksimal.
2	Kependudukan	Tingkat pendidikan	√		Seperti data yang disajikan, masih sedikit warga yang menempuh jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
3	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	Masih belum ada sistem penyaringan limbah.

Identitas Responden 4

Dinas/Badan/Institusi : Dinas PUPR Kota Bekasi
 Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pengolahan Data

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Jumlah bantuan terlalu kecil untuk dapat membangun sebuah hunian yang layak huni sehingga perlu ditinjau kembali.
2	Kependudukan	Tingkat pendidikan	√		Pendidikan merupakan bekal dasar. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mendapatkan kesempatan lebih terhadap dunia kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
3	Infrastruktur	Sanitasi lingkungan		√	MCK umum tidak terlalu diperlukan

	permukiman				karena yang lebih diperlukan adalah keberadaan air bersihnya, sehingga tidak masalah jika tidak ada MCK umum.
--	------------	--	--	--	---

Identitas Responden 5

Dinas/Badan/Institusi : Kelurahan Ciketingudik
 Jabatan : Lurah Ciketingudik

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Bantuan RUTILAHU pemerintah terlalu kecil (nominalnya) sehingga warga miskin masih kesulitan untuk menutupi kekurangannya.
2	Kependudukan	Tingkat pendidikan	√		Tingkat pendidikan masih sebatas

					SMK/SMA dan warga usia tua hanya sebatas SD.
3	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	Lebih dibutuhkan ketersediaan air bersih daripada MCK umum.

Identitas Responden 6

Dinas/Badan/Institusi : Kelurahan Sumurbatu
 Jabatan : Sekretaris Lurah Sumurbatu

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Masih banyak rumah tidak layak huni.
2	Kependudukan	Tingkat pendidikan	√		Pendidikan warga sudah baik, yaitu mencapai SMK, dan sebagian kecil

					perguruan tinggi di luar daerah.
3	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	Sudah disediakan/dibangun beberapa titik MCK umum oleh Kodim dan Pemerintah DKI Jakarta.

Identitas Responden 7

Dinas/Badan/Institusi : Masyarakat
 Jabatan : Ketua RW 05 Ciketingudik

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Seharusnya ditingkatkan jumlah penerimanya.
2	Kependudukan	Tingkat pendidikan	√		Belum terdapat perguruan tinggi di wilayah ini yang menyebabkan warga harus menyediakan biaya lebih untuk

					kuliah.
3	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	Hanya membutuhkan air bersih di MCK umum.

Identitas Responden 8

Dinas/Badan/Institusi : Masyarakat
Jabatan : Ketua RW 03 Sumurbatu

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Jumlah penerima dan jumlah dananya harus diperbanyak lagi.
2	Kependudukan	Tingkat pendidikan	√		Warga usia tua yang merupakan kepala keluarga mayoritas hanya lulusan SD sehingga hanya bisa menjadi buruh.

3	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	Hanya membutuhkan air bersih di MCK umum.
---	--------------------------	---------------------	--	---	---

Identitas Responden 9

Dinas/Badan/Institusi : Jurusan Arsitektur ITS

Jabatan : Dosen

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Silahkan Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu dan sertakan alasan pemilihan jawaban tersebut.

Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Variabel	Tanggapan		Alasan
			S	TS	
1	Peran Pemerintah	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak	√		Ketika masih terdapat permukiman kumuh, maka peran pemerintah belum maksimal dalam memberantasnya dan harus segera merumuskan kebijakan yang tepat.
2	Kependudukan	Tingkat pendidikan	√		Tingkat pendidikan harus berbanding lurus dengan <i>skill</i> . <i>Skill</i> yang dimiliki juga harus sesuai kebutuhan.

3	Infrastruktur permukiman	Sanitasi lingkungan		√	Jika yang dibutuhkan adalah air bersihnya, maka MCK umum yang tidak memadai bukanlah penyebab kumuh.
---	--------------------------	---------------------	--	---	--

LAMPIRAN 9 (Hasil Kuisisioner AHP)

KUISISIONER WAWANCARA AHP

Biodata Peneliti

Nama : Anindita Wilandari
 NRP : 3613100026
 Alamat / No HP : Jalan Cikal Raya No. 218 RT 05/RW 07, Rawalumbu Bekasi / 081295496546
 Jurusan / institut : Perencanaan Wilayah dan Kota / Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 Dosen Pembimbing : Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

Pendahuluan

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Anindita Wilandari selaku mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS Surabaya sedang melakukan penelitian yang berjudul ***Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi*** sebagai kelengkapan mata kuliah Tugas Akhir. Penelitian ini terkait dengan persepsi Anda sebagai *stakeholder* dalam pengidentifikasian faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Identitas Responden 1

Dinas/Badan/Institusi : Bappeda Kota Bekasi

Jabatan

: Kasubid PUPR dan Perhubungan

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan faktor-faktor penyebab kekumuhan yang diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya. Pembobotan kriteria dibagi ke dalam 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut :

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua faktor memiliki prioritas yang sama dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan diprioritaskan dibandingkan dengan faktor lain dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.
5	Faktor jelas lebih penting dan diprioritaskan daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor pembandingnya dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.

7	Faktor sangat jelas lebih penting dan diprioritaskan daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.
9	Faktor mutlak lebih penting dan diprioritaskan dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas peningkatan kualitas.
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam menentukan prioritas peningkatan kualitasnya karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai di bawah dan di atasnya, dimana faktor yang diberikan bila terdapat dua kompromi di antara dua pilihan.

Contoh :

Manakah yang lebih diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya dari faktor-faktor penyebab kekumuhan di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu di bawah ini?

Faktor/Variabel A	Pembobotan																Faktor/Variabel B	
Tata bangunan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kualitas bangunan

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa kualitas bangunan lebih diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya dibandingkan dengan kondisi tata bangunan. Dengan ini, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab daftar pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan persepsi Bapak/Ibu.

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.
3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.
4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.

6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak terhadap badan air, dan bau.
---	--------------	---

Faktor A	Pembobotan																	Faktor B
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman

Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan

2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga
---	--------------------------	---------------------------------

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang
2	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
3	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Tingkat pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian

																	warga
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan jalan

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase

Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Jangkauan dampak bau.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

Identitas Responden 2

Dinas/Badan/Institusi : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Permukiman

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.
3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.
4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.
6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak terhadap badan air, dan bau.

Faktor A	Pembobotan	Faktor B
----------	------------	----------

Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga

Variabel A	Pembobotan	Variabel B
------------	------------	------------

Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang
2	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
3	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Tingkat pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan jalan

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Jangkauan dampak bau.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

Identitas Responden 3

Dinas/Badan/Institusi : UPST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 Jabatan : Kepala Sub Bagian TU

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor priotitas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun

berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.
3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.
4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.
6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak terhadap badan air, dan bau.

Faktor A	Pembobotan																	Faktor B
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman

Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang

2	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
3	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Tingkat pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan

		jalan
--	--	-------

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Jangkauan dampak bau.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

Identitas Responden 4

Dinas/Badan/Institusi : Dinas PUPR Kota Bekasi

Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pengolahan Data

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam

		menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.
3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.
4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.
6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak terhadap badan air, dan bau.

Faktor A	Pembobotan																	Faktor B
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria

ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang
2	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
3	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Tingkat pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan jalan

Variabel A	Pembobotan	Variabel B
------------	------------	------------

Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Jangkauan dampak bau.

Variabel A	Pembobotan	Variabel B
------------	------------	------------

Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

Identitas Responden 5

Dinas/Badan/Institusi : Kelurahan Ciketingudik
 Jabatan : Lurah Ciketingudik

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.

3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.
4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.
6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak terhadap badan air, dan bau.

Faktor A	Pembobotan																	Faktor B
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman

Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang
2	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
3	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan	Variabel B
------------	------------	------------

Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Tingkat pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan jalan

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan

Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Jangkauan dampak bau.

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air

Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

Identitas Responden 6

Dinas/Badan/Institusi : Kelurahan Sumurbatu
 Jabatan : Sekretaris Lurah Sumurbatu

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.
3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.

4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.
6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak terhadap badan air, dan bau.

Faktor A	Pembobotan																	Faktor B
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya

Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang
2	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
3	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian

																		warga
Tingkat pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan jalan

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Jangkauan dampak bau.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

Identitas Responden 7

Dinas/Badan/Institusi : Masyarakat
 Jabatan : Ketua RW 05 Ciketingudik

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.
3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.
4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.
6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak

		terhadap badan air, dan bau.
--	--	------------------------------

Faktor A	Pembobotan																	Faktor B
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman

Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga

Variabel A	Pembobotan																Variabel B	
Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang
2	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
3	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Tingkat pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan jalan

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Jangkauan dampak bau.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

Identitas Responden 8

Dinas/Badan/Institusi : Masyarakat

Jabatan

: Ketua RW 03 Sumurbatu

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.
3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.
4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.
6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak terhadap badan air, dan bau.

Faktor A	Pembobotan	Faktor B
----------	------------	----------

Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga

Variabel A	Pembobotan	Variabel B
------------	------------	------------

Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang
2	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
3	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Tingkat pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan jalan

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Jangkauan dampak bau.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

Identitas Responden 9

Dinas/Badan/Institusi : Jurusan Arsitektur ITS

Jabatan : Dosen

Pertanyaan 1. Perbandingan Level I

Berikut ini adalah kriteria berupa faktor yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar faktor serta deskripsinya :

No	Faktor	Deskripsi
1	Peran pemerintah	Peran pemerintah terdiri dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak.
2	Ekonomi	Ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan informal.
3	Kependudukan	Kependudukan terdiri dari status kependudukan, kesadaran dan kepedulian warga, serta tingkat pendidikan.
4	Infrastruktur permukiman	Infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan air bersih, fasilitas persampahan, saluran drainase, dan jaringan jalan.
5	Bahaya	Bahaya terdiri dari bahaya kebakaran.
6	Standard TPA	Standard TPA terdiri dari jarak terhadap permukiman, jarak terhadap badan air, dan bau.

Faktor A	Pembobotan																	Faktor B
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi

Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Peran pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kependudukan
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur permukiman
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya
Kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bahaya

Infrastruktur permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA
Bahaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standard TPA

Pertanyaan 2. Perbandingan Level II

Berikut ini merupakan sub-kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor kriteria utama yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas peningkatan kualitas. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar variabel serta deskripsinya :

Ekonomi

No	Variabel	Deskripsi
1	Tingkat pendapatan	Rata-rata jumlah pendapatan warga per bulan
2	Jenis pekerjaan informal	Rata-rata jenis pekerjaan warga

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Tingkat pendapatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jenis pekerjaan informal

Kependudukan

No	Variabel	Deskripsi
1	Status kependudukan	Jumlah penduduk pendatang
2	Tingkat pendidikan	Rata-rata jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh warga
3	Kesadaran dan kepedulian warga	Perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukimannya.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat pendidikan
Status kependudukan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga
Tingkat pendidikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesadaran dan kepedulian warga

Infrastruktur Permukiman

No	Variabel	Deskripsi
----	----------	-----------

1	Jaringan air bersih	Sumber dan tingkat pelayanan air bersih
2	Fasilitas persampahan	Lokasi TPS dan TPA dan proses pengangkutan sampah
3	Saluran drainase	Ketersediaan dan kondisi jaringan drainase dan air tanah, serta kemampuan saluran dalam menampung air hujan
4	Jaringan jalan	Kondisi perkerasan jalan, diameter, dan atribut kelengkapan jalan

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fasilitas persampahan
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Jaringan air bersih	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saluran drainase
Fasilitas persampahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan
Saluran drainase	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jaringan jalan

Standard TPA

No	Variabel	Deskripsi
1	Jarak terhadap permukiman	Jarak TPA terhadap permukiman dalam meter
2	Jarak terhadap badan air	Jarak terhadap sungai dalam satuan meter
4	Bau	Jangkauan dampak bau.

Variabel A	Pembobotan																	Variabel B
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak terhadap badan air
Jarak terhadap permukiman	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau
Jarak terhadap badan air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bau

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Jakarta, 5 April 1995 dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di TK Al-Huda, SDIT Thariq Bin Ziyad, SMPIT Thariq Bin Ziyad, dan SMAN 1 Tambun Selatan.

Saat masa perkuliahan di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Penulis melakukan kerja praktek di Bappeda Provinsi DKI Jakarta dengan proyek evaluasi RPJMD DKI Jakarta urusan perumahan rakyat. Permasalahan pada

proyek tersebutlah yang melatarbelakangi pemilihan studi pada Tugas Akhir ini. Penulis sempat tergabung di organisasi AIESEC Surabaya dan terpilih menjadi *organizing committee president* sebuah *project* internasional “Hometow Project” yang diadakan AIESEC Indonesia dan Danone Aqua pada tahun 2016.